



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

Direktorat Jenderal Penguatan
Daya Saing Produk Kelautan
dan Perikanan

2024



KATA PENGANTAR

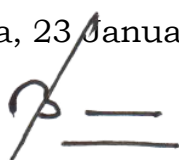


Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2024 disusun sebagai salah satu implementasi atas penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan 5 kebijakan ekonomi biru KKP, Ditjen PDSPKP memperkuat peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan dengan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk peningkatan konsumsi ikan di dalam negeri dan ekspor. Upaya memperkuat daya saing tersebut telah dijabarkan pada perjanjian kinerja Ditjen PDSPKP, yang juga menjadi ukuran dalam penilaian keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran program. Secara garis besar pencapaian kinerja Ditjen PDSPKP tahun 2024 ditunjukkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Ditjen PDSPKP sebesar 101,59 (Kategori Baik).

Akhir Kata, semoga Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan atas mandat dan kinerja yang telah ditetapkan kepada kami. Dengan semangat internalisasi #KITAPDS yaitu Kompetensi, Inovasi-Integritas, Transparansi, Akuntabel dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi Ditjen PDSPKP dalam mendukung kebijakan ekonomi biru KKP.

Jakarta, 23 Januari 2025


Budi Sulistiyo

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Budi Sulistiyo

PENYUSUN

Machmud

Prayudi Budi Utomo

Agus Wijatmoko

Agustina Pujiastuti

Andika Adisukma

Ayu Wahdania

Muqaramah Fitra Hasanah

Devi Sari

KONTRIBUTOR

Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ditjen PDSPKP telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Berdasarkan PK tersebut, terdapat 23 indikator kinerja yang terdiri dari delapan Indikator yang kegiatan bersifat triwulanan, empat bersifat semesteran, dan 11 bersifat tahunan.

Sebanyak 23 indikator kinerja tersebut seluruhnya telah dilakukan pengukuran pada Tahun 2024. Hasil pengukuran **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Ditjen PDSPKP Tahun 2024** yang ditunjukkan pada Aplikasi Kinerjaku adalah **sebesar 101,59% (Kategori Baik)**.

Perincian capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Tiga belas indikator kinerja yang bersifat tahunan yaitu (1) Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing, (2) Konsumsi Ikan, (3) Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP), (4) Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Ditjen PDSPKP, (5) Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP, (6) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PDSPKP, (7) Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen PDSPKP, (8) Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PDSPKP, (9) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Ditjen PDSPKP, (10) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Ditjen PDSPKP, (11) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Ditjen PDSPKP, (12) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Ditjen PDSPKP, serta (13) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen PDSPKP.

2. Dua indikator kinerja yang bersifat semesteran yaitu Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PDSPKP.
3. Delapan indikator kinerja yang bersifat triwulanan yaitu:
 - a. VolumeNilai Ekspor Hasil Perikanan;
 - b. Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan;
 - c. Kinerja Logistik Hasil Perikanan;
 - d. Pembiayaan Usaha KP melalui Kredit Program;
 - e. Nilai PNBPN Ditjen PDSPKP;
 - f. Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP;
 - g. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PDSPKP;
 - h. Unit kerja Ditjen PDSPKP yang Menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.
4. Indikator kinerja yang belum mencapai target pada tahun 2024 yaitu nilai ekspor hasil perikanan dengan persentase capaian 82,64%, Konsumsi Ikan dengan persentase capaian 99,83%, Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan Melalui Kredit Program sebesar 75,73%, dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 97,97%.
5. Indikator kinerja yang memiliki capaian melebihi target 2024 yaitu Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan dengan capaian 102,70%, Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan sebesar 116,67%, Kinerja Logistik Hasil Perikanan sebesar 102,16, Nilai PNBPN Ditjen PDSPKP sebesar 122,70%, Tenaga Kerja Bidang PDSPKP 100,07, Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan sebesar 100,18%, Nilai Struktur Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP sebesar 123,33%, Indeks Profesionalitas ASN sebesar 102,44%, Nilai Penilaian Mandiri SAKIP sebesar 103,20, Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen PDSPKP sebesar 172,41, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang

Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja sebesar 121,76%, Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PDSPKP sebesar 112,18%, Unit kerja Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar sebesar 141,84%, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Ditjen PDSPKP sebesar 101,70%, Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Ditjen PDSPKP sebesar 106,49%, Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Ditjen PDSPKP sebesar 115,55%, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Ditjen PDSPKP sebesar 109,38%, dan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen PDSPKP sebesar 105,49.

6. Alokasi anggaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah sebesar Rp 386.899.151.000,- yang seluruhnya merupakan APBN rupiah murni dan PNPB. Dari pagu anggaran tersebut, terdapat blokir sebesar Rp 59.296.601.000,- sehingga pagu anggaran efektif menjadi sebesar Rp 327.602.550.000,-. Penyerapan anggaran Ditjen PDSPKP sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar Rp 325.247.621.493,- atau setara dengan 84,07% terhadap total pagu anggaran awal atau 99,28% terhadap pagu anggaran pasca blokir (pagu efektif).

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
TIM PENYUSUN	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	1
DAFTAR LAMPIRAN	6
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Maksud dan Tujuan	8
C. Tugas dan Fungsi.....	8
D. Keragaan Sumber Daya Manusia Aparatur	12
E. Permasalahan Utama	13
F. Sistematika Penyajian	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. Rencana Strategis	19
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja	26
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	29
Sasaran Program 1. Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing.....	30
1. Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	30
Sasaran Program 2. Ekonomi Subsektor Pengolahan dan Pemasaran Produk KP Meningkatkan.....	41
2. Nilai Ekspor Hasil Perikanan.....	41
3. Konsumsi Ikan.....	63

Sasaran Program 3. Terwujudnya pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel, dan Berkelanjutan	73
4. Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan	73
5. Kinerja Logistik Hasil Perikanan	84
6. Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program	93
7. Nilai PNBP Ditjen PDSPKP	106
8. Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP.....	109
9. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)	111
Sasaran Program 4. Terkelolanya Pemerintahan yang Baik Mendukung Penguatan Daya Saing KP	116
10. Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Ditjen PDSPKP	116
11. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP	121
12. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP.....	124
13. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PDSPKP	129
14. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen PDSPKP	133
15. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PDSPKP	135
16. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik PDSPKP.....	138
17. Unit Kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	143
18. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PDSPKP	145
19. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP	150
20. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Ditjen PDSPKP...	153
21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Ditjen PDSPKP	156
22. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Ditjen PDSPKP.....	159
23. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen PDSPKP	165
C. Realisasi Anggaran.....	170

BAB IV PENUTUP.....	172
A. Kesimpulan.....	172
B. Permasalahan dan Rekomendasi.....	172
C. Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024.....	175
LAMPIRAN	179

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2024.....	24
Tabel 2.	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Ditjen PDSPKP Periode Tahun 2024	27
Tabel 3.	Ikhtisar Pencapaian Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	30
Tabel 4.	Ikhtisar Pencapaian Nilai Ekspor Hasil Perikanan	42
Tabel 5.	Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Komoditas Utama Tahun 2024.....	43
Tabel 6.	Ekspor Berdasarkan Komoditas Utama Tahun 2023-2024	44
Tabel 7.	Impor Berdasarkan Komoditas Utama Tahun 2023-2024	45
Tabel 8.	Ikhtisar Pencapaian Konsumsi Ikan	64
Tabel 9.	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.....	74
Tabel 10.	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Logistik Hasil Perikanan	86
Tabel 11.	Ikhtisar Pencapaian Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program	94
Tabel 12.	Rincian Pembiayaan Kredit Program di Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.....	96
Tabel 13.	Realisasi nilai pembiayaan sektor kelautan dan perikanan	97
Tabel 14.	Ikhtisar Pencapaian Nilai PNPB Ditjen PDSPKP	106
Tabel 15.	Ikhtisar Pencapaian Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP.....	109
Tabel 16.	Ikhtisar Pencapaian Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)	112
Tabel 17.	Ikhtisar Pencapaian Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Ditjen PDSPKP	118
Tabel 18.	Ikhtisar Pencapaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP	121
Tabel 19.	Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP	125
Tabel 20.	Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PDSPKP	129
Tabel 21.	Ikhtisar Pencapaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen PDSPKP	133
Tabel 22.	Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PDSPKP	136

Tabel 23.	Data Rekapitulasi Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2024	138
Tabel 24.	Ikhtisar Pencapaian Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PDSPKP	140
Tabel 25.	Ikhtisar Pencapaian Unit Kerja Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar.....	143
Tabel 26.	Ikhtisar Pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PDSPKP	145
Tabel 27.	Ikhtisar Pencapaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Ditjen PDSPKP	151
Tabel 28.	Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP	153
Tabel 29.	Ikhtisar Pencapaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP.....	157
Tabel 30.	Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP.....	160
Tabel 31.	Ikhtisar Pencapaian Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen PDSPKP	166
Tabel 32.	Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Kewenangan Tahun 2024.....	170
Tabel 33.	Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2024.....	171
Tabel 34.	Permasalahan dan Rekomendasi atas Indikator kinerja yang tidak mencapai target pada Tahun 2024	173
Tabel 35.	Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024	175

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Ditjen PDSPKP	10
Gambar 2.	Struktur Organisasi BBP3KP	12
Gambar 3.	Keragaan SDMA Ditjen PDSPKP Tahun 2024	12
Gambar 4.	Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2024	18
Gambar 5.	NKO Ditjen PDSPKP Tahun 2024	26
Gambar 6.	Rapat Konsensus RSNI3 Produk Perikanan	33
Gambar 7.	Rapat Terkait Penerbitan SKP	33
Gambar 8.	Keikutsertaan Pada Kegiatan valnas VPO Semester I Tahun 2024	34
Gambar 9.	Penandatanganan Kontrak Konstruksi UPI Bernilai Tambah	34
Gambar 10.	Pembinaan Penerapan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan di Kota Ternate	35
Gambar 11.	Seminar <i>Catfish Day</i>	36
Gambar 12.	Kegiatan Mendukung kampanye protein ikan	36
Gambar 13.	Identifikasi dan pengumpulan data untuk penyusunan bahan RSNI	37
Gambar 14.	Peta Sebaran Lokasi Produk Kelautan dan Perikanan yang Disertifikasi Tahun 2024	38
Gambar 15.	Kegiatan Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan	39
Gambar 16.	Pelatihan Digital Marketing dan Monitoring evaluasi UMKM Inkubasi Bisnis Invapro KP	40
Gambar 17.	Fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil KP	41
Gambar 18.	Sosialisasi dan Video Promosi Bursa Pasar Ikan	51
Gambar 19.	Perundingan Indonesia - <i>Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (ICA CEPA)	53
Gambar 20.	Indonesia - Jepang <i>Economic Partnership Agreement</i> (IJEPA)	55
Gambar 21.	Serangkaian koordinasi penanganan kasus CVD dan AD udang beku Indonesia	58

Gambar 22.	Partisipasi Dalam <i>Seafood Expo North America</i> (SENA) yang dilaksanakan di Boston, Amerika Serikat	61
Gambar 23.	Partisipasi pada <i>Seafood Expo Global</i> (SEG) dilaksanakan pada tanggal 23-25 April 2024 di Barcelona, Spanyol	62
Gambar 24.	Kegiatan NUSATIC 2024	62
Gambar 25.	Indo Fisheries 2024 Expo & Forum	63
Gambar 26.	Pelaksanaan Kampanye Gemarikan	68
Gambar 27.	Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI/BBWI)	69
Gambar 28.	Kegiatan Trade Expo Indonesia (TEI)	69
Gambar 29.	Kegiatan Hari Nusantara (HARNUS)	70
Gambar 30.	Kegiatan Pasar Ikan Fandoi	71
Gambar 31.	Penyerahan bantuan pemerintah berupa peralatan pemasaran.....	72
Gambar 32.	Capaian Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Bidang Usaha Periode Tahun 2023-2024 (Rp Triliun).....	77
Gambar 33.	FGD Pengembangan Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan	78
Gambar 34.	Kegiatan Pemetaan Calon Lokasi Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan di Kota Ambon, Provinsi Maluku.....	79
Gambar 35.	<i>Benchmarking</i> penyusunan peluang investasi kelautan dan perikanan (<i>Grand Design</i> Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan) di Provinsi Sulawesi Utara	80
Gambar 36.	Kegiatan pendampingan Minat Investasi D42 – Uni Emirat Arab	81
Gambar 37.	Pendampingan dan Audiensi Minat Investasi PT Nusantara Energy Indonesia	82
Gambar 38.	Audiensi <i>Blended Finance Investment Fund Blue Ocean</i> dengan <i>Seatech Energy</i>	82
Gambar 39.	Pendampingan dan Audiensi Minat Investasi PT Industri Laut Nusantara	83
Gambar 40.	Pendampingan dan Audiensi Minat Investasi Delegasi Enterprise dari Provinsi Guangdong, China.....	84

Gambar 41. Bimbingan Teknis Dasar dasar pembekuan dan penyimpanan ikan Beku dan pemeliharaan Sistem Pendingin di Gudang Beku Portabel Bantuan Pemerintah	91
Gambar 42. Kegiatan Sosialisasi WMS	92
Gambar 43. Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan BP Gudang Beku	93
Gambar 44. Bimbingan Teknik Fasilitas Pembiayaan dan Layanan Gerai Investasi dan Layanan Usaha di Karawang	98
Gambar 45. Bimbingan teknik fasilitas Pembiayaan dan Layanan Gerai Investasi dan Layanan Usaha di Bekasi	99
Gambar 46. Bimbingan Teknis kelembagaan Kelembagaan Usaha Subsektor Pengolahan dan Pemasaran untuk Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	99
Gambar 47. Pembahasan Rancangan Pedoman Umum Penguatan Kelembagaan Usaha Kelautan dan Perikanan Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran Ikan	100
Gambar 48. Pra-Pendirian Lembaga Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen	101
Gambar 49. Pra-Pendirian Lembaga Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang	101
Gambar 50. Pra-Pendirian Lembaga Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi	102
Gambar 51. Pemberdayaan Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan Menuju UMKM naik kelas	102
Gambar 52. Sosialisasi Dan Pendampingan Kepada Koperasi Dan Pelaku Usaha Untuk Menjadi Mitra BGN	103
Gambar 53. Kegiatan Pra Usaha dalam rangka penciptaan wirausaha baru	103
Gambar 54. Pendampingan wirausaha di Kabupaten Pasuruan	104
Gambar 55. Pembinaan dan pendampingan Wirausaha KP di Kabupaten Bintan.....	104
Gambar 56. Lokasi Sampling Perhitungan NTPHP	112
Gambar 57. Apel Pagi Lingkup Ditjen PDSPKP	119
Gambar 58. Bimbingan Teknis Pengenalan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan	119

Gambar 59. Internalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat.	121
Gambar 60. Rapat koordinasi penyelenggaraan SPIP triwulan IV tahun 2024.....	124
Gambar 61. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai.....	127
Gambar 62. Bimbingan Teknis Penguatan Sinergitas dan Budaya Kerja ASN	127
Gambar 63. Pelantikan Pejabat Fungsional Arsiparis dan APK APBN	128
Gambar 64. Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Perpindahan Jabatan Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan	128
Gambar 65. Penilaian Kompetensi Tugas Belajar dan Izin Belajar tanggal 12 Juni 2024.....	128
Gambar 66. Sosialisasi Jabatan Fungsional Lingkup PDSPKP ..	129
Gambar 67. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Ditjen PDSPKP Tahun Anggaran 202	131
Gambar 68. <i>Workshop</i> Penulisan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan pada Wikipedia Bahasa Indonesia	132
Gambar 69. <i>Sharing Session</i> Pengelolaan Kinerja	132
Gambar 70. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal	138
Gambar 71. Rapat Pleno Penilaian Proposal KIPP, tanggal 23 Juli 2024	142
Gambar 72. Kegiatan pemutakhiran data Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA Triwulan IV Tahun 2024	148
Gambar 73. Keikutsertaan dalam rapat monitoring dan evaluasi capaian IKPA bulan September dan Oktober Tahun 2024	149
Gambar 74. Pemantauan dan asistensi pengisian capaian output periode Oktober 2024	149
Gambar 75. Rapat monitoring dan evaluasi capaian IKPA periode November 2024.....	150
Gambar 76. Kegiatan Koordinasi Pelaporan Capaian Output...	153

Gambar 77. Update RUP dan Pencatatan Realisasi Paket PBJ Tahun Anggaran 2024 lingkup Ditjen PDSPKP.....	155
Gambar 78. Temuan sementara program P3DN TW III TA 2024 lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	155
Gambar 79. Penginputan RUP Tahun Anggaran 2025 lingkup Ditjen PDSPKP.....	156
Gambar 80. Pemetaan dan Updating Pemanfaatan Bantuan Pemerintah dilokasi Sampling Penilaian Efektifitas Bantuan Pemerintah/Kegiatan Prioritas.....	159
Gambar 81. Rapat Tindaklanjut Hasil Sementara Evaluasi Tingkat Efektivitas Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah	159
Gambar 82. a) Rapat Penandatanganan BAST Pengembalian PIM dan Pembahasan Rencana Perbaikan PIM dengan PT Perindo, b) Rapat pembahasan Skema Sewa PIM dengan KPKNL Jakarta II	164
Gambar 83. Monitoring dan Evaluasi Pendataan Satu Data Bidang PDSPKP tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024.....	169

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	180
---	-----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diarahkan untuk mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing tinggi sehingga dapat bersaing baik di pasar domestik maupun internasional. Kebijakan dimaksud mengacu pada pendekatan market driven atau pasar yang menjadi acuan kebijakan, sehingga ketersediaan produk dapat diterima dan diminati oleh konsumen. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus merupakan produk kelautan dan perikanan yang memiliki sifat *high quality, safe, traceable, high value content* dan *competitive*. Kebijakan ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis Ditjen PDSPKP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Ditjen

PDSPKP sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun dokumen perencanaan kinerja, pengukuran capaian kinerja, pengelolaan data capaian kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik berdasarkan renstra maupun rencana kinerja tahunan yang dibuat sebelumnya. Dokumen ini menjadi sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini akan menginformasikan capaian kinerja tahun 2024 atas pelaksanaan sasaran program dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2024 adalah untuk mengomunikasikan pencapaian sasaran program pada Tahun 2024 kepada *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.

C. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, kedudukan Ditjen PDSPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam kedudukannya, Ditjen PDSPKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan

dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

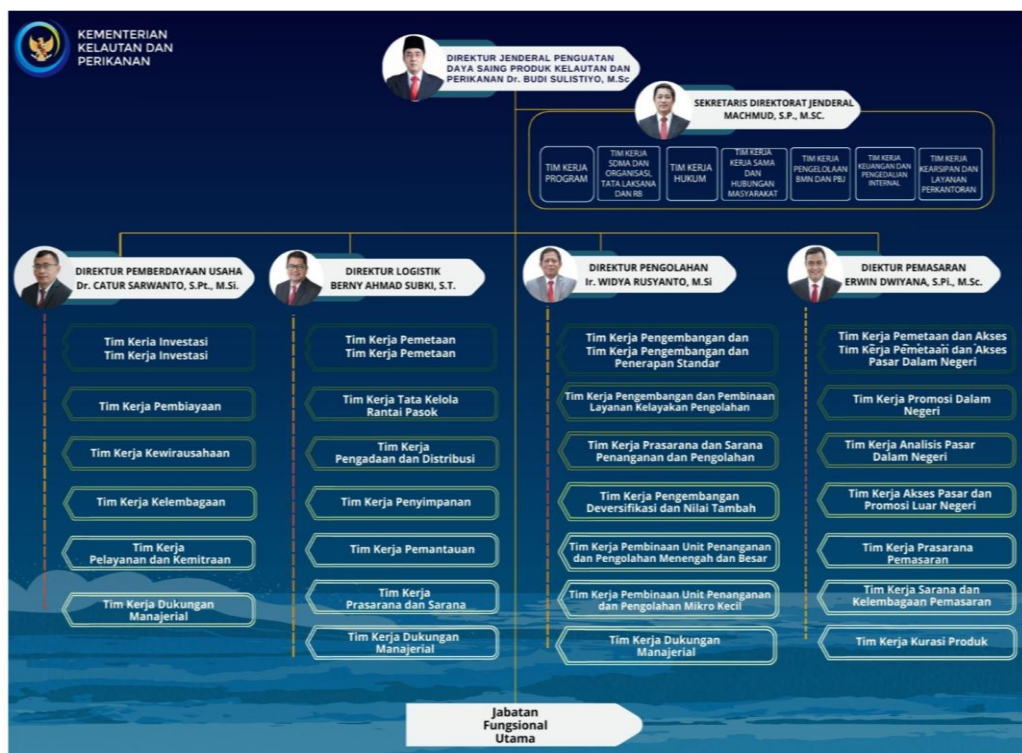
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen PDSPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Ditjen PDSPKP dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Pemberdayaan Usaha;
3. Direktorat Logistik;
4. Direktorat Pengolahan;
5. Direktorat Pemasaran.



Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen PDSPKP

Ditjen PDSPKP memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 68/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan, BBP3KP mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran, pengujian dan sertifikasi produk, serta pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan.

Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

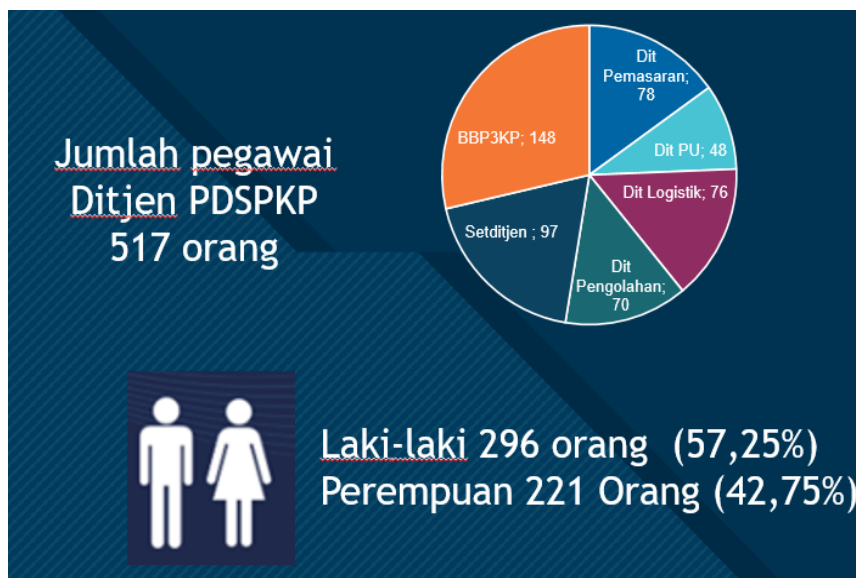
1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganekaragaman produk kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan sertifikasi produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tanda kesesuaian produk kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
7. Pelaksanaan bimbingan teknis hasil uji terap, pengujian, dan sertifikasi produk kelautan dan perikanan; dan
8. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.



Gambar 2. Struktur Organisasi BBP3KP

D. Keragaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah pegawai Ditjen PDSPKP Tahun 2024 mencapai 518 orang yang terdiri dari 297 pegawai Laki-laki dan 221 pegawai perempuan, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 3. Keragaan SDMA Ditjen PDSPKP Tahun 2024

E. Permasalahan Utama

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi terbagi dalam enam kelompok besar, yaitu tantangan peningkatan investasi dan pengembangan usaha, permasalahan efisiensi biaya logistik hasil kelautan dan perikanan, tantangan peningkatan ekspor ikan, ancaman stunting, permasalahan peningkatan kapasitas usaha dan mutu produk olahan perikanan skala usaha mikro kecil, dan permasalahan peningkatan usaha pengolahan skala menengah besar yang berkelanjutan. Tantangan peningkatan investasi dan pengembangan usaha umumnya terkait akses pembiayaan yang terbatas, kapasitas kelembagaan yang masih rendah dan cenderung lambat, infrastruktur perikanan yang belum memadai dan tidak merata di setiap wilayah. Kesulitan akses pembiayaan terutama terjadi pada pelaku usaha mikro kecil kelautan dan perikanan, karena belum bankable dalam skema pembiayaan dan kelayakan usaha. Di sisi lain, perbankan dan lembaga pemberi kredit minim informasi tentang calon debitur potensial. Beberapa pelaku usaha masih mengalami hambatan Pemberdayaan Usaha terutama terkait perizinan, pajak, dan tumpang tindih regulasi. Namun bagi investor besar, tantangan yang dihadapi adalah minimnya informasi peluang Pemberdayaan Usaha kelautan dan perikanan yang salah satunya karena ketersediaan profil investasi yang *ready to offer* serta promosi Pemberdayaan Usaha yang belum berjalan optimal.

Pada tahap implementasi investasi, pelaku investasi kelautan dan perikanan sering terkendala tarif bea masuk barang modal (izin/pajak) yang masih tinggi, sementara insentif investasi yang diberikan belum berjalan optimal. Penyederhanaan birokrasi investasi melalui perizinan online yang dikembangkan Ditjen PDSPKP dan sistem perpajakan yang lebih baik, diharapkan dapat

memberi solusi. Untuk permasalahan efisiensi biaya logistik hasil kelautan dan perikanan, masih terkait tata kelola dan koordinasi logistik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan swasta yang belum optimal, sarana dan prasarana logistik yang belum memadai, serta pengelolaan kelembagaan logistik yang belum optimal. Kondisi tersebut menyebabkan biaya logistik yang sangat tinggi di Indonesia, yaitu mencapai 27% terhadap PDB, di mana aktivitas logistik hasil kelautan dan perikanan menjadi salah satu penyumbang utamanya. Bank Dunia (2018) menyatakan kinerja logistik Indonesia berada pada ranking timeline 41 dengan skor 3,67. Kinerja tersebut jauh di bawah Singapura (ranking 6, skor 4,32) dan tiga negara ASEAN lainnya (Thailand, Vietnam, dan Malaysia).

Di sisi sarana dan prasarana logistik, ketersediaan *cold storage*, pabrik es, dan gudang kering yang digunakan untuk penyimpanan produk kelautan dan perikanan belum merata di koridor logistik ikan, serta kapasitasnya juga masih terbatas. Sarana transportasi seperti mobil berpendingin dan mobil angkut ikan hidup jumlahnya juga sangat sedikit. Dari sisi rantai suplai, konektivitas dan informasi logistik yang ada masih bersifat asimetris, dimana aliran informasi ketersediaan ikan dari sentra produksi ke sentra distribusi/pemasaran yang membutuhkan ikan sering tersendat, tidak lengkap, dan lambat. Hal ini perlu dipecahkan dengan mengembangkan Sistem Telusur Logistik Ikan (STELINA) yang lebih baik dan implementasinya dapat berimprovisasi dengan *IoT system*.

Untuk ekspor hasil kelautan dan perikanan, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang sedang dihadapi terkait dalam pencapaian target ekspor, yaitu:

1. Kapasitas pasokan produksi dan pemenuhan kualitas bahan baku untuk ekspor belum maksimal;
2. Belum kompetitifnya produk perikanan di pasar utama dunia (rendahnya market share);
3. Diversifikasi pasar dan produk ekspor belum optimal, hambatan ekspor di negara tujuan baik tarif maupun non tarif (SPS dan TBT);
4. Adanya hambatan registrasi dan penambahan eksportir terdaftar di negara tujuan ekspor antara lain Uni Eropa, Rusia, RRT, Arab Saudi, dan Brazil;
5. Rendahnya utilitas UPI untuk tujuan ekspor.

Ancaman stunting (gizi buruk) merupakan masalah yang erat kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Stunting timbul salah satunya karena terbatasnya aksesibilitas masyarakat terhadap ikan, terutama di wilayah pedalaman dan aksesnya jauh ke pesisir, harga ikan yang cenderung fluktuatif dipengaruhi oleh musim, dan rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya ikan untuk asupan protein dan gizi. Akibatnya, sering tidak peduli dalam pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari. Di samping itu, mutu ikan yang dijual di pasar-pasar yang jauh dari pesisir terutama yang pengelolaannya tradisional umumnya kurang baik, sehingga minat beli masyarakat turun. Beberapa wilayah juga belum menjadikan ikan sebagai sumber utama protein bagi keluarganya. Pemenuhannya diperoleh dari sumber nabati yang konsumsinya juga terbatas. Dalam hal pengembangan usaha skala mikro kecil, kapasitas produksi dan mutu produk olahan perikanan yang dihasilkannya masih rendah, sedangkan menjadi pelaku utama dalam penyediaan produk ikan di Indonesia termasuk ke pasar-pasar pedalaman. Akibatnya banyak dari mereka yang belum memenuhi standar kelayakan pengolahan.

Hingga saat ini, jumlah usaha mikro kecil kelautan dan perikanan yang telah memiliki Sertifikasi Kelayakan Pengolahan masih di bawah 1,00%.

Penyebab utama dari rendahnya kapasitas usaha dan mutu produk olahan perikanan skala usaha mikro kecil di Indonesia diantaranya pengetahuan para pelaku usaha mikro kecil tentang standar mutu yang masih rendah, penyebaran usaha yang luas dan terfragmentasi, belum melaksanakan prinsip-prinsip usaha secara profesional, serta klasterisasi usaha skala mikro kecil yang belum berjalan baik. Akibatnya, pelaku usaha mikro kecil kelautan dan perikanan sering berjalan sendiri tanpa terdeteksi dan mengembangkan usaha dan mutu produk dengan kemampuan terbatas yang dimiliki. Permasalahan teknologi, modal, informasi dan akses pasar, serta perizinan juga banyak dihadapi pelaku usaha mikro kecil kelautan dan perikanan di hampir semua wilayah. Dalam hal pengembangan pasar, pelaku aktif sangat potensial untuk menghasilkan produk UKM kapasitas ekspor namun masih minim pembinaan.

Keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan dan Sistem Rantai Dingin (SRD) serta minimnya pengetahuan pelaku UMKM terkait standar teknis mutu produk kelautan dan perikanan (GMP, SSOP, HACCP, traceability) menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan produk ekspor UMKM kelautan dan perikanan.

Usaha pengolahan skala menengah besar juga memiliki permasalahan yang tidak kalah kompleks. Dalam hal peningkatan kapasitas usaha, pelaku usaha pengolahan skala menengah besar masih dihadapkan dengan permasalahan utilitas rendah, kompetisi pemenuhan bahan baku, fasilitas infrastruktur penunjang produksi yang terintegrasi, dan revitalisasi Sistem Rantai Dingin (SRD) yang

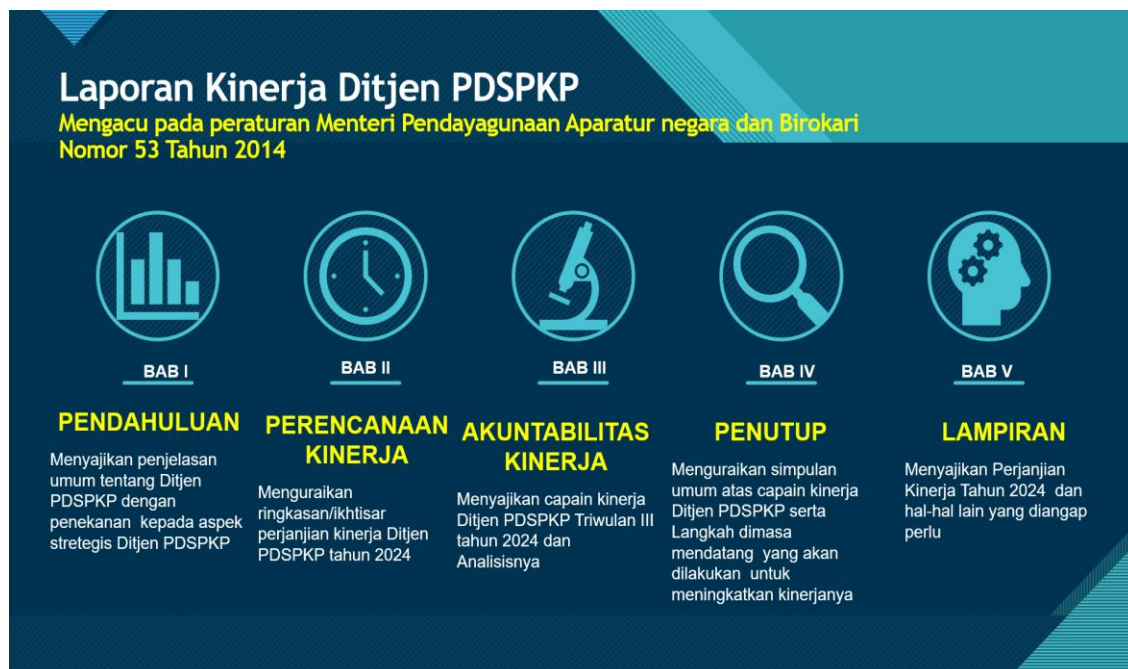
belum optimal. Akibatnya sering kesulitan dalam memenuhi permintaan pasar berskala besar, terutama yang sifatnya kontinyu. Persaingan bahan baku meningkat pada musim paceklik, sementara di saat banyak ikan tidak bisa menyetok karena tidak memiliki infrastruktur rantai dingin. Hal ini terus berulang setiap tahunnya, dan beberapa yang tidak kuat bersaing terpaksa menutup usahanya.

Dari sisi pengembangan mutu, usaha pengolahan skala menengah besar banyak yang belum sepenuhnya mengolah ikan tersertifikasi, belum terfasilitasi penerbitan standar teknis mutu (GMP, SSOP, HACCP, Traceability), dan belum memiliki sertifikat lingkungan. Permasalahan ini menjadi penghambat beberapa usaha pengolahan skala menengah besar dalam memanfaatkan peluang ekspor produk kelautan dan perikanan. Hal tersebut perlu dijadikan fokus dalam upaya penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan ke depan, sehingga mendukung peningkatan ekspor dan konsumsi ikan dalam negeri. Introduksi konsep-konsep Revolusi Industri 4.0 seperti digitalisasi usaha, perizinan online, lelang online, dan block chain dalam penelusuran bahan baku/logistik ikan perlu dilakukan. Perizinan online perlu terus disempurnakan dalam rangka fasilitasi kemudahan berusaha.

F. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Ditjen PDSPKP pada Tahun 2024. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Tahun

2024 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.



Gambar 4. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2024

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam rangka memberikan pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peran Ditjen PDSPKP serta gambaran kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen PDSPKP, maka dirumuskan visi Ditjen PDSPKP sebagai berikut.

VISI

“Mewujudkan Pengelolaan Perikanan dan Kelautan yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri”

Sejalan dengan visi tersebut, telah dirumuskan misi Ditjen PDSPKP berupa upaya-upaya yang akan ditempuh sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PDSPKP sebagai berikut.

MISI

Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui Peningkatan Mutu, Daya Saing dan Penguatan Sistem Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan;

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya lingkup Ditjen PDSPKP.

Tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan antara lain:

1. Meningkatkan investasi dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan, yaitu dengan berbagai upaya untuk :
 - Meningkatkan nilai investasi pada usaha kelautan dan perikanan baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dan *joint venture*, yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kemitraan investasi, jumlah fasilitasi perizinan, ketertarikan terhadap promosi investasi, dan pemanfaatan paket investasi yang disediakan pemerintah;
 - Mengembangkan usaha hasil kelautan dan perikanan melalui pembiayaan lembaga keuangan bank dan bukan bank. Hal ini yang ditunjukkan dengan meningkatnya pelayanan pembiayaan usaha, berkembangnya kemitraan inti plasma dan sejenisnya, meningkatnya penjangkauan akses debitur, pendampingan akses permodalan, pengembangan skema pembiayaan digital (fintech), tumbuhnya wirausaha baru, magang calon wirausaha, serta penguatan inkubator bisnis.
2. Memperkuat dan mewujudkan efisiensi kinerja logistik hasil kelautan dan perikanan, yaitu upaya pengembangan aktivitas logistik yang memiliki jaringan/konektivitas yang kuat di pusat produksi, pusat pengumpulan produk, pusat distribusi, dan pasar produk. Hal tersebut ditunjukkan dengan menguatnya struktur ekonomi pelaku logistik produk kelautan dan perikanan, kebutuhan dan ketersediaan produk yang lebih terjamin, sarana penyimpanan dan buffer stock hasil kelautan dan perikanan yang berfungsi baik, sistem distribusi dan jasa logistik yang berjalan baik, tata niaga dan pengelolaan koridor logistik yang lebih baik;

3. Memperkuat dan mengembangkan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam dan luar negeri, merupakan upaya untuk:
 - Meningkatkan konsumsi ikan dan penanganan stunting, yang ditunjukkan dengan meningkatnya aktivitas transaksi di pasar ikan modern, pasar ikan bersih, pasar ikan lokal, dan sentra kuliner, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan dan bazar produk perikanan, menyebarnya peta preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri, meningkatnya pemanfaatan alat dan sarana pemasaran ikan yang diberikan oleh pemerintah, berkurangnya penyakit akibat gizi buruk dan protein kurang, dan terjadinya penguatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai sarana;
 - Meningkatkan ekspor hasil perikanan, yang ditunjukkan dengan berkembangnya jaringan perdagangan internasional hasil perikanan baik secara bilateral, regional maupun multilateral, dan meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan;
4. Meningkatkan produk kelautan dan perikanan yang bermutu dan bernilai tambah, yaitu berbagai upaya untuk:
 - Meningkatkan kapasitas produksi dan penerapan standar mutu baik pada UPI skala menengah besar maupun UPI skala mikro kecil, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku UPI, meningkatnya utilitas UPI, meningkatnya pengurusan sertifikat dan standar mutu pada UPI, dan berkembangnya aktivitas fasilitasi sarana prasarana pengolahan ikan;
 - Meningkatkan pengusahaan produk bernilai tambah, yang ditunjukkan dengan berkembangnya UPI bernilai tambah menuju *zero waste*, berkembangnya UPI yang menggunakan

teknologi pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta meningkatnya produk-produk inovasi yang bernilai tambah;

- Menambah kepedulian terhadap kelayakan pengolahan di UPI, yang ditunjukkan dengan dirumuskannya standar kelayakan pengolahan hasil perikanan, penerbitan SNI produk kelautan dan perikanan, dan pengurusan SKP secara *online*.

5. Mengembangkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, yaitu upaya untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang efektif, bersih dan terpercaya yang ditunjukkan dengan dukungan manajemen yang handal dan terpercaya di lingkungan Ditjen PDSPKP, dukungan sarana dan prasarana internal yang mumpuni, layanan perkantoran yang cepat dan bersih.

Arahan kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan pada 4 (empat) bidang tersebut dijelaskan:

1. Meningkatkan investasi dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan (bidang Pemberdayaan Usaha). Untuk mencapai tujuan ini, maka kebijakan dapat diarahkan pada:
 - Kebijakan PDSPKP-1 : Peningkatan investasi kelautan dan perikanan;
 - Kebijakan PDSPKP-2: Pengembangan usaha kelautan dan perikanan.
2. Memperkuat dan mewujudkan efisiensi kinerja logistik hasil Kelautan dan perikanan (bidang logistik). Arahan kebijakannya adalah:

- Kebijakan PDSPKP-3 : Pengembangan sistem logistik ikan dalam rangka konektivitas dari pusat produksi, pusat pengumpulan ke pusat distribusi/pasar (koridor);
3. Meningkatkan ekspor hasil perikanan (bidang pemasaran). Untuk mencapai tujuan ini, maka kebijakan dapat diarahkan pada:
- Kebijakan PDSPKP-4 : Fasilitasi dan keikutsertaan Indonesia dalam forum dialog/persidangan skala internasional dan promosi terkait dengan produk perikanan Indonesia di pasar internasional;
4. Meningkatkan konsumsi ikan dan penanganan stunting (bidang pemasaran). Arah kebijakan adalah:
- Kebijakan PDSPKP-5 : Fasilitasi dan pemberian bantuan pemerintah dan pembinaan kepada pemerintah daerah, masyarakat, kelompok usaha dalam rangka peningkatan konsumsi makan ikan dan pengurangan stunting dalam masyarakat;
5. Meningkatkan produk kelautan dan perikanan yang bermutu dan bernilai tambah (bidang Pengolahan). Untuk mencapai tujuan ini, maka kebijakan dapat diarahkan pada:
- Kebijakan PDSPKP-6 : Peningkatan kapasitas produksi dan penerapan standar mutu pada UPI skala menengah besar;
 - Kebijakan PDSPKP-7 : Peningkatan kapasitas produksi dan penerapan standar mutu pada UPI skala mikro kecil;
 - Kebijakan PDSPKP-8 : Pengembangan produk kelautan dan perikanan bernilai tambah;
 - Kebijakan PDSPKP-9 : Penerapan standar kelayakan pengolahan di Unit Pengolahan Ikan (UPI).

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai upaya perbaikan perencanaan, Ditjen PDSPKP melakukan reviu terhadap Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pada tahun 2023, masukan dari Sekretariat Jenderal KKP, serta rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KKP.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2024

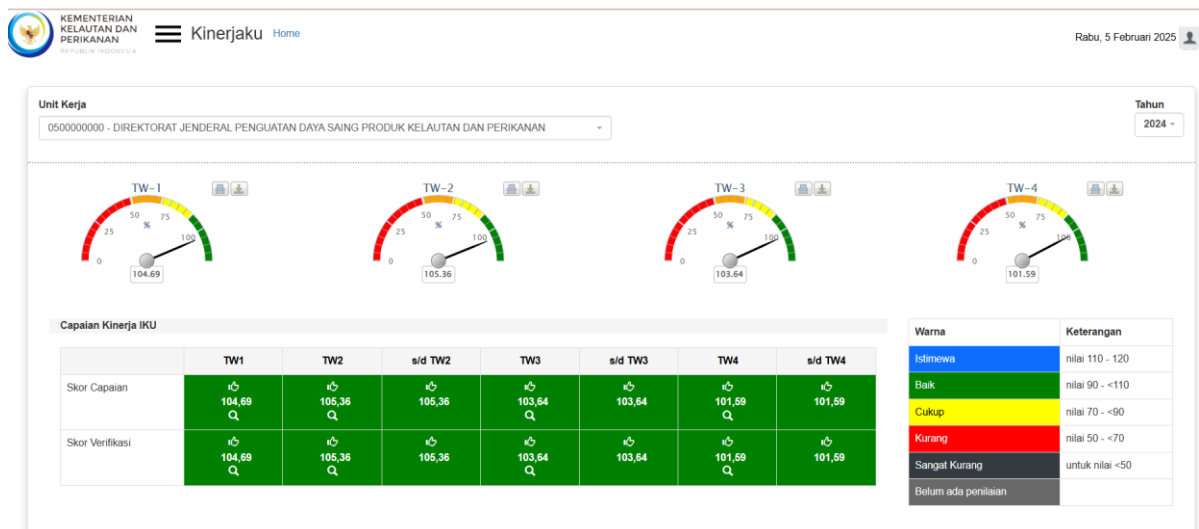
SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	1.	Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing (Juta Ton)	7,50
2	Ekonomi Subsektor Pengolahan dan Pemasaran Produk KP Meningkat	2.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	7,20
		3.	Konsumsi Ikan (setara utuh segar) (kg/kapita)	59,00
3	Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan	4.	Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	9,00
		5.	Kinerja Logistik Hasil Perikanan (Indeks)	71,90
		6.	Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (Rp. Triliun)	10,26
		7.	Nilai PNPB Ditjen PDSPKP (Rp. Miliar)	7,62
		8.	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (Orang)	66.000
4	Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan meningkat	9.	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (Indeks)	104,75
5	Terkelolanya Pemerintahan yang Baik Mendukung Penguatan Daya Saing KP	10.	Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Ditjen PDSPKP (Unit)	2,00
		11.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP (Nilai)	3,30

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
		12.	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP (Indeks)	87,00
		13.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PDSPKP (Nilai)	84,00
		14.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen PDSPKP (%)	≤0,50
		15.	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PDSPKP (%)	80,00
		16.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PDSPKP (Nilai)	76,00
		17.	Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94,00
		18.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PDSPKP (Nilai)	93,76
		19.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Ditjen PDSPKP (Nilai)	81,00
		20.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Ditjen PDSPKP (%)	80,00
		21.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Ditjen PDSPKP (%)	80,00
		22.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Ditjen PDSPKP (%)	80,00
		23.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen PDSPKP (%)	91,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja tahun 2024 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Ditjen PDSPKP dari Januari sampai dengan Desember 2024. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara terukur keseluruhan yang bisa diperoleh dari Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). NKO Ditjen PDSPKP Tahun 2024 adalah sebesar 101,59. Capaian NKO pada tahun 2024 sebagaimana terdapat pada Gambar 5.



Gambar 5. NKO Ditjen PDSPKP Tahun 2024

Target Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP pada Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Ditjen PDSPKP Periode Tahun 2024

Indikator Kinerja		Target		Realisasi TW IV 2024	Persentase terhadap Target (%)	
		Tahun 2024	TW IV 2024		Tahun 2024	TW IV 2024
1	Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing (Juta Ton)	7,50	7,50	7,70**	102,70%	102,70%
2	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	7,20	7,20	5,95*	82,64%	82,64%
3	Konsumsi Ikan (setara utuh segar) (kg/kapita)	59,00	59,00	58,90**	99,83%	99,83%
4	Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	9,00	9,00	10,50**	116,67%	116,67%
5	Kinerja Logistik Hasil Perikanan (Indeks)	71,90	71,90	73,45	102,16%	102,16%
6	Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (Rp. Triliun)	10,26	10,26	7,77	75,73%	75,73%
7	Nilai PNBPDitjen PDSPKP (Rp. Miliar)	7,62	7,62	9,35	122,70%	122,70%
8	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (Orang)	66.000	66.000	66,045	100,07%	100,07%
9	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (Indeks)	104,75	104,75	104, 94	100,18%	100,18%
10	Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari	2,00	2,00	2,00	100,00%	100,00%

Indikator Kinerja		Target		Realisasi TW IV 2024	Persentase terhadap Target (%)	
		Tahun 2024	TW IV 2024		Tahun 2024	TW IV 2024
	Korupsi Ditjen PDSPKP (Unit)					
11	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP (Nilai)	3,30	3,30	4,07	123,33%	123,33%
12	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP (Indeks)	87,00	87,00	89,12	102,44%	102,44%
13	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PDSPKP (Nilai)	84,00	84,00	86,69	103,20%	103,20%
14	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen PDSPKP (%)	≤0,50	≤0,50	0,29	172,41%	172,41%
15	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PDSPKP (%)	80,00	80,00	97,41	121,76%	121,76%
16	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PDSPKP (Nilai)	76,00	76,00	85.26	112.18%	112.18%
17	Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94,00	94,00	133,33	141,84%	141,84%

Indikator Kinerja		Target		Realisasi TW IV 2024	Persentase terhadap Target (%)	
		Tahun 2024	TW IV 2024		Tahun 2024	TW IV 2024
18	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PDSPKP (Nilai)	93,76	93,76	91,86	97,97	97,97
19	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) PDSPKP (Nilai)	81,00	81,00	82,38	101,70	101,70
20	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Ditjen PDSPKP (%)	80,00	80,00	85,19	106,49%	106,49%
21	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Ditjen PDSPKP (%)	80,00	80,00	92,44	115,55%	115,55%
22	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Ditjen PDSPKP (%)	80,00	80,00	87,50	109,38%	109,38%
23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen PDSPKP (%)	91,00	91,00	100,00	109,89%	109,89%

*angka sementara

**angka prognosa

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja menjelaskan realisasi indikator kinerja, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja Ditjen PDSPKP. Analisis untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Program 1. Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing

1. Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing

Pengolahan ikan memiliki dua peran dalam produksi perikanan, pertama untuk menyerap produksi perikanan dan kedua meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan. Industri perikanan yang berdaya saing tinggi dapat dicirikan dengan terintegrasikannya kegiatan produksi perikanan, baik dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dengan usaha pengolahan hasil perikanan. Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 119 Tahun 2021 tentang Data Induk Produk Kelautan dan Perikanan, Jenis Kegiatan Pengolahan dibagi menjadi 13 yaitu: (1) Pendinginan/pengesan ikan, (2) Pembekuan ikan, (3) Penggaraman /Pengeringan ikan, (4) Pemindangan ikan, (5) Pengasapan/Pemanggang ikan, (6) Peragian/fermentasi ikan, (7) Pengalengan ikan, (8) Pengolahan berbasis lumatan daging ikan/jelly ikan atau surimi, (9) Pengolahan kerupuk ikan, kripik, peyek ikan, (10) Pembuatan minyak ikan, (11) Pengolahan rumput laut, (12) Pengolahan lainnya, (13) Penanganan ikan.

Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2024* (7)	Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN (8)
Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya	2024	7,50	7,70*	102,67%	7,50	7,70	102,67%
	2023	7,35	7,38	100,41%			
	2022	7,20	7,20	100,00%			
	2021	7,05	7,15	101,42%			

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2024* (7)	Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN (8)
Saing (Juta Ton)	2020	6,90	6,90	100.00%			

Keterangan :

* : Angka Prognosa

Sumber Data: Ditjen PDSPKP

Perhitungan Volume Produk Olahan Tahun 2024 dilakukan melalui pendataan dan perhitungan utilitas dan volume produk olahan setara utuh segar Unit Pengolahan Ikan (UPI) dengan nilai capaian 7,70 juta ton (prognosa). Capaian tersebut setara dengan 102,67% dari target tahun 2024 dan target RPJMN sebesar 7,50 juta ton. Jika dibandingkan realisasi dan capaian pada tahun 2023 sebesar 7,38 juta ton dan capaian 100,41% dari target 7,35 juta ton, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,30%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar 2,30%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2022 sebesar 7,20 juta ton dan capaian 100% dari target 7,20 juta ton, maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 6,90%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan 2,70%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2021 sebesar 7,15 juta ton dan capaian 101,42% dari target 7,05 juta ton, maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 15,06% sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan 1,23%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2020 sebesar 6,90 juta ton dan capaian 100% dari target 6,90 juta ton, maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 11,59% sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan 2,67%.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- a. Melaksanakan penyusunan RSNI Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang merupakan rekomendasi kebijakan dalam bentuk rancangan standar yang dirumuskan dan disusun oleh Komite Teknis (Komtek) sesuai dengan ruang lingkup dalam International Classification for Standards (ICS). Komtek tersebut dibentuk oleh Instansi Teknis Pengampu yang dalam hal ini dapat berasal dari K/L atau organisasi masyarakat. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan pembahasan 9 RSNI Produk Perikanan yaitu (1) Ikan renyah, (2) Bandeng duri lunak, (3) Ikan asap dengan pengasapan dingin, (4) Kerupuk ikan, udang, dan moluska, (5) Bandeng isi, (6) Kukis ikan, (7) Cara uji fisika – Bagian 8 penentuan berat bersih dan bobot tuntas produk perikanan sterilisasi komersial, (8) Cara uji kimia: penentuan kadar timah (Sn) pada produk perikanan dengan Hydride – Spektroskopi atom (HG-AAS), (9) Hidrolisat Protein Ikan. Dan 6 RSNI Produk Perikanan Non Pangan yaitu (1) Ikan hias mas koki (*Carassius auratus*) – Syarat mutu dan penanganan, (2) Tanaman hias air mikrosorum (*Micosorum pteropus*) – Syarat mutu dan penanganan, (3) Ikan hias rainbow (*Melanotaenia spp*) - syarat mutu dan penanganan, (4) Ikan hias guppy (*Poecilia spp*) - Syarat mutu dan penanganan (5) Ikan hias cardinal - Syarat mutu dan penanganan dan (6) Spirulina spp kering – syarat mutu dan pengolahan.

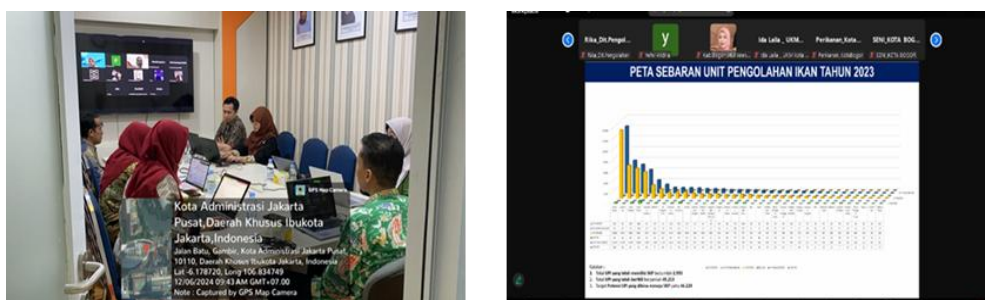
Selain itu dilakukan juga Rapat Teknis RSNI pada 10 Produk Perikanan antara lain yaitu (1) Ikan renyah, (2) Bandeng duri lunak, (3) Ikan asap dengan pengasapan dingin, (4) Kerupuk ikan, udang dan moluska, (5) Bandeng isi, (6) Kukis ikan, (7) Pegemasan ikan segar atau ikan hidup maupun yang sejenisnya

dan metode pengemasannya melalui sarana transportasi udara, (8) Cara uji fisika - Bagian 8 Penentuan berat bersih dan bobot tuntas produk perikanan sterilisasi komersial, (9) Cara uji kimia: penentuan kadar timah (Sn) pada produk perikanan dengan Hydride - spektroskopi serapan atom (HG-AAS), (10) Hidrolisat Protein Ikan.



Gambar 6. Rapat Konsensus RSNI3 Produk Perikanan

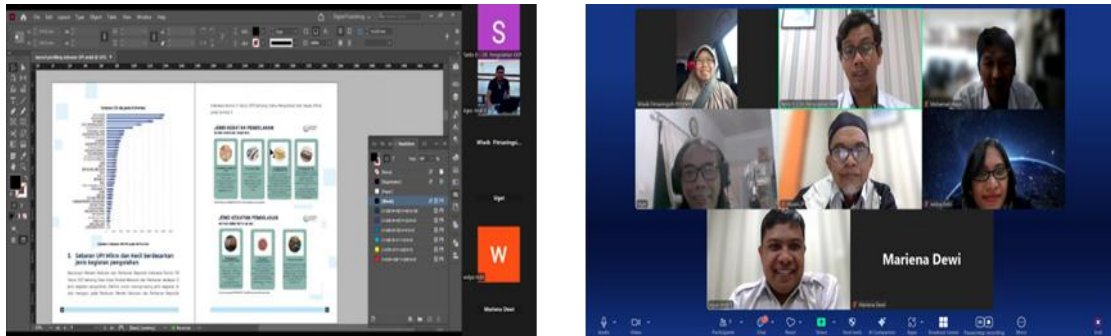
- b. Melaksanakan kegiatan Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Produk Yang Mendapatkan Pembinaan Penerapan Kelayakan Pengolahan melalui Koordinasi Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Pada periode jumlah sertifikat yang diterbitkan sebanyak 7.513 sertifikat sehingga sampai dengan periode jumlah total SKP yang telah diterbitkan sebanyak 10.000 sertifikat.



Gambar 7. Rapat Terkait Penerbitan SKP

- c. Melaksanakan Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan melalui beberapa kegiatan antara lain rapat penyusunan Profiling Sebaran Usaha Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil

Tahun 2024, dan Rapat Buku Profiling Sebaran Usaha Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Tahun 2024.



Gambar 8. Keikutsertaan Pada Kegiatan valnas VPO Semester I Tahun 2024

- d. Pembangunan unit pengolahan ikan (UPI) bernilai tambah menggunakan bioteknologi untuk menghasilkan Hidrolisat Protein Ikan (HPI) di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain, tindak lanjut rekomendasi Itjen terkait Uji Substansi Pelaksanaan PBJ Tahun 2024, monitoring progres pengadaan mesin UPI NT HPI, *show case meeting* pembangunan UPI NT HPI.



Gambar 9. Penandatanganan Kontrak Konstruksi UPI Bernilai Tambah

- e. Melaksanakan pembinaan unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil terkait kelayakan dasar pengolahan bagi UPI Skala Mikro dan Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terkait pentingnya jaminan mutu dan keamanan pangan bagi masyarakat dan

pelaku usaha bidang perikanan. Sampai dengan tahun 2024 telah tercapai 1.800 UMKM yang dibina di lokasi Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur.



Gambar 10. Pembinaan Penerapan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan di Kota Ternate

- f. Melaksanakan Pembinaan UPI skala menengah besar sebagai upaya mewujudkan produk perikanan Indonesia yang dapat bersaing di pasar regional maupun global maka dilakukan kegiatan pembinaan bagi Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan dalam peningkatan kinerjanya. Pada tahun 2024 telah tercapai 500 Industri yang telah dilakukan pembinaan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan, yaitu melaksanakan Asistensi Perbaikan Peringkat PROPER yang bertujuan untuk memfasilitasi UPI yang mendapatkan peringkat PROPER merah untuk memperbaiki kinerja pengelolaan lingkungannya, melaksanakan seminar catfish day yang bertujuan untuk membahas serta mencari alternatif Solusi dalam hilirisasi komoditas catfish, dan pembahasan kajian / *policy brief* hilirisasi Tuna yang bertujuan untuk membahas serta mencari alternatif solusi dalam hilirisasi tuna.



Gambar 11. Seminar *Catfish Day*

- g. Melaksanakan Pembinaan Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro dan Kecil dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk untuk membina pelaku usaha agar bisa menghasilkan ragam produk perikanan yang bermutu, berkualitas dan berdaya saing. Selain itu juga dilaksanakan, *workshop* pengembangan diversifikasi dan nilai tambah produk perikanan, kampanye protein ikan melalui makan bergizi gratis menu ikan yang dilaksanakan di 4 lokasi SDN di daerah Jakarta Pusat dan di pondok pesantren Assalafie, Cirebon, sosialisasi fortifikasi HPI Pada Produk Olahan Pangan, dan sosialisasi mutu dan nilai tambah produk perikanan di 4 lokasi yaitu di Kota Serang, Kota Palopo, Kabupaten Aceh Timur, Kota Bandar Lampung pada periode Oktober – Desember 2024. Sampai dengan 2024 telah tercapai 875 UMKM yang dibina.



Gambar 12. Kegiatan Mendukung kampanye protein ikan

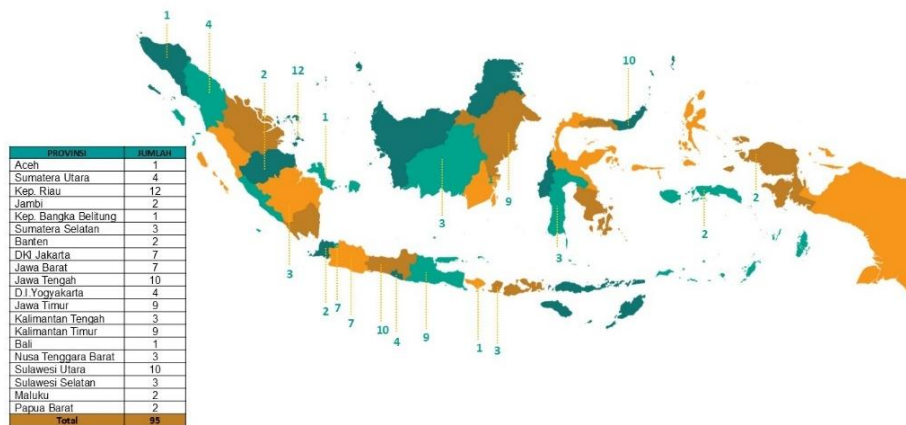
- h. Melaksanakan Penyiapan Bahan RSNI hasil Kelautan dan perikanan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: Identifikasi dan pengumpulan data untuk penyusunan

bahan RSNI (1) Tuna Loin Beku PT. Indojoy Fortuna, (2) Kerupuk Ikan Udang dan Molusca di UKM Cihil Mandiri Sejahtera, (3) Kerupuk Ikan Udang dan Molusca siap makan UKM Candra Jaya Snack, UKM Dapur Ma'is, dan UKM Moher, (4) Pempek UKM Dapoer Cheesya, (5) Makanan Ringan Berbasis Ikan UKM Katon Roso dan UKM Galipat, (6) Pempek di UKM Pempek Sentosa dan UKM Pempek Rizkyanti, (7) Kerupuk ikan udang dan moluska siap makan UKM Pawon Koe Mevrouw; rapat pembahasan usulan bahan RSNI TA 2025 produk kelautan dan perikanan, dan rapat pembahasan bahan RSNI0 usulan TA 2025 produk kelautan dan perikanan.



Gambar 13. Identifikasi dan pengumpulan data untuk penyusunan bahan RSNI

- i. Melaksanakan layanan sertifikasi SNI dan pengujian produk kelautan dan perikanan sebagai upaya penjaminan mutu serta peningkatan daya saing produk olahan. Sampai dengan tahun 2024, capaian kegiatan jumlah produk kelautan dan perikanan yang disertifikasi dan diuji sebanyak 865 produk dari target 750 produk, dengan rincian 95 produk yang disertifikasi dan 770 produk yang diuji.



Gambar 14. Peta Sebaran Lokasi Produk Kelautan dan Perikanan yang Disertifikasi Tahun 2024

- j. Diseminasi diversifikasi produk kelautan dan perikanan telah dilakukan melalui dua kegiatan: (a) penyusunan media informasi diversifikasi produk kelautan dan perikanan berupa penyusunan konten media sosial selama tahun 2024 tercatat sebanyak 262 (dua ratus enam puluh dua) konten, penyusunan desain leaflet 4 (empat) judul: 1) Leaflet Pelayanan Penggunaan Peralatan Pengolahan, 2) Leaflet Bimbingan Teknis Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan, 3) Leaflet Fasilitasi Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan, dan 4) Leaflet Aneka Olahan Tuna, Booklet 3 (tiga) judul: 1) Booklet Serba-serbi Tuna, 2) Booklet Hidrolisat Protein Ikan (HPI), dan 3) Booklet Spesifikasi Desain Miniplant Tuna Loin, Panel 6 (enam) judul: 1) Panel Penggunaan Peralatan Pengolahan, 2) Panel Bimbingan Teknis Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan, 3) Panel Penerapan Pengembangan Produk Perikanan Bernilai Tambah, 4) Panel Ragam Produk Olahan Tuna, 5) Panel Mobil Alih Teknologi Informasi, dan 6) Panel Mini Plant Tuna Loin, Banner 1 (satu) judul: Banner Hidrolisat Protein Ikan (HPI), serta Kalender (1 Judul): kalender

2025. (b) Penyebarluasan informasi. Penyebarluasan informasi sampai dengan dilakukan pada 24 event diseminasi diversifikasi produk kelautan dan perikanan yang tersebar di Bekasi, Jakarta, Cibubur, Cibinong, Bogor, Tulungagung, Depok, Cirebon, Yogyakarta, Surabaya dan Semarang dengan total penerima informasi yaitu 1.018 orang;



Gambar 15. Kegiatan Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan

- k. Melaksanakan Pengembangan Usaha Produk Kelautan dan Perikanan dalam Inkubasi Bisnis Invapro KP yang meliputi: (1) pelatihan analisa usaha bagi tenant inkubasi bisnis invapro KP khususnya HPP (Harga Pokok Produksi) dan BEP (Break Even Point), (2) monitoring inkubasi bisnis inovasi produk kelautan dan perikanan UMKM Andini Pastel, tenant A2S, UMKM Aroma Food, UMKM Hokky Top, UMKM Suole, UMKM La NINA, UMKM Daniel Home Industri, UMKM Cahaya Jaya, UMKM Enak Suka, UMKM Melati Bahari, Poklahsar Srikandi Morojaya, Kasem dan Alkish Food, PT. Sedap Bakat, UMKM Hanafa, Poklahsar Shanaya, UMKM Papa Opanz, Kedai Pempek Bu Ota, UD. Ridhoillahi, UMKM Elyasmina, UMKM Karunia, UMKM Berkah Sayang dan Mina Sari Jaya (3) fasilitasi dan pendampingan legalitas SPP PIRT produk tuna asap rempah, pilus telur ikan, stik tulang ikan, sambal tabur rempah dan sambal tabur puri nasi UMKM Salt and Light, produk pastel mini abon ikan dan stik ikan tuna UMKM Bunda Azka, (4) monitoring dan evaluasi

terkait penerapan good manufacturing practice (GMP) dan SSOP kepada UMKM Makmur Jaya, (5) pendampingan pembuatan analisa usaha UD Arfini Family, Daniel Home Industri, (6) pendampingan/fasilitasi pembuatan (Desain) label kemasan produk abon ikan, bakso ikan dan nugget ikan UMKM Kaisar Arkana Desa Tial, dan (7) evaluasi tenant program inkubasi bisnis inovasi produk kelautan dan perikanan tahun 2024.



Gambar 16. Pelatihan Digital Marketing dan Monitoring evaluasi UMKM Inkubasi Bisnis Invapro KP

1. Fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil KP pada tahun 2024 telah dilaksanakan berupa (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan tahun 2024 dengan mengundang 45 UMKM penerap PPNT secara daring; (2) Monitoring dan evaluasi UMKM Nila Madang 3, UMKM Mina Harapan, UMKM Dewi Jaya, UMKM Sekar Blambangan; (3) Analisis data terkait hasil pengujian performa ragam produk dalam rangka penyampaian hasil pengujian produk kepada seluruh UMKM penerap PPNT di 20 Kab/kota di 8 Provinsi; (4) Melakukan koordinasi dengan penyedia kemasan terkait pembuatan kemasan yang akan diberikan kepada 6 UMKM terpilih; (5) Uji penerimaan pasar produk olahan penerap PPNT: a) Produk brownis krispi rumput laut (UMKM Juru Pawon Mphe, Sukabumi), b) minuman susu rumput laut (UMKM Glant Tech, Depok), c) produk pepes bandeng (UMKM Bojur), d) Abon Lembaran (Sumber Rejeki), e)

sambal belut (UMKM Dewi Jaya, Magelang), f) abon ikan tuna (Poklahsar Sekar Blambangan), g) sempol ikan (UMKM Mina Harapan), h) abon ikan (UMKM Mayang Nira), i) pempek (UMKM Bintang Mas), i) naget ikan (UMKM Nila Madang), dan (7) Pembahasan revidi T-1 petunjuk teknis fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan tahun 2025.



Gambar 17. Fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil KP

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Volume produk olahan kelautan dan perikanan sebesar Rp 29.075.450.000,- sampai dengan periode tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp 29.066.909,- atau setara dengan 99,97%, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 8.541.000,- Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 102,67%, lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,97%.

Sasaran Program 2. Ekonomi Subsektor Pengolahan dan Pemasaran Produk KP Meningkat

2. Nilai Ekspor Hasil Perikanan

Nilai ekspor hasil perikanan adalah jumlah komoditas produk perikanan, baik hidup, segar, dingin, maupun olahan yang dikategorikan dalam kode Harmonized System (HS) sebanyak 507 kode HS dalam 8 digit yang dijual ke luar negeri yang dikonversi

dalam bentuk uang (US Dollar). Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Nilai Ekspor Hasil Perikanan

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2024* (7)	Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN (8)
Nilai Ekspor Hasil Perikanan	2024*	7,20	5,95*	82,64%	7,20	5,95	82,64
	2023	6,77	5,63	83,16%			
	2022	7,13	6,24	87,52%			
	2021	6,05	5,72	94,55%			
	2020	5,30	5,20	98,11			

Keterangan: *Angka Sementara

Nilai ekspor hasil perikanan pada tahun 2024 mencapai USD 5,95 miliar (angka sementara). Capaian tersebut setara dengan 82,64% dari target tahun 2024 dan target RPJMN sebesar USD 7,20 miliar. Jika dibandingkan realisasi dan capaian pada tahun 2023 sebesar USD 5,63 miliar dan capaian 83,16% dari target USD 6,77 miliar, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,68%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar -0,63%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2022 sebesar USD 6,24 miliar dan capaian 87,52% dari target USD 7,13 miliar, maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar -4,65%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan -5,57%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2021 sebesar USD 5,72 miliar dan capaian 94,55% dari target USD 6,05 miliar, maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,02% sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan -12,59%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2020 sebesar USD 5,2 miliar dan capaian 98,11% dari target USD 5,3 miliar, maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 14,42% sedangkan capaiannya

mengalami pertumbuhan -15,77%. Jika dibandingkan nilai ekspor nasional, maka nilai ekspor hasil perikanan memiliki proporsi sebesar 2,25% dari total ekspor nasional sebesar USD 264,79 miliar.

Pada periode Januari-Desember 2024, negara tujuan ekspor utama, yaitu: Amerika Serikat (AS) dengan nilai USD 1,90 miliar (31,9% dari total nilai ekspor perikanan Indonesia), diikuti oleh Tiongkok USD 1,24 miliar (20,9%), ASEAN USD 854,22 juta (14,4%), Jepang USD 598,74 juta (10,1%), dan Uni Eropa USD 414,36 juta (7,0%). Beberapa negara tujuan ekspor yang berkontribusi besar terhadap meningkatnya ekspor Indonesia dibandingkan tahun sebelumnya antara lain:

- a. ASEAN (27,9%) dengan kontribusi terbesar pada komoditas cumi-sotong-gurita, tuna-cakalang, dan lobster. Peningkatan ekspor secara signifikan khususnya pada pasar Vietnam sebesar 62,4% dan Thailand 40,4%.
- b. Tiongkok (9,2%) dengan kontribusi terbesar pada komoditas antara lain layur-gulama, lobster, rajungan-kepiting, cumi-sotong-gurita, dan tuna-cakalang.
- c. Uni Eropa (23,6%) dengan komoditas yang mengalami peningkatan nilai ekspor antara lain tuna-cakalang, cumi-sotong-gurita, udang, dan rumput laut.

Tabel 5. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Komoditas Utama Tahun 2024

Negara Tujuan	Volume (Ribuan ton)			Nilai (USD Juta)		
	2023	2024*	YoY	2023	2024*	YoY
Amerika Serikat	217,73	217,66	0,0%	1.907,30	1.903,29	-0,2%
Tiongkok	438,65	518,30	18,2%	1.138,51	1.243,18	9,2%
ASEAN	210,09	285,65	36,0%	667,83	854,22	27,9%
Jepang	113,92	111,38	-2,2%	690,70	598,74	-13,3%
Uni Eropa	55,88	77,60	38,9%	335,27	414,36	23,6%
Lainnya	184,93	213,94	15,7%	891,32	937,39	5,2%

TOTAL	1.221,20	1.424,55	16,7%	5.630,95	5.951,18	5,7%
--------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	-----------------	-------------

Komoditas utama ekspor Indonesia meliputi udang USD 1,68 miliar (28,2% terhadap total ekspor perikanan Indonesia), tuna-cakalang USD 1,03 miliar (17,4%), cumi-sotong-gurita USD 874,12 juta (14,7%), rajungan-kepiting USD 511,66 juta (8,6%), rumput laut USD 342,16 juta (5,7%), layur-gulama USD 100,96 juta (1,7%), tilapia USD 93,51 juta (1,6%), dan lobster USD 91,79 juta (1,5%). Beberapa komoditas utama utama yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya antara lain tuna-cakalang (11,6%), cumi-sotong-gurita (14,6%), rajungan-kepiting (14,3%), layur dan gulama (91,1%), tilapia (14,4%) dan lobster (283,6%). Ekspor lobster meningkat secara signifikan ke Tiongkok (266,7%) dan Vietnam (8395,4%). Peningkatan ekspor tersebut juga didukung oleh kegiatan ekspor benih bening lobster (BBL) selama periode Mei-Desember 2024 dengan nilai USD 15,80 juta (sumber: Badan Karantina Indonesia 2025).

Tabel 6. Ekspor Berdasarkan Komoditas Utama Tahun 2023-2024

Komoditas Utama	Volume (Ribuan ton)			Nilai (USD Juta)		
	2023	2024*	YoY	2023	2024*	YoY
Udang	220,89	214,54	-2,9%	1.729,52	1.680,22	-2,9%
Tuna-Cakalang	203,20	278,49	37,1%	927,13	1.034,69	11,6%
Cumi-Sotong-Gurita	152,91	195,10	27,6%	762,59	874,12	14,6%
Rajungan-Kepiting	29,37	39,61	34,9%	447,65	511,66	14,3%
Rumput Laut	265,84	262,55	-1,2%	433,72	342,16	-21,1%
Layur-Gulama	25,21	50,09	98,7%	52,83	100,96	91,1%
Tilapia	11,17	12,77	14,4%	81,77	93,51	14,4%
Lobster	1,14	2,70	135,4%	23,93	91,79	283,6%
Lainnya	311,45	368,69	18,4%	1.171,82	1.222,07	4,3%
TOTAL	1.221,20	1.424,55	16,7%	5.630,95	5.951,18	5,7%

Nilai impor produk perikanan sampai dengan Desember 2024 mencapai USD 0,52 miliar dengan total volume impor sebesar 313,26 ribu ton. Nilai impor tersebut tersebut turun 19,8% atau

USD 128,68 juta dibanding capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

- a. Impor dari Tiongkok turun USD 47,86 juta (-33,1%) utamanya pada komoditas makarel yang menurun USD 44,99 juta (-43,4%). Demikian juga dengan impor dari Rusia turun sebesar USD 23,82 juta (-58,9%) utamanya pada komoditas cod turun USD 14,45 juta (-60,9%), kepiting turun USD 5,23 juta (-47,6%) dan alaska pollack turun USD 3,92 juta (-98,3%);
- b. Komoditas impor yang mengalami penurunan antara lain makarel (-46,5%), rajungan-kepiting (-19,4%), dan tuna-cakalang-tongkol (-13,9%)

Tabel 7. Impor Berdasarkan Komoditas Utama Tahun 2023-2024

Komoditas Utama	Volume (Ribuan ton)			Nilai (USD Juta)		
	2023	2024*	YoY	2023	2024*	YoY
Salmon-Trout	8,67	9,71	12,0%	76,49	76,11	-0,5%
Makarel	122,97	64,19	-47,8%	136,98	73,29	-46,5%
Tepung Ikan	121,45	147,93	21,8%	64,59	58,70	-9,1%
Rajungan-Kepiting	9,09	7,70	-15,2%	72,09	58,11	-19,4%
Rumput Laut	2,84	2,93	2,9%	33,96	36,68	8,0%
Tuna-Cakalang- Tongkol	16,55	16,07	-2,9%	39,22	33,78	-13,9%
Lainnya	85,21	64,74	-24,0%	227,41	185,38	-18,5%
TOTAL	366,79	313,26	-14,6%	650,74	522,05	-19,8%

*Angka Sementara

Sampai dengan Desember 2024, neraca perdagangan produk perikanan mengalami surplus sebesar USD 5,43 Miliar atau meningkat 9,0% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai impor mencapai USD 0,52 miliar atau sekitar 8,8% terhadap total nilai ekspor yang sebesar USD 5,95 miliar. Hal ini menunjukkan Indonesia sebagai negara net exporter produk perikanan.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target nilai ekspor hasil perikanan tahun 2024 antara lain:

- a. Pasca pandemi Covid-19 tahun 2020-2022 permintaan komoditas perikanan di pasar global cenderung meningkat khususnya peningkatan harga komoditas (*panic buying*) karena adanya kebijakan *lockdown* dan disrupsi logistik di negara tujuan ekspor yang berdampak pada peningkatan total nilai impor perikanan dunia dari USD 152,24 Miliar pada tahun 2020 menjadi USD 194,52 Miliar di tahun 2022. Namun, perang Rusia-Ukraina dan memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah berdampak luas terhadap permintaan komoditas perdagangan dunia termasuk perikanan sehingga nilai eksportnya kembali turun menjadi USD 184,54 Miliar pada tahun 2023 dan kemungkinan berlanjut hingga tahun 2024.
- b. Tahun 2024 Amerika Serikat masih mengalami resesi ekonomi dan peningkatan suku bunga bank, sedangkan stagnasi ekonomi juga terjadi di beberapa negara tujuan utama ekspor perikanan Indonesia, seperti Uni Eropa, dan Jepang. Hal ini berpengaruh pada penurunan daya beli konsumen dalam negeri, sehingga berdampak pada penurunan ekspor produk perikanan Indonesia.
- c. Berbagai kondisi global tersebut menyebabkan penurunan kinerja impor produk perikanan beberapa komoditas perikanan utama di beberapa negara tujuan utama ekspor Indonesia, diantaranya:
 - 1) Udang
 - a) Nilai impor udang Amerika Serikat tahun 2024 sebesar USD 6,33 Miliar atau turun 5,0% dibandingkan tahun 2023;
 - b) Nilai impor udang Jepang tahun 2024 sebesar USD 1,92 Miliar, turun 0,1% dibandingkan tahun 2023;

- c) Nilai impor udang Tiongkok tahun 2024 sebesar USD 5,07 Miliar, turun 15,8% dibandingkan tahun 2023 dan;
 - d) Nilai impor udang Uni Eropa periode Januari-Oktober 2024 sebesar USD 5,23 Miliar, turun 0,5% dibandingkan periode yang sama tahun 2023.
- 2) Tuna-Tongkol-Cakalang
- a) Nilai impor tuna-cakalang-tongkol Amerika Serikat tahun 2024 sebesar USD 2,06 Miliar, naik 0,2% dibandingkan tahun 2023. Namun bila dibandingkan nilai impor di tahun 2022 yakni sebesar USD 2,50 Miliar, nilai impor tuna-cakalang-tongkol tahun 2024 masih lebih rendah 17,7%; dan
 - b) Nilai impor tuna-cakalang-tongkol Jepang tahun 2024 sebesar USD 1,63 Miliar, turun 14,8% dibandingkan tahun 2023.
- 3) Cumi-Sotong-Gurita
- a) Nilai impor cumi-sotong-gurita Jepang tahun 2024 sebesar USD 1,20 Miliar, turun 3,3% dibandingkan tahun 2023; dan
 - b) Nilai impor cumi-sotong-gurita Tiongkok tahun 2024 sebesar USD 1,27 Miliar, turun 10,5% dibandingkan tahun 2023
- 4) Rumput Laut
- a) Nilai impor rumput laut Tiongkok tahun 2024 sebesar USD 457,65 Juta, turun 25,7% dibandingkan tahun 2023;
 - b) Nilai impor rumput laut Amerika Serikat tahun 2024 sebesar USD 281,01 juta, turun 8,3% dibandingkan tahun 2023; dan

- c) Nilai impor rumput laut Uni Eropa periode Januari-Oktober 2024 sebesar USD 622,18 juta, turun 16,6% dibandingkan periode yang sama tahun 2023.
- d. Beberapa negara tujuan ekspor, seperti Uni Eropa, Rusia, Arab Saudi, dan Brazil masih memberlakukan regulasi yang ketat terkait registrasi eksportir. Hal ini menghambat peningkatan ekspor produk perikanan Indonesia ke pasar tersebut.
- e. Masih adanya moratorium penambahan *Approval Number* baru untuk pasar Uni Eropa menyebabkan terbatasnya jumlah eksportir Indonesia sehingga tidak meningkatkan kontribusi pangsa pasar komoditas perikanan di pasar Uni Eropa.
- f. Produk perikanan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh pasar internasional. Selain itu, minimnya minat pelaku usaha untuk mengeksplorasi pasar non-tradisional disebabkan oleh keterbatasan akses informasi serta beragamnya persyaratan registrasi ekspor yang bersifat spesifik di tiap negara tujuan.
- g. Penerapan hambatan tarif dan non-tarif terhadap produk perikanan Indonesia menyebabkan peningkatan biaya dalam rantai pasok (*supply chain*), yang pada akhirnya mengurangi daya saing di pasar global.
- h. Udang yang merupakan komoditas utama produk perikanan Indonesia mengalami tantangan di pasar utama Amerika Serikat khususnya terkait pengenaan tarif *anti-dumping* (AD) sementara sebesar 6,3% yang berlaku sejak 1 Juni 2024 dan pengenaan tarif AD final menjadi 3,9% sejak 26 Desember 2024. Hal ini berdampak pada penurunan daya saing produk udang Indonesia di pasar Amerika Serikat dan mempengaruhi capaian ekspor secara keseluruhan.

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian nilai ekspor hasil perikanan periode ke depan, antara lain:

- a. Melakukan koordinasi tindak lanjut atas penyelesaian perundingan dan penyelesaian hambatan ekspor lainnya;
- b. Melakukan koordinasi penyelesaian hambatan ekspor udang ke Amerika Serikat atas tuduhan *Anti-dumping*.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja nilai ekspor hasil perikanan sebesar Rp 9.508.335.000,- dan sampai dengan tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp 9.492.855.000,- atau setara dengan 99,84%, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 15.480.000,-.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini dan juga kegiatan yang merupakan tindak lanjut rekomendasi atas permasalahan di Tahun 2024, antara lain:

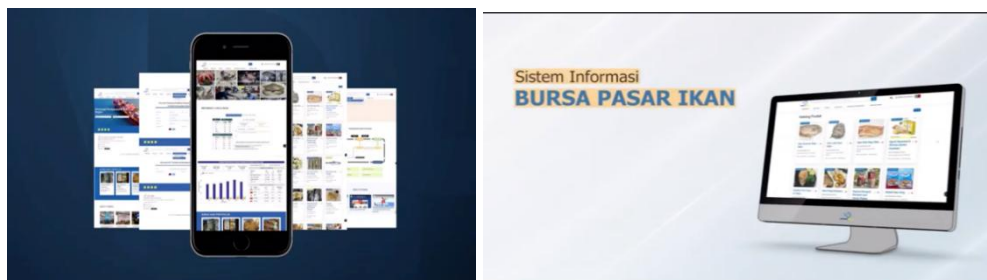
- a. Pengembangan/Pengelolaan Sistem Bursa Pasar Ikan;

Pada 2024, telah dilaksanakan beberapa pertemuan koordinasi antara untuk memperbaiki *error* dan meng-*update* jenis ikan yang ada dalam *website*. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, *error* pada saat proses *login* terjadi karena adanya pembaharuan pada sistem *server* KKP sehingga memengaruhi *website* Bursa Ikan, dan telah ditindaklanjuti perbaikannya.

- 1) Pembuatan video promosi dalam rangka pengembangan jangkauan sosialisasi bursa pasar ikan. Video promosi bursa pasar ikan menyampaikan latar belakang dan tujuan pengembangan sistem informasi, serta tata cara pendaftaran pada *website* bursa pasar ikan.

- 2) Sosialisasi kepada pelaku usaha di beberapa lokasi yaitu di Kota Jakarta Timur pada tanggal 3 Oktober 2024 yang dihadiri oleh UMKM Jabodetabek, Dinas Kelautan dan Perikanan di 38 Provinsi secara luring di Wisma Gracillaria dan daring melalui aplikasi Zoom. Kegiatan sosialisasi juga dilaksanakan di Kota Cirebon pada tanggal 27 Desember 2024 dihadiri oleh UMKM Kota dan Kabupaten Cirebon, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota dan Kabupaten Cirebon.
- 3) Sampai saat ini, jumlah pengguna sistem informasi bursa pasar ikan sebanyak 263 pengguna, dengan jumlah pengajuan penawaran dan permintaan iklan sebanyak 194 iklan. Berdasarkan layanan pengajuan penawaran dan permintaan, terdapat 5 (lima) produk yang paling banyak mengajukan layanan ikan, yaitu empek-empek, kerupuk ikan, abon, bandeng presto, dan lele. Sebaran penawaran meliputi 3 provinsi, yaitu Provinsi Lampung (64,5%), Provinsi Jawa Timur (18,8%), dan Provinsi Kepulauan Riau (16,7%). Adapun sebaran permintaan meliputi 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Timur (50%), Provinsi Jawa Tengah (16,7%), Provinsi DKI Jakarta (16,7%), dan Provinsi Banten (16,7%).





Gambar 18. Sosialisasi dan Video Promosi Bursa Pasar Ikan

b. Pelaksanaan Forum Perluasan Akses Pasar Negara Tujuan Ekspor melalui serangkaian kegiatan:

1) Kegiatan Peningkatan Akses Pasar

a) Indonesia-Canada *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (ICA CEPA)

- Indonesia dan Canada telah menyelesaikan perundingan secara substantif Indonesia - Canada *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (I-CA CEPA) pada 8 November 2024.
- KKP turut serta aktif dalam mengikuti setiap perundingan dan menyampaikan masukan terkait sektor perikanan, termasuk dalam penyusunan *request/offer* perdagangan barang pada perundingan tersebut.
- Terkait hal tersebut, KKP telah menyampaikan Initial Request produk perikanan pada 19 April 2024 dengan prioritasasi. KKP mengusulkan Prioritas Utama (P1) agar menghapus tarif bea masuk pada saat perjanjian diimplementasikan (*Entry into Force - EIF*) untuk seluruh pos tarif produk perikanan yang masih dikenakan tarif oleh Kanada; Prioritas Kedua (P2) penghapusan tarif untuk beberapa pos tarif produk perikanan utama yang telah ditawarkan menjadi 0% pada saat penyampaian initial offer,

diantaranya meliputi produk tuna, udang, lobster, dan tilapia. Sedangkan untuk tarif MFN yang telah 0%, KKP juga meminta agar dipastikan bahwa di masa mendatang tidak ada kenaikan tarif (standstill).

- KKP menyampaikan *Revised Offer* produk perikanan pada 13 September 2024 dengan komposisi: 1) *Entry Into Force*: Penghapusan tarif pada saat implementasi sebanyak 156 pos tarif, 2) Normal Track-1 (NT-1): Penghapusan tarif bea masuk secara bertahap menjadi 0% dalam 5 tahun sebanyak 46 pos tarif, 3) NT 2: Penghapusan tarif dalam 10 tahun sebanyak 98 pos tarif, dan 4) NT 3: Penghapusan tarif dalam 15 tahun sebanyak 131 pos tarif.
- KKP menyampaikan kembali masukan atas *revised request* Kanada pada 15 Oktober 2024 untuk mengusulkan perbaikan *offer* 17 pos tarif dalam kategori penghapusan tarif bea masuk dalam 15 tahun (NT3). Dari 11 pos tarif diantaranya yang menjadi prioritas Kanada (must have), dapat dipertimbangkan sebanyak 3 pos tarif untuk diberikan akses pasar dalam kategori NT3. Pembukaan pos-pos tarif tersebut diantaranya untuk mendukung posisi nasional dan dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan nilai tambah dan diharapkan beberapa pos tarif produk perikanan yang masih dalam kategori penghapusan tarif dalam 10 tahun (NT2) dapat diberikan perbaikan *offer*.

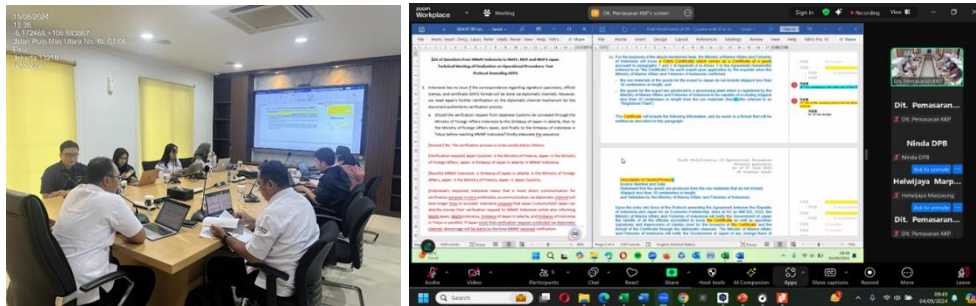


Gambar 19. Perundingan Indonesia - *Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement* (ICA CEPA)

b) Indonesia - *Jepang Economic Partnership Agreement* (IJEPA)

- Indonesia dan Jepang telah menyelesaikan perundingan Protokol Perubahan IJEPA melalui penandatanganan naskah perjanjian oleh Menteri Perdagangan RI dengan Menteri Luar Negeri Jepang pada tanggal 8 Agustus 2024 secara *virtual*.
- Hasil perundingan IJEPA tersebut telah mengakomodasi kepentingan Indonesia khususnya pembebasan 4 pos tarif produk olahan tuna dan cakalang asal Indonesia. Adapun produk olahan tuna dan cakalang yang mendapatkan pembebasan tarif 0% yaitu: 1) *Skipjack and other bonito, in airtight containers* (HS 1604.14.010); 2) *Tunas, in airtight containers* (HS 1604.14.092); 3) *Skipjack and other bonito, boiled and dried* (HS 1604.14.091); dan 4) *Other* (HS 1604.14.099). Untuk 2 (dua) produk olahan terakhir (HS 1604.14.091 dan HS 1604.14.099) dengan persyaratan tambahan ukuran panjang bahan baku cakalang tidak kurang dari 30 cm.

- Selain 4 (empat) pos tarif olahan tuna di atas, Indonesia juga mendapatkan pembebasan tarif 0% sebanyak 67 pos tarif produk perikanan antara lain *yellowfin* tuna beku, fillet tilapia segar, fillet *swordfish* beku, kekerangan, olahan lobster, rajungan beku.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan *Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries* (MAFF) Jepang telah melakukan finalisasi *Operational Procedure* terkait dengan persyaratan panjang bahan baku cakalang di atas 30 cm dalam bentuk sertifikat barang. KKP mengusulkan pemenuhan persyaratan panjang bahan baku cakalang masuk dalam skema Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) yang sudah diharmonisasikan dengan *Japan Catch Documentation Scheme* (JCDS).
- Kesepakatan Protokol Perubahan IJEPA akan mulai berlaku saat perjanjian diimplementasikan setelah melalui proses ratifikasi di parlemen kedua negara dan diharapkan akan berlaku efektif di akhir tahun 2025 atau awal 2026.
- Dengan perubahan protokol IJEPA tersebut, Indonesia akan memiliki preferensi tarif yang sama dengan negara anggota ASEAN produsen olahan tuna lainnya yaitu Thailand.



Gambar 20. Indonesia - Jepang *Economic Partnership Agreement (IJEPA)*

c) Penanganan kasus tuduhan *Countervailing Duties* dan Anti-Dumping udang beku Indonesia oleh AS dilakukan melalui kegiatan:

- Direktorat Pemasaran melakukan koordinasi intensif dengan unit teknis Eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menangani kasus tersebut sesuai dengan *timeline* yang telah dijadwalkan oleh Otoritas Amerika Serikat.
- Untuk itu dibentuk Tim Kerja Penanganan Tuduhan Anti-Dumping dan *Countervailing Duties* Produk Udang Indonesia di Amerika Serikat melalui Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2024 yang terdiri atas unit teknis Eselon I KKP dan K/L terkait lainnya.
- Tim melakukan penyiapan data dan informasi yang diminta oleh Otoritas Amerika Serikat, sampai dengan diterbitkannya final determination dari proses investigasi untuk kasus anti-dumping dan *countervailing duties* oleh Otoritas Amerika Serikat. Tim bersama dengan Lawyer juga menyusun draft

jawaban atas kuesioner melalui serangkaian rapat dan koordinasi.

- Pada tanggal 25 Maret 2024 US DOC telah mengeluarkan hasil Keputusan *Preliminary Negative Determination Investigasi Countervailing Duties* (CVD) produk udang yang menyatakan bahwa *countervailable subsidies* tidak diberikan kepada produser dan eksportir udang beku Indonesia. *Mandatory Respondent Indonesia*: PT. *First Marine Seafood* dan PT. Bahari Makmur Sejati mendapat nilai de minimis yaitu 0,71% dan 0,39%.
- Pada 23 Mei 2024, U.S. *Department of Commerce* (USDOC) telah menerbitkan hasil *Preliminary determination Anti-dumping* (AD) dimana *mandatory respondent Indonesia*, yaitu PT. Bahari Makmur Sejati (BMS) mendapatkan 0%, sedangkan PT. *First Marine Seafood* (FMS) mendapatkan 6,3%. Berdasarkan hasil ini, udang beku dari Indonesia akan dikenakan bea masuk *anti-dumping* yang dibebankan kepada importir AS sebesar margin dumping yang ditetapkan yaitu 6,3%.
- US *Department of Commerce* (US DoC) telah mengeluarkan hasil keputusan final determination investigasi CVD produk udang pada tanggal 22 Oktober 2024 yang menyatakan bahwa *countervailable subsidies* tidak diberikan kepada produser dan eksportir udang beku Indonesia serta keputusan investigasi AD yang menyatakan bahwa *Mandatory Respondent* (MR) 1 mendapat nilai 0% dan MR 2 serta all others mendapatkan penurunan bea

masuk *antidumping* dari 6,3% menjadi 3,9%. Bea masuk tambahan tersebut bersifat sementara hingga dikeluarkannya hasil keputusan *final determination* USITC terkait dengan *injury* domestik AS. Jika tidak terbukti adanya *injury* domestik AS, maka bea masuk CVD dan AD tidak berlaku.

- Direktorat Pemasaran turut mengawal pelaksanaan hearing US *International Trade Commision* (USITC) pada tanggal 22 Oktober 2024 bersama dengan Lawyer Lizbeth R. Levinson yang mewakili AP5I dalam pembelaan pada proses *hearing* tersebut.
- Pada tanggal 19 November 2024, The US *International Trade Commission* (USITC) telah mengeluarkan *News Release* 24-114 yang memutuskan bahwa industri udang domestik AS dirugikan secara material akibat importasi udang beku dari Indonesia (*Anti-Dumping/AD*) dan importasi udang dari Ekuador, India, dan Vietnam (*Countervailing Duties/CVD*).
- Direktorat Pemasaran melaksanakan serangkaian rapat koordinasi dengan Tim Satgas Penanganan AD dari AP5I dalam rangka tindak lanjut hasil *final determination* kasus *antidumping* udang beku asal indonesia, selain itu juga melakukan analisis diversifikasi pasar udang beku Indonesia ke beberapa pasar potensial.



Gambar 21. Serangkaian koordinasi penanganan kasus CVD dan AD udang beku Indonesia

c. Penyusunan Profil Ekspor hasil kelautan dan perikanan pada tahun 2024 meliputi Profil Pasar Global Tuna - Cakalang - Tongkol Tahun 2024, Profil pasar Ekspor-Impor 10 Komoditas, Profil Pasar Tilapia dan Profil Pasar Rumput Laut. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

- 1) Pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan profil pasar luar negeri komoditas tuna cakalang-tongkol pada tanggal 14 Juni 2024 di Ruang Rapat Pemasaran Gedung Mina Bahari III Lantai 13. Rapat dihadiri oleh perwakilan Eselon II lingkup Ditjen PDSPKP dan APHP Lingkup Direktorat Pemasaran dengan pokok pembahasan data dan informasi terkait perkembangan dan potensi pasar komoditas tuna global secara umum dan negara tujuan utama ekspor tuna guna mendukung kegiatan *Tuna Business Forum* tahun 2024.
- 2) Peningkatan kapasitas personil melalui pelatihan *Training Program On International Fish Trade, Global Applicable Framework And Market Access* yang diadakan oleh FAO bekerja sama dengan Infofish pada tanggal 4-6 Juni di Jakarta. Adapun beberapa pokok materi pada pelatihan tersebut antara lain (1) Pengenalan Umum Perdagangan Global Produk Perikanan dan Akuakultur, (2) Instrumen

Internasional dalam Tata Kelola Perikanan dan Akuakultur serta Keterkaitannya dengan Perdagangan Internasional, (3) Klasifikasi Internasional Produk Perikanan dan Akuakultur serta Tarif Impor.

- 3) Melaksanakan pembahasan untuk profil pasar luar negeri komoditas rumput laut pada tanggal 2 Agustus 2024 dalam rangka melengkapi data terkait produksi, pangsa, harga karajinan dan agar serta eksportir utama rumput laut.
 - 4) Melaksanakan diseminasi Profil Pasar Luar Negeri Komoditas Tilapia & Sosialisasi *Market Intelligence* Ditjen PDSPKP kepada pelaku usaha pada tanggal 19 September 2024 melalui pelaksanaan FGD, pertukaran informasi terkait profil pasar luar negeri untuk komoditas tilapia, strategi penguatan produksi tilapia dan pengembangan hilirisasi industri tilapia serta sosialisasi aplikasi market intelligence disampaikan ke pelaku usaha.
- d. Penyusunan rekomendasi kebijakan pendampingan *major project* pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan hasil pemantauan dan koordinasi monitoring evaluasi kegiatan PHLN, kegiatan *Integrated Fishing Ports and International Fish Market -Phase II Preparation Project* dari ADB, masuk dalam kategori pinjaman yang sudah efektif namun belum ada penarikan (*Zero Disbursement*). Dan kegiatan

Integrated Fishing Ports and International Fish Market - Phase I dari ISDB masuk dalam kategori pinjaman yang mengalami keterlambatan penarikan. Pada tanggal 29 November 2024 telah dilaksanakan rapat penyusunan pendampingan *major project* pembangunan pelabuhan perikanan terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional dengan Rekomendasi: Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam pelaksanaan *Major Project Integrated Fishing Ports and International Fish Markets* diharapkan dapat menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut: a. memastikan calon lokasi pembangunan (*clear dan clean*), termasuk memastikan kesiapan prasarana pendukungnya seperti akses jalan, air bersih, listrik, dan tempat pengelolaan sampah kawasan; b. menyiapkan dokumen perizinan yang diperlukan dalam proses pembangunan seperti PBG, UKL/UPL, ANDALALIN, PKPRL dan lain-lain; c. melakukan sosialisasi rencana pembangunan kepada masyarakat sekitar; d. mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD dan sumber lainnya yang sah untuk pendampingan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan; e. menyiapkan rencana bisnis/analisa usaha dan calon pengelola; f. menyiapkan peraturan daerah terkait pengelolaannya pasca pembangunan.

- e. Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional melalui pameran yang dilaksanakan.
 - 1) *Seafood Expo North America* (SENA) yang dilaksanakan di Boston, Amerika Serikat pada 10 - 12 Maret 2024. Kegiatan promosi dilakukan melalui Paviliun Indonesia seluas 1.600 sqft (150 m) yang menampilkan berbagai produk perikanan antara lain: tuna, udang, cumi, sotong, gurita, kakap dan ikan lainnya. Amerika Serikat merupakan tujuan pasar

utama yang berkontribusi sebesar 34% terhadap total nilai ekspor perikanan Indonesia. Dalam rangka mendukung tahun 2024 sebagai Tahun Tuna Indonesia, KKP membawa 10 (sepuluh) eksportir tuna sebagai peserta pameran. Nilai potensi transaksi yang dihasilkan sebesar USD 58,47 juta atau 17% di atas target yang ditetapkan sebesar USD 50 Juta. Produk yang diminati oleh *buyers* antara lain: tuna (loin, *frozen*, saku), udang (*breaded*, *frozen*), octopus, baramundi, cumi, kakap, tilapia, mahi mahi, dan ikan lainnya. Para *buyers* antara lain berasal dari: AS, Taiwan, Belgia, India, Korea Selatan, Spanyol, Inggris, Kanada, Hongkong, China, Australia, Jepang, Perancis, Belanda, Arab Saudi, Peru, Chile, Swiss, Vietnam, dan Kosta Rika.



Gambar 22. Partisipasi Dalam *Seafood Expo North America* (SENA) yang dilaksanakan di Boston, Amerika Serikat

- 2) *Seafood Expo Global* (SEG) dilaksanakan pada tanggal 23-25 April 2024 di Barcelona, Spanyol. KKP melakukan fasilitasi promosi bagi 19 eksportir melalui fasilitasi Paviliun Indonesia seluas 216 m² pada pameran tersebut. Produk perikanan yang didisplay di paviliun antara lain: tuna, udang, cumi, sotong, gurita, kakap, telur ikan terbang, ikan tuna kaleng dan ikan lainnya. Nilai transaksi potensial yang dihasilkan selama 3 hari pameran sebesar USD 63,8 juta atau 27,6% melebihi target sebesar USD 50 juta.



Gambar 23. Partisipasi pada *Seafood Expo Global* (SEG) dilaksanakan pada tanggal 23-25 April 2024 di Barcelona, Spanyol

- 3) NUSATIC 2024 diselenggarakan oleh KKP sebagai *host* berkolaborasi dengan PT. Akuatik Flona Nusantara Kreasi sebagai organizer pada tanggal 7-9 Juni 2024 di ICE BSD, Tangerang. KKP menyediakan paviliun seluas 160 m² untuk 7 (tujuh) UMKM, 3 (tiga) eksportir, SMKN 61 Kepulauan Seribu, dan Raiser Ikan Hias Cibinong. Capaian potensi transaksi selama 3 (tiga) hari pameran berlangsung sebesar Rp 2,67 miliar atau USD 162,62 ribu untuk transaksi on-site. Sementara itu potensi transaksi sebesar Rp 22,63 miliar atau USD 1,38 juta dengan komoditas yang diminati yaitu: live coral, axolotl, aquascape, paludarium, ikan hias air laut, ikan air tawar, dan tanaman air. Para calon *buyers* berasal dari Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, Swedia, Singapura, Tunisia, Perancis, Afrika Selatan, dan Belanda.



Gambar 24. Kegiatan NUSATIC 2024

- 4) Indo Fisheries 2024 Expo & Forum diselenggarakan oleh KKP (sebagai *host*) berkolaborasi dengan PT. Napindo Media

Ashatama (sebagai *organizer*) pada tanggal 17 s.d 19 Juli 2024 di *Jakarta Convention Center*, Jakarta. Pada pameran ini, KKP memfasilitasi paviliun seluas 126 m² untuk empat *brand* produk perikanan Indonesia yaitu Indonesian Tuna, Indonesian Shrimp, Indonesian Pangasius, dan Indonesian Seaweed, serta 6 (enam) pelaku usaha siap ekspor. KKP juga membuka pelayanan informasi kebijakan KKP. Capaian nilai potensi transaksi selama 3 (tiga) hari pameran berlangsung sebesar Rp 151,75 miliar untuk keseluruhan pameran Indo Fisheries 2024 dengan komoditas yang diminati yaitu agar, karaginan, fillet kakap merah, fillet kerapu, udang, fillet sweetlips, cumi, fishmaw, bandeng, tuna, permesinan, pakan dan obat-obatan. Potensial buyer berasal dari Indonesia, Korea, Vietnam, Malaysia, China, dan Singapura.



Gambar 25. Indo Fisheries 2024 Expo & Forum

- 5) Trade Expo Indonesia (TEI) tanggal 9-12 Oktober 2024 di Tangerang, Indonesia diikuti oleh 9 eksportir dengan nilai potensi transaksi USD 8,6 Juta.

3. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan adalah jenis dan jumlah ikan yang dikonsumsi seseorang, kelompok, atau penduduk untuk memenuhi kebutuhan gizi. Ikan mencakup ikan segar dan olahan sesuai dengan kuesioner Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari BPS. Penghitungan konsumsi ikan nasional merupakan angka

konsumsi ikan per kapita (secara utuh segar) dari seluruh provinsi dibagi jumlah provinsi pada periode satu tahun.

Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Konsumsi Ikan

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2024* (7)	Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN (8)
Konsumsi Ikan	2024	59,00	58,91*	99,83	59,00	58,91	99,83
	2023	57,61	57,61	100,00			
	2022	59,53	56,48	94,88			
	2021	58,08	55,37	95,33			
	2020	56,39	56,39	100,00			

Keterangan: *angka prognosa

Penghitungan AKI dilaksanakan berdasarkan *raw data* Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik minus satu tahun pada tahun berjalan (T-1). Oleh sebab itu, capaian AKI Nasional tahun 2024 akan diketahui pada tahun 2025. Capaian AKI tahun 2024 merupakan data prognosa berdasarkan perkembangan AKI tahun 2019-2023. Hasil penghitungan capaian sementara AKI pada tahun 2024 mencapai 58,91 kg/kapita/tahun. Capaian tersebut setara dengan 99,83% dari target tahun 2024 dan target RPJMN sebesar 59,00 kg/kapita/tahun. Jika dibandingkan realisasi dan capaian pada tahun 2023 sebesar 57,61 dan capaian 100,00% dari target 57,61, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 2,24%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar -0,17%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2022 sebesar 56,48 dan capaian 94,88% dari target 59,53, maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,28%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan 5,22%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2021 sebesar 55,37 dan capaian

95,33% dari target 58,08, maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 6,38% sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan 4,72%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2020 sebesar 56,39 dan capaian 100,00% dari target 56,39 juta ton, maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,45% sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan -0,17%.

Berdasarkan wilayah provinsi, capaian sementara AKI Nasional tahun 2024 tertinggi terdapat di Provinsi Maluku sebesar 82,80 kg/kapita/tahun setara utuh segar, Provinsi Papua sebesar 79,36 kg/kapita/tahun setara utuh segar, dan Provinsi Sulawesi Utara sebesar 77,21 kg/kapita/tahun setara utuh segar. Adapun capaian sementara AKI Nasional tahun 2024 terendah terdapat di Provinsi DI. Yogyakarta sebesar 36,48 kg/kapita/tahun setara utuh segar, Provinsi Lampung sebesar 39,20 kg/kapita/tahun setara utuh segar, dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 40,28 kg/kapita/tahun setara utuh segar.

Beberapa hal yang menjadi penyebab ketidaktercapaian target indikator angka konsumsi ikan pada tahun 2024 diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan data BPS, pada Maret 2024 terjadi penurunan konsumsi kalori sebesar 1,73% dan penurunan konsumsi protein sebesar 1,01%.
- b. Merujuk data BPS, antara tahun 2024 – 2024 terjadi perubahan pola konsumsi protein hewani yang diindikasikan karena adanya kenaikan harga. Pengeluaran penduduk dapat menjadi indikasi terjadinya kenaikan harga komoditas makanan. Saat harga komoditas naik, pengeluaran penduduk akan lebih banyak. Akan tetapi, konsumsi terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga tersebut akan berkurang.

Dalam rangka menindaklanjuti permasalahan tersebut, beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan diantaranya sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan konsumsi ikan;
- b. Melaksanakan kampanye protein ikan dan gerakan memasyarakatkan makan ikan dalam mendukung program makan bergizi melalui berbagai media;
- c. Finalisasi data AKI Nasional Tahun 2024.

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ditjen PDSPKP dalam rangka pencapaian indikator kinerja konsumsi ikan antara lain:

- a. Penyusunan profil dalam negeri kelautan perikanan dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - 1) Penyusunan buku pedoman penghitungan angka konsumsi ikan, baik angka konsumsi ikan tahun 2023 maupun angka konsumsi ikan periode bulanan tahun 2024. Buku pedoman AKI Tahun 2023 menyampaikan panduan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menghitung AKI nasional, provinsi dan kabupaten/kota tahun 2023. Adapun buku pedoman AKI Periode Bulanan Tahun 2024 menyampaikan panduan bagi petugas pengolah data dalam menentukan sampel wilayah dan rumah tangga, metode pendataan, entri data, serta verifikasi dan validasi data AKI periode bulanan tahun 2024.
 - 2) Peyampaian memorandum nomor 1212/DJPDSPKP.5/TU.140/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 perihal capaian konsumsi ikan di dalam rumah tangga tertimbang tahun 2023. Penghitungan konsumsi ikan dengan pendekatan konsumsi di dalam rumah tangga dilakukan dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional

(Susenas) Badan Pusat Statistik dan dihitung secara tertimbang populasi. Berdasarkan hasil penghitungan, capaian KIDRT Nasional tertimbang tahun 2023 sebesar 25,07 kg/kapita/tahun setara utuh segar dengan total serapan ikan dalam rumah sebesar 6.938.606 ton setara utuh segar.

- 3) Penyusunan buku peta konsumsi dan serapan ikan berdasarkan preferensi konsumen rumah tangga tahun 2023. Buku peta tahun 2023 menyampaikan data konsumsi dan serapan ikan berdasarkan 15 jenis ikan dengan preferensi tertinggi di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.
 - 4) Penyusunan profil pasar dalam negeri komoditas unggulan dalam bentuk video dan PPT. Profil pasar dalam negeri disusun berdasarkan 6 (enam) komoditas unggulan, antara lain: Tuna-Cakalang-Tongkol (TCT), Tilapia, Kembung, Udang, Bandeng dan Lele. Data dan informasi yang disampaikan mencakup data produksi, sebaran unit pengolahan ikan (UPI), konsumsi dan serapan ikan, rerata harga konsumen dan nilai perdagangan, kontribusi asupan protein serta kecukupan produksi terhadap serapan untuk masing-masing komoditas. Selanjutnya, profil tersebut disosialisasikan pada tanggal 23 Desember 2024 secara hybrid, serta dihadiri oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia (APCI), Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN), Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Shrimp Club Indonesia (SCI), dan Asosiasi Pelaku Usaha.
- b. Pelaksanaan kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan

masyarakat tentang pentingnya kandungan gizi ikan bagi kesehatan, meningkatkan minat masyarakat untuk mengonsumsi ikan, mendukung program prioritas nasional percepatan penurunan stunting dan gizi buruk, mempromosikan produk perikanan sebagai makanan kaya gizi dan protein serta menyerap produksi ikan/olahan ikan pada UMKM setempat serta pemenuhan gizi masyarakat. Selain itu pada kegiatan gemarikan dilakukan distribusi paket gemarikan dengan tujuan untuk mengenalkan ragam produk olahan ikan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat dalam tingkatan semua usia dan mengenalkan produk UMKM dan menjadi sumber pendapatan untuk UMKM setempat. Pada periode sebanyak 194 kegiatan promosi yang terdiri dari 165 promosi kegiatan Perluasan Safari Gemarikan, 12 promosi dari kegiatan Bazar dan 10 promosi pada media sosial gemarikan serta 7 promosi gemarikan reguler.



Gambar 26. Pelaksanaan Kampanye Gemarikan

- c. Pelaksanaan Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri melalui pelaksanaan beberapa kegiatan yaitu:
- 1) *Indonesia Tuna Investment & Business Forum* pada tanggal 25 Juni 2024 di JW Marriot, Surabaya.
 - 2) Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) pada tanggal 27-29 Juni 2024 di Simpang Lima, Semarang.

- 3) Kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI/BBWI) pada tanggal 23-24 Agustus 2024 di Lapangan Merdeka, Ambon.



Gambar 27. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI/BBWI)

- 4) Pameran Dagang Internasional *Trade Expo Indonesia* (TEI) pada tanggal 9-12 Oktober 2024 di ICE BSD, Tangerang. *Trade Expo Indonesia* (TEI) merupakan pameran dagang tahunan terbesar di Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan yang berfokus pada B2B (*Business to Business*) untuk mendorong pertumbuhan produk ekspor dan memperluas pasar ekspor. Pameran ini menampilkan berbagai produk dari sektor-sektor utama seperti makanan dan minuman, tekstil, furnitur, otomotif, elektronik, dan produk kerajinan tangan.



Gambar 28. Kegiatan Trade Expo Indonesia (TEI)

- 5) Hari Nusantara pada tanggal 13 Desember 2024 di beberapa titik: a. Pekanbaru Riau, b. Banjarmasin Kalimantan Selatan, c. Pekalongan Jawa Tengah, d. Biak Papua dan Merauke Papua Selatan, e. Bitung Sulawesi Utara. KKP menyukseskan program makan bergizi menu ikan mengingat program ini adalah bagian dari investasi masa depan, khususnya dalam menciptakan SDM berkualitas. Dukungan KKP terhadap program makan bergizi diantaranya menyiapkan data yang dibutuhkan seperti peta produksi, peta komoditas, sebaran UMKM pengolah perikanan, ragam produk hilirisasi perikanan hingga koperasi guna menumbuhkan *multiplier effect* serta ekonomi sirkular.



Gambar 29. Kegiatan Hari Nusantara (HARNUS)

- d. Pembangunan Prasarana Pemasaran Kelautan dan Perikanan yang dibangun: Jumlah Prasarana Pemasaran Kelautan dan Perikanan yang dibangun (unit) oleh KKP yang merupakan bantuan Pemerintah dengan akun 526 untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berupa bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pemasaran produk perikanan dalam bentuk segar, hidup maupun olahan. Telah terlaksana pembangunan area Pemotongan Ikan Pasar Fandoi tahun 2024 di Kabupaten Biak Numfor.



Gambar 30. Kegiatan Pasar Ikan Fandoi

- e. Pembinaan Lembaga Pengelola Pasar Ikan untuk memberikan pembinaan kepada pembina pasar (Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang terlibat dalam pembinaan pedagang ikan dan/atau pengelola pasar ikan), pengelola pasar dan pedagang dalam rangka mewujudkan pasar ikan yang sehat, bersih, aman dan nyaman serta memenuhi kaidah sanitasi dan higienis. Pembinaan dapat dilakukan melalui kunjungan langsung, pertemuan dengan pembina pasar, pedagang dan pengelola pasar atau menyampaikan melalui media sosialisasi yaitu poster, video, dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan dengan sosialisasi dan pembinaan dalam rangka penerapan SOP menuju pasar ikan yang memenuhi standar, antara lain: SOP pengelolaan pasar, SOP cara berjualan ikan yang baik, SOP kesehatan dan kebersihan pribadi pelaku pasar, serta pedagang ikan, SOP pembersihan dan sanitasi tempat berjualan ikan, SOP pengelolaan limbah/sampah, SOP pembongkaran ikan segar di area pasar ikan, SOP cara memajang (*display*) ikan segar dan SOP penyimpanan ikan. Pada periode pembinaan lembaga pengelola pasar dilaksanakan pada 30 lembaga yaitu (1) PIB Banyuasin Sumatera Selatan, (2) Pasar Senen Yogyakarta, (3) Pasar Waru Yogyakarta, (4) Pasar Ikan Balekambang Solo, (5) Pasar Ikan Sidoarjo, (6) Pasar Simo

Gunung Surabaya, (7) Pasar Ikan Sangatta Kaltim (8) Pasar Maricaya Makasar, (9) Pasar Roebobo Kupang, (10) Pasar Fatubesi Kupang, (11) Pasar Agung Depok, (12) Pasar Musi Depok (13) Pasar Sukatani Depok, (14) Pasar Rakyat Jabar Utara Depok, (15) Pasar Pucung Depok, (16) Pasar Senen Jakarta, (17) Pasar Nangka Bungur Jakarta, (18) Pasar Kemayoran Jakarta, (19) Pasar Gondangdia Jakarta, (20) Pasar Serdang Jakarta, (21) Pasar Sumur Batu Jakarta,

- f. Pengadaan Peralatan Pemasaran. Peralatan pemasaran merupakan Bantuan Pemerintah langsung kepada masyarakat dalam hal ini koperasi/kelompok perikanan berupa *cool box* guna mendukung distribusi dan pemasaran hasil perikanan. Pada Tahun 2024 Ditjen PDSPKP mengalokasikan sebanyak 6.000 unit sarana pemasaran *cool box*. Sampai dengan periode tahun 2024 Ditjen PDSPKP telah telah mengirimkan bantuan pemerintah dalam III tahap berupa peralatan pemasaran *coolbox* kapasitas 100 dan 120 liter sebanyak 5533 unit kepada 344 kelompok pelaku usaha kelautan dan perikanan di 101 kabupaten/kota dan 27 provinsi seluruh Indonesia.



Gambar 31. Penyerahan bantuan pemerintah berupa peralatan pemasaran

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator Angka Konsumsi Ikan sebesar Rp

51.191.685.000,- dan sampai dengan tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp 51.181.766.000,- atau setara dengan 99,98%, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 9.919.000.

Sasaran Program 3. Terwujudnya pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel, dan Berkelanjutan

4. Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan

Investasi di sektor kelautan dan perikanan (KP) didefinisikan sebagai tindakan penanaman modal usaha di sektor KP dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Realisasi investasi kelautan dan perikanan merupakan realisasi investasi usaha perikanan (penangkapan dan budidaya), pengolahan dan perdagangan/pemasaran. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) terus berupaya mendorong peningkatan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai kegiatan strategis, antara lain: penyediaan informasi peluang investasi, promosi investasi, pendampingan investasi, pemantauan dan pengendalian investasi. Kegiatan Promosi Pemberdayaan Usaha dalam rangka mendukung program prioritas KKP, diantaranya yaitu Kampung Budidaya, peningkatan produksi komoditas unggulan, dan Penangkapan Ikan Terukur, serta mendukung peningkatan nilai ekspor hasil perikanan dalam rangka penguatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

Realisasi investasi KP dihitung melalui penjumlahan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bersumber dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Kredit Investasi yang bersumber dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Investasi yang berasal dari PMA dan PMDN merupakan kontribusi perusahaan swasta, baik

dalam negeri maupun asing terhadap pembangunan kelautan dan perikanan. Sedangkan investasi dari kredit investasi merupakan kredit jangka menengah/panjang yang berasal dari Lembaga Keuangan (perbankan dan non perbankan). Realisasi dari kredit investasi mengakomodir investasi masyarakat yang berasal dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Dalam rangka mencapai target tersebut, Ditjen PDSPKP terus berupaya mendorong peningkatan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai kegiatan strategis, antara lain penyediaan informasi peluang investasi, promosi investasi, pendampingan investasi, pemantauan dan pengendalian investasi. Kegiatan promosi Pemberdayaan Usaha dalam rangka mendukung program prioritas KKP yaitu Kampung Budidaya, peningkatan produksi udang, dan Penangkapan Ikan Terukur sebagai upaya penguatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung program peningkatan nilai ekspor hasil perikanan.

Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2024* (7)	Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN (8)
Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	2024	9,00	10,50*	116,67	9,00	10,50	116,67
	2023	8,80	11,10	126,14			
	2022	5,79	7,78	134,37			
	2021	5,49	6,02	109,65			
	2020	5,21	5,27	101,15			

Keterangan: *Nilai Prognosa

Realisasi investasi KP pada tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp 10,50 triliun (angka prognosa). Capaian tersebut

setara dengan 116,67% dari target tahun 2024 dan target RPJMN sebesar Rp 9,00 triliun. Jika dibandingkan realisasi dan capaian pada tahun 2023 sebesar 11,10 dan capaian 126,14% dari target 8,80, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar -5,41%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar -7,51%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2022 sebesar Rp 7,78 triliun dan capaian 134,37% dari target Rp 5,79 triliun, maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 34,96%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan -13,17%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2021 sebesar Rp 6,02 triliun dan capaian 109,65% dari target Rp 5,49 triliun, maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 74,42% sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan 6,40%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2020 sebesar Rp 5,27 triliun dan capaian 101,15% dari target Rp 5,21 triliun, maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 99,24% sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan 15,34%. Jika dibandingkan dengan realisasi investasi nasional sebesar Rp 1.714,2 triliun, maka investasi sektor KP mempunyai kontribusi sebesar 0,61% dari total realisasi investasi nasional.

Perlambatan capaian investasi kelautan dan perikanan tahun 2024 secara umum disebabkan karena tahun 2024 merupakan tahun politik di Indonesia sehingga calon investor cenderung *wait and see* untuk melihat kebijakan pejabat negara terpilih. Selain itu, ketidakstabilan politik dunia juga berpengaruh terhadap penurunan realisasi investasi di Indonesia. Investasi kelautan dan perikanan semester II tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp 4,97 triliun atau melambat sebesar 10,02% dibandingkan capaian investasi semester I tahun 2024 sebesar Rp 5,53 triliun. Total realisasi investasi kelautan dan perikanan tahun 2024 diperkirakan

mencapai Rp 10,50 triliun, terjadi perlambatan 13,05% dari tahun 2023, namun *trend year on year* 2020-2024 mengalami pertumbuhan positif 16,53%.

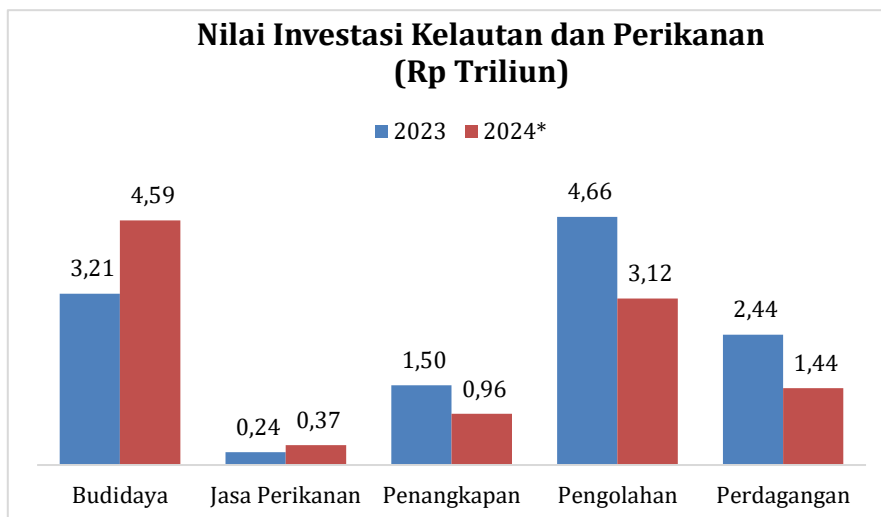
Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian investasi, antara lain:

- a. Melakukan pemetaan dan analisis potensi investasi,
- b. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, K/L terkait, serta Eselon 1 Lingkup KKP,
- c. Melakukan pendampingan minat investasi kepada calon investor,
- d. Menyusun dokumen peluang investasi kelautan dan perikanan,
- e. Melakukan promosi dan publikasi peluang investasi di Indonesia

Berdasarkan sumber permodalannya, realisasi investasi terdiri dari Realisasi investasi yang bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA) diperkirakan sebesar Rp 3,70 triliun, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 4,22 triliun, dan Kredit Investasi sebesar Rp 2,58 triliun.

Realisasi investasi bidang budidaya pada tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp 4,59 triliun atau meningkat 42,71% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp 3,21 triliun. Disusul bidang pengolahan diperkirakan mencapai Rp 3,12 triliun atau melambat 32,95% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 4,66 triliun. Perdagangan diperkirakan mencapai Rp 1,44 triliun atau melambat 41,14% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp 2,44 triliun. Bidang penangkapan diperkirakan mencapai Rp 960,23 miliar atau melambat sebesar 35,91% dibandingkan periode yang

sama tahun 2023 sebesar Rp 1,50 triliun. Adapun bidang jasa perikanan diperkirakan mencapai Rp 373,15 miliar atau meningkat sebesar 56,76% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp 238,03 miliar.



Gambar 32. Capaian Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Bidang Usaha Periode Tahun 2023-2024 (Rp Triliun)

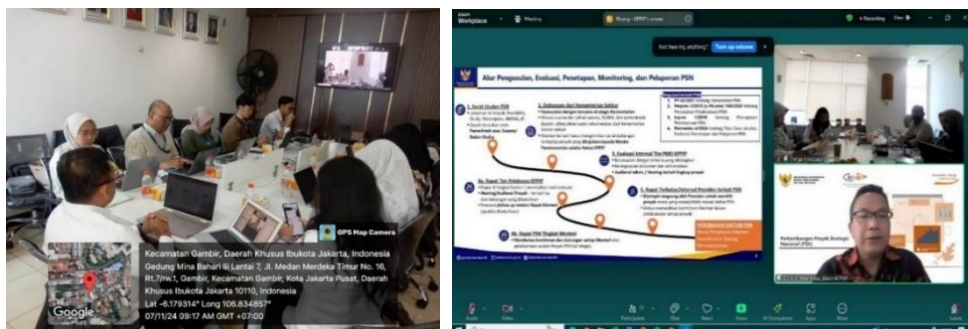
Australia (47,12%), Hongkong (22,35%), Malaysia (7,17%) adalah TOP 3 asal negara investor di Indonesia pada periode triwulan III Tahun 2024. Sedangkan TOP 3 lokasi tujuan investasi pada periode triwulan III Tahun 2024 adalah Bali sebesar Rp 1,79 triliun disusul Jawa Timur sebesar Rp 1,26 triliun dan DKI Jakarta sebesar Rp 943,13 miliar.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 3.383.485.000,- dan sampai dengan periode tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp 3.382.058.000,- atau setara dengan 99,96%, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 427.000. Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 116,67% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,96%.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya mendorong peningkatan realisasi investasi diantaranya:

a. Penyusunan Dokumen Peluang Investasi yang *Ready to offer* melalui Pemetaan peluang investasi melalui beberapa kegiatan antara lain:

1) FGD Pengembangan Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan. Kegiatan FGD Pengembangan Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan dilaksanakan pada hari Kamis, 7 November 2024 secara hybrid, yaitu luring di Ruang Rapat Direktorat Pemberdayaan Usaha, Gedung Mina Bahari III, Lt. 12; dan daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Tujuan FGD adalah untuk memperkaya pengetahuan dan informasi terkait pengembangan kawasan usaha yang terintegrasi dan terpadu; mengetahui keunggulan fiskal dan nonfiskal dari pengembangan dan pengelolaan kawasan usaha melalui skema Kawasan Industri (KI), Kawasan Berikat (KB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); serta mengetahui mekanisme pengusulan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk kawasan usaha.



Gambar 33. FGD Pengembangan Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan

2) Pemetaan Calon Lokasi Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Kegiatan

pemetaan calon lokasi Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan di Kota Ambon, Provinsi Maluku dilaksanakan pada tanggal 27 November – 1 Desember 2024 melalui koordinasi ke beberapa instansi dan *stakeholder* terkait di provinsi Maluku yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Eri, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon, PT Aneka Sumber Tata Bahari, dan PT Peduli Laut Maluku. Kunjungan ke instansi dan *stakeholder* terkait bertujuan untuk mengidentifikasi potensi sektor kelautan dan perikanan; pemetaan potensi lahan yang siap dijadikan Kawasan; peluang pengembangan kawasan hilirisasi pada wilayah tersebut, serta mengidentifikasi respon Pemda dan Pelaku Usaha terhadap rencana Pengembangan Kawasan Hilirisasi.



Gambar 34. Kegiatan Pemetaan Calon Lokasi Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan di Kota Ambon, Provinsi Maluku

- 3) *Benchmarking* penyusunan peluang investasi kelautan dan perikanan (Grand Design Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan) di Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan pendampingan atau *benchmarking* penyusunan peluang investasi kelautan dan perikanan (*Grand Design* Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan) di Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan pada tanggal 27 – 30 November 2024. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini yaitu mengetahui kondisi

perkembangan usaha perikanan; mempelajari rantai pasok industri perikanan dari hulu ke hilir; *benchmarking* pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan memperoleh masukan tentang konsep Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan.



Gambar 35. *Benchmarking* penyusunan peluang investasi kelautan dan perikanan (*Grand Design* Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan) di Provinsi Sulawesi Utara

- 4) Rapat Koordinasi dan Finalisasi Penyusunan Konsep *Grand Design* Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 16 Desember 2024 di Ruang Rapat Mutiara, Gedung Mina Bahari III, Lt. 14. Rapat ini bertujuan untuk penyampaian dan finalisasi konsep Kawasan Hilirisasi KP, serta pembahasan hasil *benchmarking* dan pemetaan calon lokasi Kawasan Hilirisasi KP.
- b. Promosi Pemberdayaan Usaha dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:
 - 1) Pendampingan Minat Investasi D42 – Uni Emirat Arab. Pendampingan Investasi Delegasi D42 melakukan kunjungan ke Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) Karawang pada tanggal 15 November 2024 dihadiri oleh CEO dan Dewan Direksi D42 bersama tim KKP. D42 adalah investor yang bergerak di bidang pertanian, logistik, *trading* dan ritel yang berbasis di Dubai, Uni Emirat Arab. Di bidang *trading*, D42 fokus pada

industri Barang Konsumsi Cepat Saji (*Fast-Moving Consumer Goods*/FMCG) premium dengan membangun ekosistem perdagangan mulai dari pengadaan bahan baku, logistik dan penyimpanan.



Gambar 36. Kegiatan pendampingan Minat Investasi D42 – Uni Emirat Arab

- 2) Pendampingan dan Audiensi Minat Investasi PT Nusantara Energy Indonesia. Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 19 November 2024 secara hybrid, yaitu luring di Ruang Rapat Direktorat Pemberdayaan Usaha dan daring melalui aplikasi *zoom meeting*. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui profil Maritimpreneur/Maritim Muda sebagai perwakilan PT. Nusantara Energy Indonesia dan pembahasan minat investasi komoditas tuna di Bitung. PT. Nusantara Energy Indonesia adalah perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang telah berdiri sejak tahun 2012, bergerak dalam bidang jasa pertambangan, *bulk sea transportation*, konstruksi, energi terbarukan, dan dukungan tenaga ahli. PT Nusantara Energy Indonesia menunjuk Maritimpreneur/Maritim Muda sebagai konsultan untuk pengembangan investasi. PT. Nusantara Energy Indonesia berminat untuk berinvestasi untuk memperluas bidang usahanya di sektor kelautan dan perikanan pada usaha

penangkapan ikan tuna, pengolahan, dan pembangunan galangan kapal di Kota Bitung. Rencana nilai investasi awal yang akan dilakukan untuk pengadaan kapal penangkapan ikan tuna yaitu Rp5 miliar. Target pasar yang akan dipenuhi yaitu pasar ekspor ke Jepang.



Gambar 37. Pendampingan dan Audiensi Minat Investasi PT Nusantara Energy Indonesia

- 3) Audiensi *Blended Finance Investment Fund Blue Ocean* dengan *Seatech Energy*. Kegiatan dilaksanakan pada 2 Desember 2024 di Jakarta yang dihadiri oleh *Owner* dan tim *Seatech Energy*. *Seatech Energy* adalah sebuah perusahaan Belanda bergerak di bidang budidaya rumput laut dengan pemanfaatan teknologi di Jakarta. Kegiatannya fokus pada energi terbarukan mendukung penerapan ekonomi biru yang berkelanjutan dan melindungi ekosistem laut



Gambar 38. Audiensi *Blended Finance Investment Fund Blue Ocean* dengan *Seatech Energy*

- 4) Pendampingan dan Audiensi Minat Investasi PT Industri Laut Nusantara. Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 10 Desember 2024 secara di Ruang Rapat Mutiara, Gedung Mina Bahari III, Lt. 14. Agenda rapat ini yaitu penyampaian profil singkat PT. Industri Laut Nusantara serta pembahasan minat investasi sektor kelautan dan perikanan. PT Industri Laut Nusantara (ILN) adalah perusahaan PMA hasil *joint venture* PT. Saga Multi Investama (Indonesia) dan *Green Energy Investment Consulting Ltd* (perusahaan China yang telah berkecimpung di bidang tambang dan pengolahan nikel di Morowali).



Gambar 39. Pendampingan dan Audiensi Minat Investasi PT Industri Laut Nusantara

- 5) Pendampingan dan Audiensi Minat Investasi Delegasi Enterprise dari Provinsi Guangdong, China. Pendampingan investasi untuk Delegasi Enterprise dari Provinsi Guangdong ke *Fishing Port* Samudera Nizam Zahcman dilakukan pada tanggal 11 Desember 2024. Delegasi Enterprise adalah himpunan dari beberapa pengusaha skala besar di China yang bergerak antara lain di sektor perikanan, industri kreatif, pertanian. Kunjungan Delegasi Enterprise bertujuan untuk peninjauan peluang kerja sama investasi, peninjauan kemitraan usaha dengan pelaku usaha perikanan eksisting, serta mengetahui gambaran umum.



Gambar 40. Pendampingan dan Audiensi Minat Investasi Delegasi Enterprise dari Provinsi Guangdong, China

5. Kinerja Logistik Hasil Perikanan

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) diamanatkan pada Pasal 13 ayat 3 bahwa monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja SLIN menggunakan kaidah pengukuran secara ilmiah berdasarkan Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI). Penghitungan Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI) diperlukan untuk mengukur performa dari sistem logistik ikan di suatu koridor yang ditentukan. Angka capaian IKLI berfungsi sebagai sarana evaluasi kinerja sistem logistik ikan yang telah berjalan berdasarkan dimensi pembentuknya. Penghitungan IKLI menggunakan data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan instrumen kuesioner kepada instansi terkait, pelaku jasa logistik dan pelaku usaha perikanan.

Penghitungan IKLI dilakukan dengan mengukur performa atribut berdasarkan persepsi penilaian responden dari lima dimensi pembentuk yaitu:

- a. Dimensi Pengelolaan Pengadaan Hasil Perikanan: memberikan gambaran tentang ketersediaan data dan informasi untuk

- perencanaan produksi dan pengadaan ikan sebagai panduan untuk proses distribusi.
- b. Dimensi Efisiensi: memberikan gambaran tingkat penggunaan sumberdaya (*resource*) dibandingkan dengan *output*/manfaat yang diperoleh.
 - c. Dimensi Konektivitas: memberikan gambaran terkait konektivitas sehingga pelaku logistik mendapatkan kemudahan untuk mendistribusikan barang dan proses logistik menjadi berkembang.
 - d. Dimensi Manfaat: memberikan gambaran bahwa sistem logistik memberikan nilai tambah bagi proses perencanaan dan distribusi ikan, sehingga ekonomi lokal berkembang baik, dan
 - e. Dimensi Tata Kelola: memberikan gambaran terhadap pengaruh kunci penggerak utama Sistem Logistik Ikan Nasional (SISLOGNAS) terhadap komponen Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN).

Saat ini, penghitungan IKLI berdasarkan pada moda transportasi laut. Koridor logistik ditentukan dengan mempertimbangkan komoditas penentu, wilayah atau kawasan serta konektivitas antar wilayah. Penilaian IKLI tahun 2024 dilakukan pada 7 koridor logistik, yaitu:

1. Bitung – Surabaya/Jakarta
2. Kupang – Surabaya/Jakarta
3. Kendari – Surabaya/Jakarta
4. Mimika – Surabaya/Jakarta
5. Ambon – Surabaya/Jakarta
6. Makassar – Surabaya/Jakarta
7. Biak – Surabaya

Tabel 10. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Logistik Hasil Perikanan

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2024 (7)	Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN (8)
Kinerja Logistik Hasil Perikanan (Indeks)	2024*	71,9	73,45	102,16%	71,90	73,45	102,16%
	2023	70,43	73,31	104,09%			
	2022	56,00	70,43	125,77%			
	2021	54,00	65,87	121,98%			
	2020	52,00	53,88	103,62%			

Capaian Kinerja Logistik tahun 2024 adalah sebesar 73,45. Capaian tersebut setara dengan 102,16% dari target tahun 2024 dan target RPJMN sebesar 71,90. Jika dibandingkan realisasi dan capaian pada tahun 2023 sebesar 73,31 dan capaian 104,09% dari target 70,43, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 0,19%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar -1,86%. Penyebab penurunan capaian pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dikarenakan indeks dimensi pengelolaan pengadaan hasil perikanan yang belum optimal dibandingkan dengan indeks dimensi lainnya. Dimensi pengelolaan pengadaan hasil perikanan dimaksud meliputi aspek data produksi ikan, kebutuhan ikan untuk konsumsi lokal, kebutuhan industri pengolahan, data ikan masuk dan keluar, dan data sarana penyimpanan yang dimiliki pemerintah dan swasta, serta data jumlah ikan yang bisa diangkut oleh penyedia jasa logistik. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2022 sebesar 70,43 dan capaian 125,77% dari target 56, maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,29%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan-18,77%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2021 sebesar 65,87 dan capaian 121,98% dari target 54,

maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 11,51% sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan -16,25%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2020 sebesar 53,88 dan capaian 103,62% dari target 52, maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 36,32% sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan -1,41%.

Berdasarkan hasil agregasi Kinerja Logistik Hasil Perikanan yang diperoleh sebesar 73,45 menunjukkan bahwa yang memiliki indeks kinerja tertinggi yaitu koridor Kendari-Surabaya/Jakarta dengan indeks sebesar 79,73, sedangkan koridor dengan indeks kinerja terendah yaitu pada koridor Biak sebesar 71,86.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Kinerja Logistik Hasil Perikanan sebesar semula Rp45.767.163.000,-, dan sampai dengan periode tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp44.728.333.262,- atau setara dengan 97,73%, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp1.038.829.738. Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 102,16% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 97,73%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan Ditjen PDSPKP dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Logistik Hasil Perikanan (IKLI) selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Penguatan Regulasi SLIN

- 1) Rapat terkait penguatan SLIN dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2024, dihadiri oleh Tim Pustral UGM (Joewono Soemardjito dan Dwi Ardinata K).
- 2) Rapat Pembahasan Data Penyusunan Regulasi *Public Service Obligation* (PSO) dilaksanakan secara luring pada tanggal 12 November 2024. Tujuan rapat untuk pembahasan data

Penyusunan Kajian Ekonomi Dalam Rangka Penerapan PSO Logistik Ikan Dalam Negeri.

- 3) Dalam rangka koordinasi kelompok kerja daerah Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN), telah dilaksanakan secara daring dan luring pada tanggal 9 Desember 2024, kegiatan rapat fokus membahas membahas koordinasi kelompok kerja daerah Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN).
- b. Penyusunan Rekomendasi Pengendalian Pemasukan Hasil Perikanan. Rapat koordinasi Dewan Pengarah INSW Tahun 2024 diselenggarakan pada Kamis, 12 Desember 2024 bertempat di Ruang Graha Sawala, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- c. Kemitraan dalam rangka pengadaan, penyimpanan dan distribusi:
 - 1) Rapat Pembahasan Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Studi Kelayakan Kebutuhan Penyediaan Kapal Angkut Ikan Tahun 2024, pada hari Kamis, 10 Oktober 2024 melalui *Zoom Meeting*. Tujuan Rapat yaitu Pembahasan *draft* Laporan Pendahuluan Penyusunan Studi Kelayakan Kebutuhan Penyediaan Kapal Angkut Ikan Tahun 2024;
 - 2) Rapat Koordinasi Penerapan CDIB dan Penerbitan SPDI yg dilaksanakan oleh Timja Pengadaan dan Distribusi, Dit. Logistik di ruang rapat Dit. Logistik tanggal 19 November 2024;
 - 3) Melaksanakan Coaching Clinic Pembinaan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) kepada Tim Teknis Pembinaan CDIB dan seluruh JFT Pembina Mutu serta Asisten Pembina Mutu Lingkup Ditjen PDSPKP untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman dan memberikan pembekalan dalam penerapan CDIB.

d. Implementasi Sistem Telusur dan Logistik Ikan Nasional (STELINA):

- 1) Interkoneksi STELINA dan *Health Certificate* (HC) dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2024. Rapat dipimpin Katimja Pemantauan, dihadiri oleh perwakilan Tim Kerja Program dan Data Sekretariat BPPMHKP, perwakilan Tim Kerja Data dan Layanan Publik Setditjen PDSPKP, perwakilan PT. Dua Empat Tujuh, serta perwakilan Timja lingkup Direktorat Logistik. Tujuan Rapat adalah melakukan pencermatan data HC untuk interkoneksi ke STELINA.
- 2) Sosialisasi Implementasi Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2024. Rapat dihadiri oleh Perwakilan lingkup Ditjen PDSPKP, Setditjen Perikanan Budidaya, Ditjen PSDKP, Pangkalan PSDKP Jakarta, PPS Nizam Zachman, Dinas KPKP Prov. Jakarta, Sahabat Laut Lestari, PT. Dua Empat Tujuh. Tujuan dilaksanakannya adalah Diseminasi Peraturan MKP Nomor 32 tahun 2024 tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional, menggantikan Peraturan MKP Nomor 29 tahun 2021 serta Pengenalan STELINA v2.

e. Implementasi Resi Gudang

- 1) Rapat Pembahasan Finalisasi Petunjuk Teknis Sistem Resi Gudang (SRG) dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2024.
- 2) Rapat Pengusulan LPK Sertifikasi Mutu Sistem Resi Gudang yang dilaksanakan bertempat di Ruang Rapat Akses Pasar, Gedung Mina Bahari III, Lantai 15 pada tanggal 2 Desember 2024. Tujuannya untuk membahas mekanisme perpanjangan SK LPK untuk Sertifikasi Manajemen Mutu (SKP) dan Sertifikasi Gudang dalam Sistem Resi Gudang (SRG) kepada BAPPEBTI.

f. Bantuan Pemerintah dalam bentuk Gudang Beku

- 1) Pengadaan gudang beku *portable* merupakan tempat penyimpanan hasil perikanan pada suhu tertentu dengan atau tanpa *Air Blast Freezer* yang dilengkapi pondasi, atap/rumah pelindung, genset dan peralatan pendukung, memenuhi persyaratan sarana untuk berproduksi yang baik, penerapan sanitasi higienis, mudah dalam pemasangan, dan dapat dipindahkan. Sarana distribusi logistik produk KP, dan sarana distribusi logistik produk KP mendukung Korporasi merupakan kendaraan roda empat dan/atau roda enam yang dilengkapi dengan boks berinsulasi dan mesin pendingin yang berfungsi menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan selama dalam pengangkutan dan pendistribusian. Pengadaan gudang beku *portable* dan Sarana distribusi logistik produk KP tahun 2024 pada tahun 2024 ditargetkan masing-masing sebanyak 10 Unit, sampai dengan periode Desember 2024 telah teralisasi pengadaan Gudang Beku Portabel dan Kendaraan Berefrigerasi masing-masing sebanyak 10 unit dengan sebaran lokasi Gudang Beku Portabel yaitu: Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kota Baubau, Kota Jakarta Selatan, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Garut, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Tangerang. Adapun sebaran Kendaraan Berefrigerasi adalah sebagai berikut: Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Pati, Kabupaten Lebak, Kabupaten Halmahera Selatan, Kota Jakarta Selatan, Kabupaten Garut, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Kebumen.

- 2) Bimbingan Teknis Dasar dasar pembekuan dan penyimpanan ikan Beku dan pemeliharaan Sistem Pendingin di Gudang Beku Portabel Bantuan Pemerintah pada tanggal 18-20 Desember 2024 di Asoka Resort Tanjung lesung Pandegelang. Bimtek di buka oleh Direktur Logistik secara daring diikuti oleh Katimja Prasar dan peserta bimtek. Tujuan: memberikan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman staf khususnya di Ditjen PDSPKP tentang penanganan ikan dan sistem pendingin. Peserta: 40 orang berasal dari Ditlog, Perwakilan dari Eselon 2 lingkup Ditjen PDS, Pengelola PPI Binuangen, Penyuluh Perikanan Kab Lebak, Dinas KP Kab Lebak.



Gambar 41. Bimbingan Teknis Dasar dasar pembekuan dan penyimpanan ikan Beku dan pemeliharaan Sistem Pendingin di Gudang Beku Portabel Bantuan Pemerintah

g. Sosialisasi *Warehouse Management System* (WMS)

- 1) Sosialisasi sistem informasi pengelolaan *cold storage* (sip-cs) yang dilaksanakan secara hybrid pada tanggal 18 Desember 2024 di UPTD PSDKP Wilayah Utara di Cirebon. Kegiatan dibuka oleh Ketua Tim Kerja Penyimpanan dihadiri oleh Pengelola *Cold storage*. Pengadaan melalui Tugas Pembantuan (TP) dan Pusat tahun 2013-2024, Perwakilan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota/Provinsi dan perwakilan Kepala Pelabuhan Perikanan. Tujuan sosialisasi adalah untuk mengenalkan pembaruan system informasi pengelolaan *cold storage* (SIP-CS) kepada pengguna dan sekaligus mensosialisasikan kepada Dinas KP agar mendorong pengelola *cold storage* baik melalui bantuan pemerintah maupun swasta agar memanfaatkan aplikasi sistem informasi pengelolaan gudang beku.



Gambar 42. Kegiatan Sosialisasi WMS

- 2) Melaksanakan monitoring pemanfaatan BP *Cold storage* di Kota Pekalongan tanggal 11 Oktober 2024. Kegiatan selain bertujuan untuk memantau kondisi pemanfaatan BP, pada saat bersamaan juga dilaksanakan penandatanganan kemitraan dalam rangka penyimpanan antara pedagang ikan dengan Koperasi Jasa Sukses Mina Bahari sebagai pengelola CS.
- 3) Pertemuan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan BP gudang beku pada tanggal 19 Desember 2024 secara hybrid

di Kota Cirebon. Kegiatan mengundang para pengelola gudang beku dan Dinas pendamping untuk mengetahui kondisi pemanfaatan BP terkini serta meningkatkan kapasitas pengelola melalui materi yang disampaikan oleh Narasumber terkait SKP, CDIB, dan pemeliharaan ringan mesin pendingin.



Gambar 43. Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan BP Gudang Beku

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja logistik sebesar Rp 45.767.163.000,- dan sampai dengan periode tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp 44.728.333.262,- atau setara dengan 97,73%, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 1.038.829.738,-

6. Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program

Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program menunjukkan jumlah realisasi pembiayaan kredit program yang disalurkan oleh lembaga perbankan dan lembaga keuangan bukan bank (non bank) kepada UMKM kelautan dan perikanan (KP). Ditjen PDSPKP terus berupaya mendorong peningkatan nilai pembiayaan usaha KP dengan melakukan pemantauan penyaluran kredit program dari perbankan yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan pembiayaan dari lembaga keuangan non bank yaitu

pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang disalurkan oleh Holding Ultra Mikro, salah satunya yaitu PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Mekaar. Berbagai kegiatan strategis dilakukan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha KP, diantaranya fasilitasi akses pembiayaan melalui pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) baik di pusat maupun daerah, pendampingan usaha, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyaluran kredit program.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program pada tahun 2024 sebesar Rp 10,26 triliun. Untuk mencapai target tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) terus berupaya mendorong peningkatan realisasi Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program, antara lain: Pembentukan POKJA Kredit Program Kelautan dan Perikanan, Koordinasi dan sinergi secara berkala dengan lembaga keuangan bank dan nonbank, Fasilitasi Akses Pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan dan sosialisasi, pembinaan dan fasilitasi akses kredit sektor kelautan dan perikanan melalui kegiatan Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA).

Tabel 11. Ikhtisar Pencapaian Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2024 (7)	Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN (8)
Pembiayaan usaha kelautan dan	2024	10,26	7,77	75,73	10.26	7,77	75,73
	2023	6,33	7,37	116,43			
	2022	8,98	10,49	116,82			

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2024 (7)	Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN (8)
perikanan melalui kredit program (Rp. Triliun)	2021	5,50	8,56	155,64			
	2020	3,00	5,45	181,67			

Sumber : SIKP, Kemenkeu dan PT. PNM, diolah Ditjen PDSPKP

Realisasi pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program pada tahun 2024 sebesar Rp 7,77 triliun. Capaian tersebut setara dengan 75,73% dari target tahun 2024 dan target RPJMN sebesar Rp 10,26 triliun. Jika dibandingkan realisasi dan capaian pada tahun 2023 sebesar Rp 7,37 triliun dan capaian 116,43% dari target Rp 6,33 triliun, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,43%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar -34,96%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2022 sebesar Rp 10,49 triliun dan capaian 116,82% dari target Rp 8,98 triliun, maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar -25,93%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan -35,17%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2021 sebesar Rp 8,56 triliun dan capaian 155,64% dari target Rp 5,50 triliun, maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar -9,23% sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan -51,34%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2020 sebesar Rp 5,45 triliun dan capaian 181,67% dari target Rp 3,00 triliun, maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 42,57% sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan -58,31%.

Realisasi pembiayaan usaha KP melalui Kredit Program pada tahun 2024 mencapai Rp 7,77 triliun yang disalurkan kepada

296.573 pelaku usaha KP. Realisasi pembiayaan ini terdiri atas Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 6,94 triliun yang disalurkan kepada 134.213 pelaku usaha, dan Kredit Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp 836 miliar yang disalurkan kepada 162.360 pelaku usaha.

Tabel 12. Rincian Pembiayaan Kredit Program di Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

No	Kredit Program	Nilai (Rupiah)	Debitur (Pelaku Usaha)	% thd Total Nilai
1	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	6,938,496,476,000	134,213	89,24
2	Kredit Ultra Mikro (UMi)	836,243,590,958	162,360	10,76
	Total	7,774,740,066,958	296,573	100

Sumber data: SIKP, Kemenkeu dan PT. PNM, 31 Desember 2024, diolah

Kontribusi KUR terhadap nilai pembiayaan usaha sektor KP mencapai 89,24% dari capaian pembiayaan sektor KP. Realisasi KUR sektor KP pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 6,94 triliun, tumbuh sebesar 2,88% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp 6,74 triliun. Demikian pula dengan jumlah penerima KUR sebanyak 134.213 debitur pada tahun 2024, tumbuh sebesar 2,73% dibandingkan tahun 2023 sebanyak 130.644 debitur. Sementara untuk nilai kredit Ultra Mikro (UMi) dibandingkan dengan tahun 2023 tumbuh sebesar 32,66% dari Rp 630 miliar dan untuk jumlah debiturnya tumbuh sebesar 40,57% dari 115.499 debitur. Jika dibandingkan dengan KUR nasional sebesar Rp 292,22 triliun, maka KUR sektor KP memiliki kontribusi sebesar 2,37% terhadap total penyaluran KUR secara nasional.

Realisasi nilai pembiayaan sektor kelautan dan perikanan berdasarkan bidang usaha adalah sebagaimana terlampir pada tabel berikut:

Tabel 13. Realisasi nilai pembiayaan sektor kelautan dan perikanan

No	Bidang usaha	Debitur		Nilai		Growth			
		sd 24 Des 2024	sd Des 2023	sd 24 Des 2024	sd Des 2023	Debitur	Nilai	% Debitur	% Nilai
1	Budidaya	89,022	72,224	2,580,468,746,822	2,644,735,300,521	16,798	(64,266,553,699)	23.26%	-2.43%
2	Penangkapan Ikan	149,430	120,588	2,175,939,944,136	1,980,900,982,003	28,842	195,038,962,133	23.92%	9.85%
3	Jasa Perikanan	10,173	9,122	493,461,750,000	470,251,593,000	1,051	23,210,157,000	28158.33%	4.94%
4	Pergaraman	103	76	12,781,000,000	8,986,500,000	27	3,794,500,000	-98.56%	42.22%
	Total Hulu	248,728	202,010	5,262,651,440,958	5,104,874,375,524	46,718	157,777,065,434	23.13%	3.09%
5	Perdagangan Hasil Perikanan	44,551	40,398	2,325,148,476,000	2,087,446,337,009	44,478	2,316,411,476,000	60928.77%	26512.66%
6	Pengolahan Hasil Perikanan	3,294	3,735	186,940,150,000	182,537,600,000	3,131	166,386,150,000	1920.86%	809.51%
	Total Hilir	47,845	44,133	2,512,088,626,000	2,269,983,937,009	47,609	2,482,797,626,000	107.88%	109.38%
	Total Kelautan dan Perikanan	296,573	246,143	7,774,740,066,958	7,374,858,312,533	50,430	399,881,754,425	20.49%	5.42%

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator pembiayaan usaha sektor kelautan dan perikanan melalui kredit program yaitu:

- Kegiatan Fasilitasi Akses Pembiayaan di Kabupaten Bogor, dihadiri oleh 60 peserta yang pengolah dan pemasar, penyuluh perikanan, dan aparat Dinas dari Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok.
- Kegiatan Fasilitasi Akses Pembiayaan di Nusa Tenggara Barat pada tanggal 28 November 2024, dihadiri oleh 139 orang yang terdiri dari nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar, penyuluh perikanan, serta aparat

Dinas Kelautan dan Perikanan dari Provinsi NTB, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Tengah.

- c. Rapat koordinasi kelompok kerja akselerasi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah pada tanggal 10 Desember 2024, dihadiri oleh perwakilan dari PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Mandiri, PT. BNI, PT. BSI, PT. Pegadaian, Biro Perencanaan Setjen KKP, BLU LPUMKP, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan DJPT, Pusat Penyuluhan BPPSDM, Direktorat Ikan Air Payau DJPB, Setdtjen PDSPKP, dan Direktorat Pemberdayaan Usaha
- d. Pertemuan Bimbingan Teknik Fasilitasi Pembiayaan dan Layanan Gerai Investasi dan Layanan Usaha di Karawang pada tanggal 25 November 2024, dihadiri oleh sekitar 110 peserta yang terdiri dari perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten Karawang, penyuluh dan pelaku UMKM pengolah dan pemasar yang telah dikurasi dan yang belum dikurasi.



Gambar 44. Bimbingan Teknik Fasilitasi Pembiayaan dan Layanan Gerai Investasi dan Layanan Usaha di Karawang

- e. Pertemuan bimbingan teknik fasilitasi Pembiayaan dan Layanan Gerai Investasi dan Layanan Usaha di Bekasi, tanggal 22 November 2024, dihadiri oleh sekitar 110 peserta yang terdiri dari perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi, Dinas Perikanan Kota Bekasi,

penyuluh dan pelaku UMKM pengolah dan pemasar yang telah dikurasi dan yang belum dikurasi.



Gambar 45. Bimbingan teknik fasilitasi Pembiayaan dan Layanan Gerai Investasi dan Layanan Usaha di Bekasi

- f. Bimbingan teknis kelembagaan Kelembagaan Usaha Subsektor Pengolahan dan Pemasaran untuk Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta pada tanggal 1-3 Oktober Desember 2024, dihadiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan bimtek bekerja sama dengan PT. Breto Inovasi Indonesia sebagai narasumber/pelatih.



Gambar 46. Bimbingan Teknis kelembagaan Kelembagaan Usaha Subsektor Pengolahan dan Pemasaran untuk Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta

- g. Pembahasan Rancangan Pedoman Umum Penguatan Kelembagaan Usaha Kelautan dan Perikanan Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran Ikan pada tanggal 16 Oktober 2024, dihadiri oleh perwakilan USAID Ber-IKAN, PT Breto Inovasi Indonesia, Perwakilan Tim Kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, dan Pelaksana Tim Kerja Kelembagaan-Direktorat Pemberdayaan Usaha.



Gambar 47. Pembahasan Rancangan Pedoman Umum Penguatan Kelembagaan Usaha Kelautan dan Perikanan Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran Ikan

- h. Rapat Pra-Pendirian Lembaga Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen pada tanggal 29 Oktober 2024, dihadiri oleh calon pengurus, calon pengawas, calon anggota koperasi, perwakilan dinas perikanan kabupaten Kebumen serta perwakilan dinas koperasi Kabupaten Kebumen.



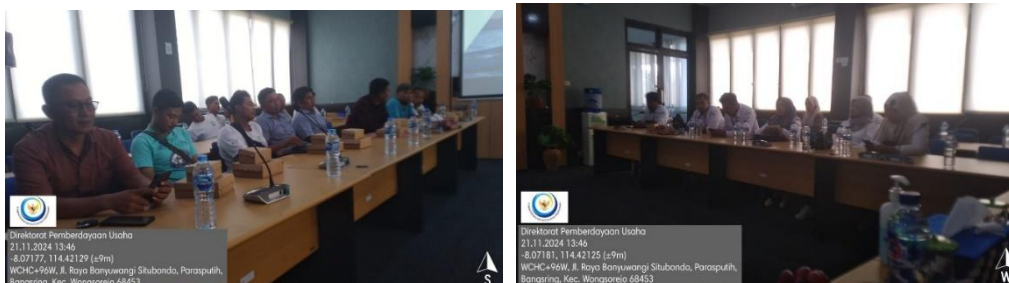
Gambar 48. Pra-Pendirian Lembaga Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen

- i. Rapat Pra-Pendirian Lembaga Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang pada tanggal 5 November 2024, dihadiri oleh Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Batang, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang, Penyuluh Perikanan Kabupaten Batang, Kelompok/calon koperasi Samudera Mandiri Sejahtera, dan Tim Kerja Kelembagaan - Direktorat Pengembangan Usaha.



Gambar 49. Pra-Pendirian Lembaga Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang

- j. Rapat Pra-Pendirian Lembaga Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 21 November 2024



Gambar 50. Pra-Pendirian Lembaga Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi

- k. Pemberdayaan Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan Menuju UMKM naik kelas pada tanggal 12 November 2024, dihadiri oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Dan Kabupaten/Kota serta UMKM dan koperasi yang berasal dari pasuruan dan daerah sekitarnya.



Gambar 51. Pemberdayaan Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan Menuju UMKM naik kelas

1. Koordinasi Dalam Rangka Sosialisasi Dan Pendampingan Kepada Koperasi Dan Pelaku Usaha Untuk Menjadi Mitra BGN dan Mendaftar e-katalog pada tanggal 21 Desember 2024. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2024 di RR. EDTC, PKSPL-IPB, Bogor. Pertemuan dibuka oleh Direktur Pemberdayaan Usaha dan dihadiri oleh 287 peserta baik yang hadir secara *offline* maupun

online yang terdiri dari koperasi dan pelaku usaha (PT, CV, maupun UMKM lainnya).



Gambar 52. Sosialisasi Dan Pendampingan Kepada Koperasi Dan Pelaku Usaha Untuk Menjadi Mitra BGN

m. Kegiatan Pra Usaha dalam rangka penciptaan wirausaha baru adalah temu bisnis inventor MPHPI dengan Investor Potensial dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2024. Turut Mengundang investor potensial PT. Fortune Pasific Capital, BRI Venture, Synergy & Innovation, BNI Centure dan ANGIN (*Angel Investment Network Indonesia*). Tujuan dilaksanakan kegiatan temu bisnis untuk penjangkaran minat investor dengan mitra potensial sesuai dengan bidang usaha yang di usulkan.



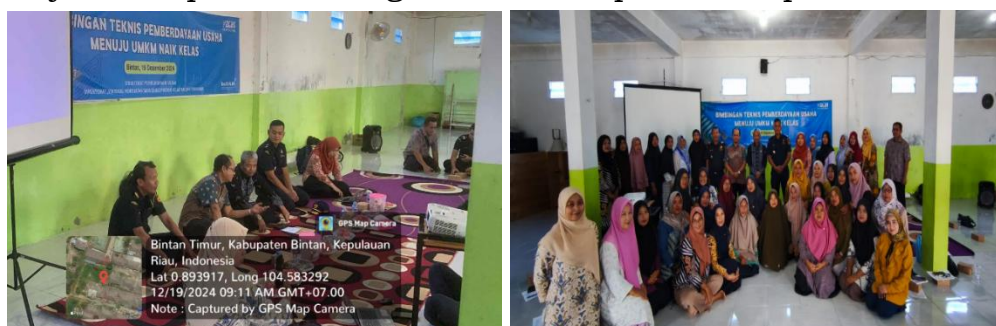
Gambar 53. Kegiatan Pra Usaha dalam rangka penciptaan wirausaha baru

- n. Kegiatan pendampingan wirausaha di Kabupaten Pasuruan, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 November 2024. Bentuk pembinaan dilakukan kepada 200 UMKM wirausaha perikanan. Kegiatan pendampingan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan UMKM, memberikan layanan konsultasi bagi UMKM, mengakselerasi UMKM agar naik kelas.



Gambar 54. Pendampingan wirausaha di Kabupaten Pasuruan

- o. Kegiatan pembinaan dan pendampingan Wirausaha KP di Kabupaten Bintan, dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2024. Bentuk pembinaan dilakukan kepada 50 orang pengolah kerupuk ikan yang berasal dari Sei Lekop dan dihadiri narasumber praktisi dari Universitas Maritim Raja Ali dan Bea Cukai Tanjung Pinang. Tujuan bimtek adalah memberikan pendampingan kepada pelaku usaha agar siap menuju pasar Malaysia dan Singapura dan mampu menyusun laporan keuangan berbasis aplikasi si apik.



Gambar 55. Pembinaan dan pendampingan Wirausaha KP di Kabupaten Bintan

Realisasi pembiayaan kredit program sektor kelautan dan perikanan tahun 2024 tidak tercapai sesuai target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Adanya perubahan kebijakan suku bunga KUR dari 3% menjadi 6% dan akan meningkat 1% setiap pengajuan top up kredit berdasarkan Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023.
- b. Turunnya pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan konsumsi dari di atas 5% menjadi di bawah 5%, berdampak melemahnya daya beli masyarakat sehingga mempengaruhi usaha produksi dan membuat pelaku usaha menahan untuk mengakses kredit untuk usahanya.
- c. Adanya penurunan target KUR nasional pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi pada semester 1 tahun 2024, dengan target Rp300 Triliun turun menjadi Rp280 Triliun atau naik sebesar 7,69% dari realisasi KUR tahun 2023 sebesar Rp260,06 Triliun.
- d. Pelaku usaha yang masih belum *bankable* dalam skema pembiayaan dan kelayakan usaha.

Upaya yang dilakukan dalam rangka mendorong pencapaian nilai pembiayaan usaha KP melalui kredit program yaitu sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan sinergi kegiatan dengan lembaga keuangan Bank, Non Bank dan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan akses pembiayaan untuk mendukung program prioritas KKP, serta optimalisasi pemanfaatan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan untuk dapat difasilitasi kredit program.
- b. Edukasi, sosialisasi dan fasilitasi akses pembiayaan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui kegiatan sosialisasi dan fasilitasi akses pembiayaan.

- c. Identifikasi dan verifikasi calon debitur potensial dalam rangka persiapan kegiatan fasilitasi akses permodalan.
- d. Upaya pembentukan klaster pembiayaan di Kawasan Kampung Nelayan Modern, Kampung Budidaya dan sentra pengolahan dan pemasaran kelautan dan perikanan.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator pembiayaan usaha kelautan dan perikanan sebesar Rp 14.056.989.000,- dan sampai dengan tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp 13.916.920.000,- atau setara dengan 99%, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 140.069.000,-

7. Nilai PNBP Ditjen PDSPKP

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan usaha dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Tabel 14. Ikhtisar Pencapaian Nilai PNBP Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2024 (7)	Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN (8)
Nilai PNBP Ditjen PDSPKP	2024	7,62	9,35	122,68	7,62	9,35	122,68
	2023	8,65	15,22	175,95			
	2022	5,34	6,94	129,96			

(Rp. Miliar)	2021	-	-	-			
	2020	-	-	-			

Nilai PNBPN Ditjen PDSPKP pada tahun 2024 mencapai Rp 9,35 miliar. Capaian tersebut setara dengan 122,68% dari target tahun 2024 dan target RPJMN sebesar Rp 7,62 miliar. Jika dibandingkan realisasi dan capaian pada tahun 2023 sebesar Rp 15,22 miliar dan capaian 175,95% dari target 8,65, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar -38,57, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar -30,28%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2022 sebesar Rp 6,94 miliar dan capaian 129,96% dari target 5,34, maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 34,73%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan -5,60%. Pada tahun 2024, Ditjen PDSPKP telah melakukan penyampaian laporan yang sudah disahkan kepada Biro Keuangan dan KKP dan Inspektorat Jenderal KKP secara berkala.

Nilai PNBPN tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan nilai PNBPN 2023. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2023 terdapat Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin yaitu Penjualan Kapal Silver Sea sebesar Rp 5,4 miliar, sehingga PNBPN pada tahun 2023 lebih tinggi daripada tahun 2024.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2024 dihitung berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 dan PMK 115 Tahun 2020. Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2024 adalah Rp 9.354.525.348,- yang terdiri dari:

- A. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 adalah Rp 7.193.843.571,- yang terdiri dari:

- a. Akun 425151, adalah Rp 6.930.501.171,- atas sewa aquarium, sewa ruangan kegiatan pengolahan dan pemasaran serta atas jasa sewa mobil.
 - b. Akun 425289, adalah Rp 263.342.400,- atas Jasa Pengujian, Sertifikat, Kalibrasi, dan Standarisasi.
- B. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan PMK 115 Tahun 2020 adalah Rp 1.005.167.833,- yang terdiri dari:
- a. Akun 425131, Jasa Penggunaan Sarana Ruang Penyimpanan Beku (*Cold storage* 1000 ton), *plugging container*, Jasa Penggunaan Sarana Ruang Penyimpanan Beku (*Cold storage*) Ruang Pembekuan (ABF) 2.000 ton, dan Pasar Ikan Modern Muara Baru sebesar Rp 910.157.224,-
 - b. Akun 425132, Jasa Penggunaan Sarana Mobil Berpendingin R6, R4 dan Up sebesar Rp 95.010.609,-
- C. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya adalah Rp 1.155.513.944,- yang terdiri dari:
- a. Akun 425129, Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp 48.619.000,-
 - b. Akun 425811, Pendapatan Denda Penyelsaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp 52.081.740,-
 - c. Akun 425912, Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp 393.602.992,-
 - d. Akun 425122, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 642.981.248,-
 - e. Akun 425911, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp 16.799.906,-
 - f. Akun 425839, Pendapatan Denda Lainnya sebesar Rp 1.429.058,-

8. Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik baik di bidang logistik hasil kelautan dan perikanan, pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pemasaran hasil kelautan dan perikanan, Pemberdayaan Usaha dan pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan.

Tabel 15. Ikhtisar Pencapaian Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2024 (7)	Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN (8)
Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (Orang)	2024	66.000	66.045	100,07	66.000	66.045	100,07
	2023	49.600	52.428	105,70			
	2022	38.779	43.319	111,71			
	2021	-	-	-			
	2020	-	-	-			

Realisasi Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP pada periode tahun 2024 mencapai 66.045 orang atau setara dengan 100,07% terhadap target periode tahun 2024 sebesar 66.000 orang. Jika dibandingkan realisasi dan capaian pada tahun 2023 sebesar 49.600 dan capaian 105,70% dari target 49.600, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 25,97%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar -5,33%. Jika

dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2022 sebesar 43.319 dan capaian 111,71% dari target 38.779, maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 52,46%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan -10,42%.

Data capaian tenaga kerja yang terlibat dalam sektor penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan periode triwulan IV tahun 2024 diperoleh dari jumlah seluruh orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat dari kegiatan bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yaitu:

1. Tenaga kerja yang terlibat di bidang pemasaran hasil kelautan dan perikanan adalah 15.526 orang dari target 15.286 orang atau setara 100%;
2. Tenaga kerja yang terlibat di bidang pengolahan adalah 38.159 orang dari target 38.159 orang atau setara 100%;
3. Tenaga kerja yang terlibat di bidang Pemberdayaan Usaha kelautan dan perikanan adalah 10.770 orang dari target 10.770 orang atau setara 100%;
4. Tenaga kerja yang terlibat di bidang logistik kelautan dan perikanan adalah 1.100 orang dari target 1.100 orang atau setara dengan 100%. Tenaga kerja ini diperoleh dari anggota koperasi/kelompok penerima bantuan pemerintah;
5. Tenaga kerja yang terlibat di bidang pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan adalah 730 orang dari target 685 orang atau setara dengan 106,57%.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 123.588.418.000,- dan sampai dengan tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp

122.981.206.820. Realisasi ini setara dengan 99,51%, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 607.211.180,-. Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 100,07% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,51%. Penghitungan realisasi tenaga kerja berasal dari realisasi atas kegiatan bantuan pemerintah, bimbingan teknis, pembinaan dan lainnya yang melibatkan pelaku usaha KP.

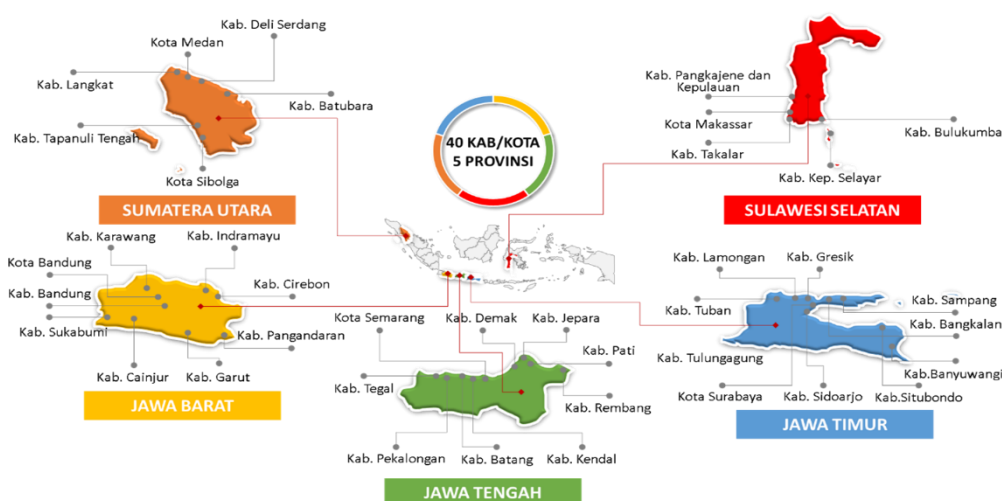
Sasaran Program 4. Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan Meningkat

9. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)

Salah satu sasaran strategis pembangunan penguatan daya saing produk KP tahun 2020-2024 adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pengolah hasil perikanan. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) meningkat dari 103,75 pada tahun 2020 menjadi 104,75 pada tahun 2024.

NTPHP berfokus pada rasio antara Indeks Harga yang Diterima (IT) oleh pengolah hasil perikanan dengan Indeks Harga yang Dibayar (IB) oleh pengolah hasil perikanan. Secara konsep, jika nilai Indeks yang Diterima (IT) lebih besar dari Indeks yang Dibayarkan (IB) maka nilai NTPHP >100, dan akan berlaku sebaliknya. NTPHP mencerminkan perubahan dalam tingkat profitabilitas dan taraf hidup pengolah perikanan dari sisi perubahan harga dan bukan pada pendapatan pengolah perikanan. Kesejahteraan ekonomi pelaku usaha perikanan pada umumnya diukur dengan besar atau kecilnya pendapatan yang diterima oleh pengolah hasil perikanan. Sehingga NTPHP belum dapat mencerminkan kesejahteraan pengolah hasil perikanan secara utuh.

Keterwakilan NTPHP adalah Rumah Tangga Pengolah Ikan Skala Mikro dan Kecil untuk 6 (enam) kelompok jenis pengolahan yaitu Penggaraman/Pengeringan, Pemanggangan/pengasapan, Fermentasi, Pelumatan daging ikan, Pemindangan, Pengolahan lainnya dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh 40 Kabupaten/Kota pada 5 (lima) Provinsi (Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan). Keterwakilan lokasi sampel tersebut sesuai dengan data Diagram Timbang (DT) yang disusun oleh BPS pada Tahun 2015.



Gambar 56. Lokasi Sampling Perhitungan NTPHP

Tabel 16. Ikhtisar Pencapaian Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2024* (7)	Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN (8)
Nilai Tukar Pengolah Hasil	2024	104,75	104,94	100,18%	104,75	104,94	100,18%
	2023	104,50	104,67	100,16%			
	2022	104,25	104,01	99,77%			

Periklanan (Indeks)	2021	104,00	104,58	100,55%			
	2020	103,75	103,95	100,19%			

* : Keterangan: Tahun berjalan pelaporan kinerja

Realisasi NTPHP pada tahun 2024 sebesar 104,94. Capaian tersebut setara dengan 100,18% dari target tahun 2024 dan target RPJMN sebesar 104,75. Jika dibandingkan realisasi dan capaian pada tahun 2023 sebesar 104,67 dan capaian 100,16% dari target 104,50, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 0,26%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar 0,22%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2022 sebesar 104,01 dan capaian 99,77% dari target 104,25, maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 0,89%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan -0,41%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2021 sebesar 104,58 dan capaian 100,55% dari target 104, maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 0,34% sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan -0,37%.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 36.635.477.000,- dan sampai dengan tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp 36.596.402.000,- Realisasi ini setara dengan 99,89%, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 39.075.000,- Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 100,18% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,89%.

Pada tahun 2024, Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, antara lain:

- a. Fasilitasi Sarana dan Prasarana pengolahan, meliputi:
 - 1) Pembangunan UPI bernilai tambah 1 unit di 1 lokasi

- 2) Penyediaan pabrik es *portable* 10 unit di 10 lokasi
 - 3) penyediaan *chest freezer* 311 unit di 92 lokasi
 - 4) penyediaan peralatan pengolahan 165 unit di 74 lokasi
 - 5) penyediaan sarana pasca panen 17 unit di 17 lokasi.
- b. Pembinaan Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan terhadap 1.800 UMKM. Kegiatan yang dilakukan meliputi:
- 1) Pelaksanaan asistensi *layout* UPI dan sentra pengolahan penerima DAK.
 - 2) Pelaksanaan pembinaan UPI mikro dan kecil melalui pemantauan langsung di lapangan dan pembinaan secara remote (jarak jauh) berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi/Kabupaten/Kota.
 - 3) Pembinaan kepada pengelola dan pelaku usaha pengolahan pada sentra pengolahan hasil perikanan.
 - 4) Pembinaan kepada pelaku usaha pengolahan melalui kegiatan klinik mutu.
 - 5) Pelaksanaan Webinar Halal.
 - 6) Melaksanakan kurasi produk UMKM dalam rangka UKM naik kelas.
 - 7) Webinar Cara Mudah Mendapatkan Legalitas Merek dan Ijin Edar MD.
 - 8) Webinar Susut Hasil Dalam Rantai Pasok Perikanan Bagi UPI Skala Mikro dan Kecil.
 - 9) Pembinaan bagi UPI MK sebagai tindak lanjut program UMK Naik Kelas (halal, IPRT, dan MD).
- c. Pembinaan Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan

Diversifikasi Produk terhadap 875 UMKM. Kegiatan yang telah dilakukan meliputi:

- 1) *Workshop* Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan;
- 2) Sosialisasi Fortifikasi HPI Pada Produk Olahan Pangan;
- 3) Sosialisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Perikanan;
- 4) Kampanye Protein Ikan Melalui Makan Bergizi Gratis Menu Ikan Dalam Rangka Hari Ikan Nasional.

d. Pembinaan Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar 500 industri. Kegiatan yang telah dilakukan meliputi:

- 1) Asistensi Perbaikan Peringkat PROPER;
- 2) Seminar *Catfish Day*;
- 3) Pembahasan kajian/ *policy brief* hilirisasi tuna.

e. Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) sebanyak 10.000 Produk. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- 1) Rapat Koordinasi Pembinaan Mutu bagi UPI Skala Mikro Kecil;
- 2) Bimbingan Teknis Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- 3) Sertifikasi ISO 9001:2025 untuk sistem Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

f. Penyediaan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan sebanyak 15 produk. Kegiatan yang telah dilakukan meliputi:

- 1) Perumusan 9 RSNI Produk perikanan meliputi RSNI Bandeng duri lunak, RSNI Bandeng isi, RSNI Cara uji fisik – Bagian 8: Penentuan berat bersih dan berat tuntas produk perikanan sterilisasi komersial, RSNI Hidrolisat protein ikan, RSNI Ikan

- asap dengan pengasapan dingin, RSNI Ikan renyah, RSNI Kerupuk ikan, udang dan moluska, RSNI Kukis ikan, moluska, krustasea, dan ekinodermata, RSNI Cara uji kimia – Bagian 24: Penentuan timah (Sn) pada produk perikanan dengan Hidrida Generator-Spektrometri Serapan Atom (HG-SSA).
- 2) Perumusan RSNI Produk perikanan meliputi RSNI Ikan hias rainbow (*Melanotaenia* spp.) – Syarat mutu dan penanganan, RSNI Ikan hias maskoki (*Carassius auratus*) – Syarat mutu dan penanganan, RSNI Tanaman hias air mikrosorum (*Microsorium pteropus*) – Syarat mutu dan penanganan, RSNI Ikan hias cardinal tetra (*Paracheirodon axelrodi*) – Syarat mutu dan penanganan, RSNI Ikan hias gupi (*Poecilia reticulata*) – Syarat mutu dan penanganan dan RSNI Spirulina (*Arthrospira* spp.) kering – Syarat mutu dan pengolahan.
 - 3) Disamping itu, telah dilakukan langkah-langkah akselerasi penerapan SNI produk perikanan meliputi: a). Pembinaan dan pendampingan penerapan SNI; b). Talkshow peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan melalui penerapan SNI; c). Fasilitasi pengujian untuk pemenuhan persyaratan pengajuan sertifikat kesesuaian; dan d). Monitoring dan evaluasi penerapan SNI wajib dan Sukarela.

Sasaran Program 4. Terkelolanya Pemerintahan Yang Baik Mendukung Penguatan Daya Saing KP

10. Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Ditjen PDSPKP

WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi

syarat hasil penilaian indikator pengungkit dan indikator hasil lebih besar atau sama dengan 75 serta memenuhi syarat lain berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Piagam Penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

WBK merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi minimal 60% pada komponen pengungkit yang terdiri dari aspek pemenuhan dan aspek reform dengan area pembangunan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik. Selain itu unit kerja harus memenuhi komponen hasil “Birokrasi yang bersih dan akuntabel” minimal 18,25 dan komponen hasil “Pelayanan publik yang prima” minimal 14,00 atau skor survei minimal 3,20.

Penilaian Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK berpedoman pada Lembar Kerja Evaluasi yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan.

Tabel 17. Ikhtisar Pencapaian Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Ditjen PDSPKP

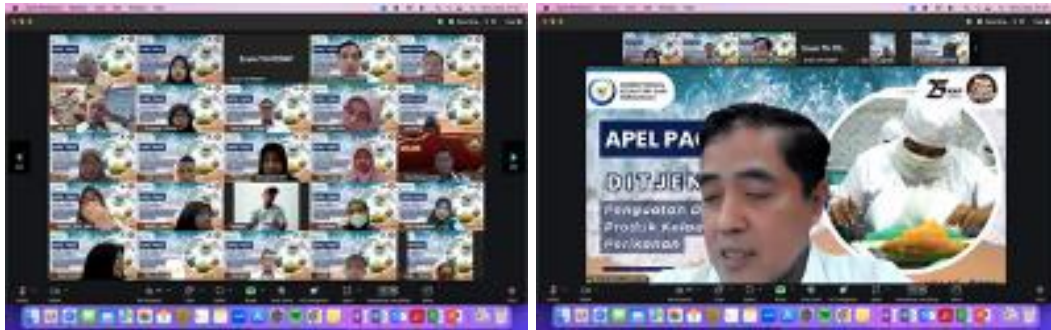
Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2024 (7)	Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN (8)
Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Ditjen PDSPKP (Unit)	2024	2,00	2,00	100	2,00	2,00	100
	2023	4,00	5,00	125			
	2022	3,00	3,00	100			
	2021	3,00	3,00	100			
	2020	2,00	2,00	100			

Pada tahun 2024, Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK lingkup Ditjen PDSPKP ditargetkan sebanyak 2 unit kerja. Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang telah memperoleh predikat menuju WBK dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan tahun 2024 berjumlah 5 unit kerja yaitu Direktorat Logistik, Direktorat Pemberdayaan Usaha, Direktorat Pengolahan, Direktorat Pemasaran dan Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP).

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian ini sebesar Rp 2.068.204.000,- dan sampai dengan tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp 199.130.000,- atau setara dengan 96,66%, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 69.074.000,-. Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 100% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 96,66%.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Pelaksanaan Apel Pagi dan Briefing Reformasi Birokrasi oleh seluruh unit kerja eselon II lingkup Ditjen PDSPKP secara berkala setiap hari senin dan diikuti oleh seluruh pegawai;



Gambar 57. Apel Pagi Lingkup Ditjen PDSPKP

- b. Melaksanakan Bimbingan Teknis Pengenalan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada tanggal 1 Oktober 2024. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemantapan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dalam upaya meningkatkan integritas Aparatur Sipil Negara serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tujuan pelatihan Pengenalan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yaitu untuk Memahami risiko korupsi di Indonesia, definisi suap dan gratifikasi dan Memahami Klausul-Klausul SNI ISO 37001:2016 SMAP.



Gambar 58. Bimbingan Teknis Pengenalan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

- c. Pemantauan Zona Integritas pada BBP3KP pada tanggal 14 dan 15 November 2024. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Surat Inspektorat Jenderal Nomor B.296/ITJ/KP.730/IX/2024 perihal Hasil Seleksi Pemantauan Keberlanjutan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KKP Tahun 2024 bahwa perlu dilakukan pemantauan kembali pembangunan Zona Integritas pada BBP3KP.
- d. Pemantauan Zona Integritas pada Direktorat Pemberdayaan Usaha pada tanggal 22 dan 25 November 2024. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan Zona Integritas lingkup Ditjen PDSPKP bahwa perlu dilakukan pemantauan kembali pembangunan Zona Integritas pada Direktorat Pemberdayaan Usaha.
- e. Koordinasi Tindak Lanjut Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PDSPKP pada tanggal 29 – 30 November 2024. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti rencana pembantuan UPT pasca terbitnya rekomendasi persetujuan Gubernur Jawa Timur atas pembentukan UPT Ditjen PDSPKP yaitu Balai Standardisasi dan Pengujian Produk Garam yang berlokasi di Pamekasan.
- f. Internalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan tema “Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pelayanan Ditjen PDSPKP” pada tanggal 3 Desember 2024. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) dan pemantapan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dalam upaya mewujudkan budaya kerja dan meningkatkan integritas ASN Ditjen PDSPKP.



Gambar 59. Internalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

11. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Tabel 18. Ikhtisar Pencapaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2024 (7)	Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN (8)
Nilai Maturitas Struktur dan	2024	3,30	4,07	123,33	3,30	4,07	123,33
	2023	3,10	3,83	123,55			
	2022	3,00	3,00	100,00			

Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP (Nilai)	2021	3,00	3,00	100,00			
	2020	3,00	4,00	133,33			

Nilai realisasi capaian indikator kinerja tahun 2020 merupakan penilaian mandiri, sedangkan nilai penjaminan kualitas tidak dikeluarkan oleh BPKP, sedangkan tahun 2021 terdapat perubahan dasar penilaian berdasarkan terbitnya Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan metode penilaian.

Realisasi nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP pada tahun 2024 sebesar 4,07. Capaian tersebut setara dengan 123,33% dari target tahun 2024 dan target RPJMN sebesar 3,30. Jika dibandingkan realisasi dan capaian pada tahun 2023 sebesar 3,83 dan capaian 123,55% dari target 3,10, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 6,27%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar -0,17%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2022 sebesar 3,00 dan capaian 100% dari target 3,00, maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 35,67%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan -23,33%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2021 sebesar 3,00 dan capaian 100% dari target 3,00, maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 35,67% sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan 23,33%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2020 sebesar 4 dan capaian 133,33% dari target 3,00, maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 1,75% sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan -7,50%

Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Tim Asesor KKP telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Tim Penjaminan Kualitas dengan simpulan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP KKP berada pada level “Terkelola dan Terukur” atau tingkat 4 (empat) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Hasil penilaian dimaksud dilakukan terhadap 3 (tiga) komponen penilaian, yaitu Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, dan Pencapaian Tujuan yang kemudian akan dilakukan evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP digunakan sebagai pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Unit Organisasi Eselon I yang diambil dari nilai komponen Struktur dan Proses (Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi (T1) dan telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Mitra.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP antara lain:

- a. Melaksanakan pembahasan penyusunan Laporan SPIP Triwulan III Tahun 2024 yang diadakan pada tanggal 21 Oktober 2024 bertempat di Ruang Rapat Lounge GMB III. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan unit kerja eselon II lingkup Ditjen PDSPKP dan tim kerja lingkup Sekretariat Ditjen PDSPKP terkait. Pada pembahasan ini dilakukan *update* atas realisasi pengendalian pada *form* pemantauan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko serta laporan SPIP triwulan III 2024.

- b. Keikutsertaan dalam *entry meeting* evaluasi BPKP atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2024 di ruang rapat BERAHLAK lantai III GMB 3.
- c. Keikutsertaan pada rapat koordinasi penyelenggaraan SPIP triwulan IV tahun 2024 di ruang rapat Biro Keuangan dan BMN GMB IV pada tanggal 8 November 2024.



Gambar 60. Rapat koordinasi penyelenggaraan SPIP triwulan IV tahun 2024

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator ini sebesar Rp 553.212.000,- dan sampai dengan tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp 525.959.000,- atau setara dengan 95,07%, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 27.253.000,-. Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 123,33% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 95,07%.

12. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah

ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018).

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

- Kualifikasi dengan bobot 25% yang dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di update pada aplikasi SIMPEG Online KKP,
- Kompetensi dengan bobot 40% yang diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP berdasarkan Penghitungan nilai diklat struktural dan fungsional,
- Kinerja dengan bobot 30% diolah datanya dari aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Online KKP atau data riwayat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan nilai Kinerja dari Kategori, dan
- Disiplin dengan bobot 5% diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 5 tahun terakhir dan di update pada aplikasi SIMPEG.

Tabel 19. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2024 (7)	Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN (8)
	2024	87,00	89,12	102,44	87,00	89,12	102,44

Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP (Indeks)	2023	83,20	90,51	108,79			
	2022	83,00	85,02	102,43			
	2021	73,00	82,97	113,66			
	2020	72,00	78,96	109,67			

Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024 sebesar 89,12. Capaian tersebut setara dengan 102,44% dari target tahun 2024 dan target RPJMN sebesar 87,00. Jika dibandingkan realisasi dan capaian pada tahun 2023 sebesar 83,20 dan capaian 108,79% dari target 90,51, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar -1,54%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar -5,84%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2022 sebesar 83,00 dan capaian 102,43% dari target 85,02, maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,82%, sedangkan capaiannya pertumbuhan -sebesar 0. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2021 sebesar 82,97 dan capaian 113,66% dari target 73,00 maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 7,41% sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan -9,87%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2020 sebesar 78,96 dan capaian 109,67 % dari target 72,00 maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 12,87% sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan -6,59%.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator pembiayaan usaha kelautan dan perikanan sebesar Rp 67.274.323.000,- dan sampai dengan tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp 67.193.333.000,- atau setara dengan 99,88%, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 80.990.000,-. Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 102,44% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,88%.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen PDSPKP antara lain:

- a. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai Triwulan I Lingkup Ditjen PDSPKP tanggal 25 April 2024;



Gambar 61. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai

- b. Bimbingan teknis Penguatan Sinergitas dan Budaya Kerja ASN tanggal 3 sampai dengan 4 Mei 2024;



Gambar 62. Bimbingan Teknis Penguatan Sinergitas dan Budaya Kerja ASN

- c. Pelatihan Fungsional Analisis SDMA pada tanggal 24 April - 22 Mei 2024;
- d. Pelantikan Pejabat Fungsional Arsiparis dan APK APBN lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 29 April 2024;



Gambar 63. Pelantikan Pejabat Fungsional Arsiparis dan APK APBN

- e. Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Perpindahan Jabatan Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan pada tanggal 21-22 Mei 2024 dan tanggal 27-28 Mei 2024;



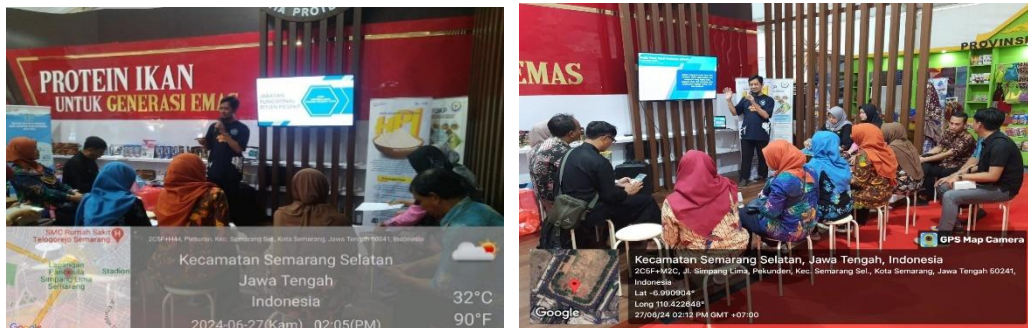
Gambar 64. Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Perpindahan Jabatan Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan

- f. Kegiatan Penilaian Kompetensi Tugas Belajar dan Izin Belajar tanggal 12 Juni 2024;



Gambar 65. Penilaian Kompetensi Tugas Belajar dan Izin Belajar tanggal 12 Juni 2024

g. Sosialisasi Jabatan Fungsional Lingkup PDSPKP tanggal 27 Juni 2024



Gambar 66. Sosialisasi Jabatan Fungsional Lingkup PDSPKP

13. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PDSPKP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai PMSAKIP merupakan penilaian mandiri oleh Inspektorat Jenderal KKP terhadap penerapan SAKIP pada unit kerja eselon I KKP yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, serta berorientasi pada penerapan outcome dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Tabel 20. Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2024 (7)	Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN (8)
	2024	84,00	86,69	103,20	84,00	86,69	103,20

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PDSPKP (Nilai)	2023	80,50	83,01	103,12			
	2022	80,01	81,19	101,47			
	2021	84,15	86,36	102,63			
	2020	84,00	82,27	97,94			

Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Ditjen PDSPKP tahun 2024 sebesar 86,69. Capaian tersebut setara dengan 103,20% dari target tahun 2024 dan target RPJMN sebesar 84,00. Jika dibandingkan realisasi dan capaian pada tahun 2023 sebesar 80,50 dan capaian 103,12% dari target 80,50, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,43%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar 0,08%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2022 sebesar 81,19 dan capaian 101,47% dari target 80,01, maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 6,77%, sedangkan capaiannya pertumbuhan sebesar 1,70. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2021 sebesar 86,36 dan capaian 102,63% dari target 84,15 maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 0,38% sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan 0,56%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2020 sebesar 82,27 dan capaian 97,94 % dari target 84 maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,37% sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan 5,37%.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP sebesar Rp 1.793.836.000,- dan sampai dengan tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp 1.793.184.000 dengan 99,96%, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 652.000,-. Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 103,20% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,96%.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Melaksanakan pengukuran dan pengisian capaian kinerja pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja KKP secara berkala
- b. Melaksanakan penyusunan pedoman penilaian mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 4-5 Juni 2024 di Jakarta;
- c. Melaksanakan Penilaian mandiri SAKIP level II lingkup Ditjen PDSPKP dan penilaian mandiri SAKIP level I oleh Inspektorat IV;
- d. Melaksanaan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 23-25 Juli 2024 di Yogyakarta yang melibatkan seluruh unit kerja Ditjen PDSPKP Satker Pusat, UPT dan Dinas KP Provinsi (Tugas Pembantuan) serta Inspektorat Jenderal KKP, Kementerian Keuangan dan Bappenas.



Gambar 67. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Ditjen PDSPKP Tahun Anggaran 202

- e. Melaksanakan kegiatan *Workshop* Penulisan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan pada Wikipedia Bahasa Indonesia pada tanggal 26-27 Agustus 2024 di Jakarta;



Gambar 68. *Workshop* Penulisan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan pada Wikipedia Bahasa Indonesia

- f. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja dan melakukan Penyampaian laporan kinerja yang sudah disahkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan serta *stakeholders* terkait secara tepat waktu yakni paling lambat 4 minggu setelah periode pelaporan triwulanan berakhir yang dibuktikan dengan surat resmi. Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu akan meningkatkan penilaian pada aspek pelaporan pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMSAKIP.
- g. Melaksanakan Kegiatan *Sharing Session* Pengelolaan Kinerja bersama Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 31 Oktober 2024



Gambar 69. *Sharing Session* Pengelolaan Kinerja

14. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen PDSPKP

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP merupakan jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai tuntutan ganti rugi Unit Eselon I atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Ditjen PDSPKP Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PDSPKP tahun 2022.

Tabel 21. Ikhtisar Pencapaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2024 (7)	Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN (8)
Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen PDSPKP (%)	2024	≤0,50	0,29	120	≤0,50	0,29	120%
	2023	≤0,50	0,26	120			
	2022	≤1,00	0,50	120			
	2021	≤1,00	0,06				
	2020	≤1,00	0,19				

Capaian indikator batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksanaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP mempunyai sifat polarisasi minimize atau semakin kecil maka kinerjanya semakin baik. Pada tahun 2024 capaian indikator ini adalah sebesar 0,29. Capaian tersebut setara dengan 120% dari target tahun 2024 dan target RPJMN sebesar ≤0,50. Jika dibandingkan realisasi dan capaian pada tahun 2023 sebesar 0,26 dan capaian 120% dari target ≤0,50, maka realisasi tahun 2024 mengalami cenderung

lebih tinggi daripada tahun 2024, sedangkan capaiannya mengalami tidak mengalami perubahan. Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP pada tahun 2024 lebih tinggi daripada tahun 2023 karena terdapat penatausahaan PNPB yang masih belum sesuai dengan ketentuan. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2022 sebesar 0,50 dan capaian 120% dari target $\leq 1,00$, maka realisasi 2024 lebih baik sedangkan capaiannya tidak mengalami perubahan. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2020 sebesar 0,19 dan capaian 120% dari target $\leq 1,00$, maka realisasi 2024 lebih tinggi daripada tahun 2020, sedangkan capaiannya tidak mengalami perubahan.

Pada tahun 2021 indikator ini memiliki nama yang berbeda dengan tahun lainnya sehingga realisasi dan capaiannya tidak dapat dibandingkan. Pada tahun 2021 indikator ini bernama Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup Ditjen PDSPKP.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja antara lain:

- a. Melaksanakan kegiatan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban secara berkala;
- b. Mengadakan kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Triwulan III Tahun 2024 lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 9 – 11 Oktober 2024. Kegiatan dimaksud menghasilkan output berupa Laporan Keuangan dan BMN yang sudah melalui proses verifikasi, reviu dengan Inspektorat IV dan otorisasi oleh Tim Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Ditjen PDSPKP;

- c. Mengadakan kegiatan rekonsiliasi Pencatatan Aset, Persediaan dan GLP periode Bulanan Oktober pada tanggal 6 – 7 November 2024. Kegiatan dimaksud menghasilkan *output* berupa pendetilan pencatatan Aset, Persediaan dan GLP pada aplikasi SAKTI lingkup unit eselon 1, Satker Sekretariat dan Satker BBP3KP;
- d. Mengadakan kegiatan rekonsiliasi Pencatatan Aset, Persediaan dan GLP periode Bulanan November pada tanggal 4 – 5 Desember 2024. Kegiatan dimaksud menghasilkan *output* berupa pendetilan pencatatan Aset, Persediaan dan GLP pada aplikasi SAKTI lingkup unit eselon 1, Satker Sekretariat dan Satker BBP3KP;
- e. Melakukan pemenuhan dokumen pemeriksaan oleh tim BPK RI perihal Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun 2023 sampai dengan Oktober 2024 dan Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2024 serta melakukan pembahasan dengan BPK-RI terkait konsep temuan dan tanggapan;
- f. Mengadakan pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2024 dengan Inspektorat Jenderal dan BPK-RI pada tanggal 9 dan 17 Desember 2024 serta proses input tindak lanjut pada <https://eauditee.bpk.go.id/>.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator ini sebesar Rp 869.120.000,- dan sampai dengan tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp 868.212.000,- atau setara dengan 99,90%, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 908.000,-. Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 120% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,90%.

15. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PDSPKP

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP didefinisikan sebagai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik berdasarkan surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan.

Tabel 22. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2024 (7)	Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN (8)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PDSPKP (%)	2024	80,00	97,41	121,76	80,00	97,41	121,76
	2023	75,00	93,18	124,24			
	2022	70,00	96,88	138,40			
	2021	65,00	96,57	148,57			
	2020	60,00	98,29	163,82			

Pada 2024 Ditjen PDSPKP telah mengadakan pembahasan guna menindak lanjuti atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal pada tanggal 7-8 November 2024 dan 18-19 Desember 2024. Rapat dihadiri oleh tim Inspektorat Jenderal KKP dan unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP terkait. Pada kegiatan ini dibahas terkait laporan hasil pemeriksaan Itjen beserta dengan tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi. Hal ini bertujuan agar dokumen tersebut dapat diterima oleh tim Inspektorat Jenderal dan dinyatakan tuntas. Atas tindak lanjut

tersebut kemudian di *upload* ke aplikasi <https://sidak.kkp.go.id>. Capaian IKU ini diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang terbit LHP-nya pada periode 1 September 2023 sampai 30 September 2024 (Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024) dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon II sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 (Triwulan IV Tahun 2024).

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP tahun 2024 sebesar 97,41. Capaian tersebut setara dengan 121,76% dari target tahun 2024 dan target RPJMN sebesar 80,00. Jika dibandingkan realisasi dan capaian pada tahun 2023 sebesar 93,18 dan capaian 124,24% dari target 75,00, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,54%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar -1,99%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2022 sebesar 96,88 dan capaian 138,40% dari target 70,00, maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 0,55%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar -12,02. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2021 sebesar 96,57 dan capaian 148,57% dari target 65,00 maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 0,87% sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan -18,04%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2020 sebesar 98,29 dan capaian 60% dari target 60,00 maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar -0,90% sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan -25,67%.



Gambar 70. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator ini sebesar Rp 869.120.000,- dan sampai dengan tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp 868.212.000,- atau setara dengan 99,90%, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 908.000,-. Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 121,76% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,90%.

Tabel 23. Data Rekapitulasi Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2024

No	Unit Kerja	Jumlah Rekom	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekom	% Sisa Rekom
1	Direktorat Logistik	35	35	100	0	0
2	Direktorat Pengolahan	19	17	89,47	2	10,53
3	Direktorat Pemberdayaan Usaha	19	19	100	0	0
4	Direktorat Pemasaran	31	31	100	0	0
5	Setditjen PDSPKP	78	75	96,15	3	3,85
6	BBP3KP	11	11	100	0	0
	Total	193	188	97,41	5	2,59

16. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PDSPKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi

Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan, replikasi maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Penetapan aturan untuk Inovasi pelayanan publik berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut: Kriteria Inovasi Pelayanan Publik mencakup: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi dan berkelanjutan. Sedangkan kelompok inovasi mencakup: kelompok umum dan kelompok khusus. Aspek penilaian kelompok umum: ringkasan, latar belakang dan tujuan (10%), kebaruan/nilai tambah (15%), implementasi inovasi (5%), signifikansi (30%), adaptabilitas (20%), sumber daya (5%), strategi keberlanjutan (15%). Aspek penilaian kelompok khusus mencakup ringkasan, deskripsi awal inovasi (5%), pembaruan/peningkatan inovasi (15%), dampak (30%), adaptabilitas (20%), penguatan sumber daya (10%), strategi penguatan keberlanjutan (20%). Tema inovasi terkait dengan sektor kelautan dan perikanan.

KemenPAN-RB menyampaikan bahwa tahun 2024 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) ditiadakan. Penilaian inovasi tahun 2024 diselenggarakan oleh Pusdatin dengan mekanisme penilaian yang secara garis besar masih sama dengan penilaian yang dilakukan KemenPAN-RB namun tanpa menggunakan aplikasi SINOVIK.

Untuk mengikuti penilaian inovasi setiap unit kerja mengirimkan proposal inovasi yang memuat informasi, gagasan atau ide mengenai inovasi sesuai dengan format yang ditetapkan Pusdatin. Proposal inovasi tersebut dikirimkan kepada Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 24. Ikhtisar Pencapaian Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2024 (7)	Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN (8)
Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PDSPKP (Nilai)	2024	76,00	85,26	112,18	76,00	85,26	112,18
	2023	75,00	79,79	106,39			
	2022	-	-	-			
	2021	-	-	-			
	2020	-	-	-			

Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik Ditjen PDSPKP pada tahun 2024 sebesar 85,26. Capaian tersebut setara dengan 112,18% dari target tahun 2024 dan target RPJMN sebesar 76,00. Jika dibandingkan realisasi dan capaian pada tahun 2023 sebesar 79,79 dan capaian 106,39% dari target 75,00 maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 6,86%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar 5,45%. Pada tahun 2020-2022

indikator kinerja ini bernama Unit Yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Indikator Kinerja Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP pada tahun 2023-2024.

Adapun proposal inovasi yang diusulkan Ditjen PDSPKP yaitu sebagai berikut:

- a. INVAPRO KAPE (Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan) dari BBP3KP;
- b. KURAS IKAN (Kurasi Produk Perikanan Untuk UMKM Naik Kelas) dari Direktorat Pemasaran

Dalam rangka pencapaian Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP, beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal PDSPKP selama tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

- a. Mengikuti Sosialisasi KIPP KKP, tanggal 15-16 Mei 2024;
- b. Melaksanakan Rapat Persiapan KIPP Tahun 2024, tanggal 20 Mei 2024;
- c. Melaksanakan Reviu Proposal KIPP, tanggal 26 Juni 2024;
- d. Melaksanakan Reviu Proposal KIPP, tanggal 28 Juni 2024;
- e. Melaksanakan Reviu Proposal Inovasi Direktorat Pengolahan, Direktorat Pemasaran, dan BBP3KP tanggal 1 Juli 2024;
- f. Melaksanakan Reviu Proposal Inovasi Direktorat Pengolahan dan Direktorat Pemasaran, tanggal 4 Juli 2024;
- g. Melaksanakan Rapat Finalisasi Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PDSPKP, tanggal 15 Juli 2024;
- h. Melaksanakan Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP, tanggal 22 Juli 2024;

- i. Melaksanakan Rapat Pleno Penilaian Proposal KIPP, tanggal 23 Juli 2024;
- j. Mengikuti kegiatan Pleno Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik, tanggal 17-18 Agustus 2024 sebagai Tim Penilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik KKP



Gambar 71. Rapat Pleno Penilaian Proposal KIPP, tanggal 23 Juli 2024

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3.492.925.000.- Realisasi anggaran sampai tahun 2024 sebesar Rp 3.490.638.806.- atau setara dengan 99,93% terhadap total alokasi anggaran. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 2.286.194.- Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 147,61% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,93%.

17. Unit Kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Penghitungan persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar, diperoleh dari persentase unit kerja level I dan II yang tergabung dan mendistribusikan informasinya dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terpilih dibandingkan dengan seluruh unit kerja di Ditjen PDSPKP.

Tabel 25. Ikhtisar Pencapaian Unit Kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2024 (7)	Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN (8)
Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	2024	94,00	133,33	141,84	94,00	133,33	141,84
	2023	92,00	130,00	141,30			
	2022	86,00	100,00	116,28			
	2021	84,00	99,81	118,82			
	2020	82,00	100,00	121,95			

Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar tahun 2024 mencapai 133,33. Capaian tersebut setara dengan 141,84% dari target tahun 2024 dan target RPJMN sebesar 94,00. Jika dibandingkan realisasi dan capaian pada tahun 2023 sebesar 130 dan capaian 141,30% dari target

92,00 maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 2,56%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar 0,38%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2022 sebesar 100,00 dan capaian 116,28% dari target 86,00, maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 33,33%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan 21,98%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2021 sebesar 99,81 dan capaian 118,82% dari target 84,00, maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 33,58% sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan 19,37%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2020 sebesar 100,00 dan capaian 121,95% dari target 82,00 maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 33,33% sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan -16,31%.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2.796.880.000.- Realisasi anggaran sampai dengan 2024 sebesar Rp 2.794.622.587.- atau setara dengan 99,92% terhadap total alokasi anggaran.

Pengukuran capaian Manajemen Pengetahuan pada Tahun 2024 menggunakan *Platform Portal Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id>). Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa upaya dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini antara lain Optimalisasi penggunaan aplikasi manajemen pengetahuan platform *Portal Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id>).

18. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PDSPKP

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator kinerja ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian/Lembaga. Capaian sementara Adapun indikator penialain Capaian IKPA antara lain:

- Indikator capaian terhadap kualitas perencanaan anggaran sebesar 89,35%;
- Indikator capaian terhadap kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 93,13%;
- Indikator capaian terhadap kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 100%;
- Penilaian terhadap dispensasi SPM sebesar 0,50%.

Tabel 26. Ikhtisar Pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2024 (7)	Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN (8)
	2024	93,76	91,86	97,97	93,76	91,86	97,97

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2024 (7)	Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN (8)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PDSPKP (Nilai)	2023	93,75	89,87	95,86			
	2022	89,00	92,82	104,29			
	2021	89,00	89,18	100,20			
	2020	88,00	89,97	102,24			

Nilai IKPA Ditjen PDSPKP tahun 2024 sebesar 91,86. Capaian tersebut setara dengan 97,97% dari target tahun 2024 dan target RPJMN sebesar 93,76. Jika dibandingkan realisasi dan capaian pada tahun 2023 sebesar 89,87 dan capaian 95,86% dari target 93,75, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 2,21%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar 2,20%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2022 sebesar 92,82 dan capaian 104,29% dari target 89,00, maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar -1,03%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar -6,06. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2021 sebesar 89,18 dan capaian 100,20% dari target 89,00 maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 3,01% sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan -2,22%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2020 sebesar 89,97 dan capaian 102,24 % dari target 88,00 maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 2,10% sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan -4,17%. IKPA Ditjen PDSPKP (91,86) lebih rendah jika dibandingkan dengan IKPA tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 93,84, atau setara dengan 97,89% dari IKPA Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Beberapa hal yang menjadi penyebab ketidaktercapaian target IKPA tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

- a. Masih terdapat anggaran blokir yang masuk ke dalam perhitungan persentase realisasi anggaran sehingga menyebabkan aspek penyerapan anggaran tidak optimal
- b. Tidak optimalnya aspek revisi III DIPA pada triwulan IV karena revisi III DIPA dilakukan pada awal triwulan IV yaitu pada bulan Oktober dan kemudian dilakukan kembali pada akhir Desember terkait perubahan-perubahan yang terjadi, namun demikian yang terbaca pada sistem adalah revisi III DIPA yang dilakukan pada awal triwulan IV.

Dalam rangka menindaklanjuti permasalahan tersebut upaya yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi terkait penginputan target dan capaian output
- b. Koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan dan anggaran
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rencana pelaksanaan anggaran.

Beberapa kegiatan kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal PDSPKP antara lain:

- a. Melaksanakan kegiatan pemutakhiran data Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA Triwulan IV Tahun 2024 lingkup Ditjen PDSPKP yang diselenggarakan pada tanggal 1 Oktober 2024. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu telah dilaksanakan pemutakhiran data RPD triwulan IV berdasarkan data rencana pelaksanaan

kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja eselon II lingkup PDSPKP serta seluruh tim kerja lingkup Ditjen PDSPKP pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2024. Pemutakhiran data RPD yaitu pada akun 51 (belanja pegawai), akun 52 (belanja barang), dan akun 53 (belanja modal).



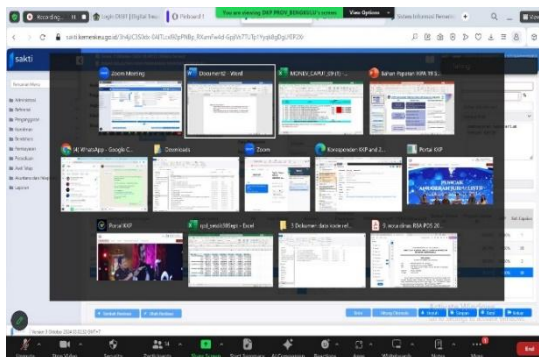
Gambar 72. Kegiatan pemutakhiran data Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA Triwulan IV Tahun 2024

- b. Melaksanakan pemantauan dan asistensi pengisian capaian output kepada seluruh Satker lingkup PDSPKP mulai dari 1 Satker Pusat, 1 Satker UPT dan 38 Satker Tugas Pembantuan yang dilakukan secara daring dan luring pada tanggal 1-7 Oktober 2024. Capaian output merupakan salah satu indikator dalam penilaian capaian IKPA dengan bobot penilaian sebesar 25%. Capaian output Ditjen PDSPKP pada periode September 2024 sebesar 100%
- c. Keikutsertaan dalam rapat monitoring dan evaluasi capaian IKPA bulan September dan Oktober Tahun 2024 di lingkungan Kementerian dan Perikanan yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan pada tanggal 6 November 2024



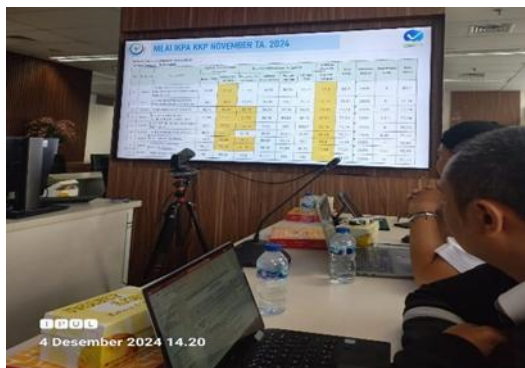
Gambar 73. Keikutsertaan dalam rapat monitoring dan evaluasi capaian IKPA bulan September dan Oktober Tahun 2024

- d. Melaksanakan pemantauan dan asistensi pengisian capaian output periode Oktober 2024 terhadap seluruh Satker lingkup PDSPKP mulai dari 1 Satker Pusat, 1 Satker UPT dan 38 Satker Tugas Pembantuan yang dilakukan secara daring dan luring pada tanggal 1-7 November 2024.



Gambar 74. Pemantauan dan asistensi pengisian capaian output periode Oktober 2024

- e. Keikutsertaan dalam rapat monitoring dan evaluasi capaian IKPA periode November 2024 di lingkungan Kementerian dan Perikanan yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan pada tanggal 4 Desember 2024.



Gambar 75. Rapat monitoring dan evaluasi capaian IKPA periode November 2024

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator ini sebesar Rp 650.000.000,- dan sampai dengan tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp 649.741.000,- atau setara dengan 99,96%.

19. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Ditjen PDSPKP

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai ini diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu.

Aplikasi SMART DJA Kemenkeu telah dibangun dan efektif digunakan sejak tahun anggaran 2012 untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi SMART DJA Kemenkeu yang mengacu pada PMK tersebut adalah melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas Aspek Implementasi. Namun,

seiring dengan penyempurnaan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, aplikasi SMART DJA Kemenkeu juga telah disempurnakan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran yang mengacu pada PMK tersebut dengan melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja yang mencakup Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Penyempurnaan pelaksanaan pengukuran evaluasi kinerja anggaran kembali dilakukan untuk menyesuaikan pelaksanaan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dengan diterbitkannya PMK Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Tabel 27. Ikhtisar Pencapaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2024 (7)	Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN (8)
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Ditjen PDSPKP (Nilai)	2024	81,00	82,38	101,70	81,00	82,38	101,70
	2023	-	-	-			
	2022	-	-	-			
	2021	-	-	-			
	2020	-	-	-			

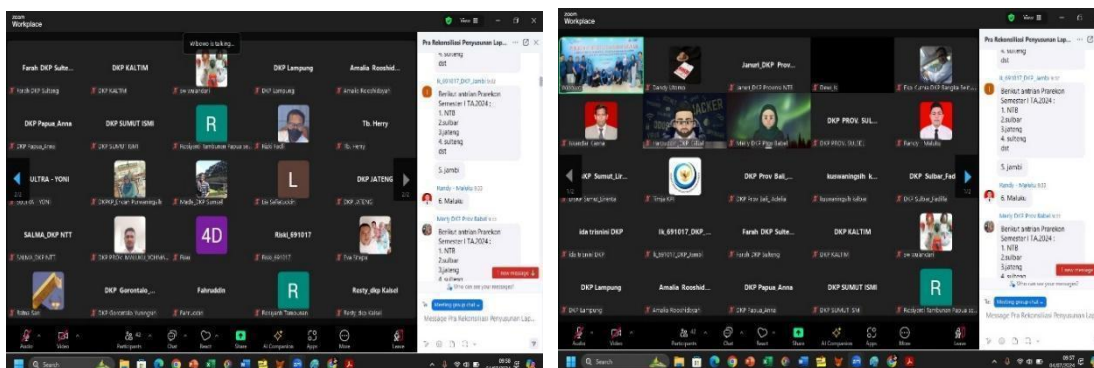
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Ditjen PDSPKP tahun 2024 sebesar 82,38. Capaian tersebut setara dengan 101,70%

dari target tahun 2024 dan target RPJMN sebesar 81,00. Indikator merupakan indikator baru pada 2024, sedangkan pada tahun 2023 dan sebelumnya nama indikator ini adalah Nilai Kinerja Anggaran (NKA). Oleh karena ini indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Realisasi dan capaian indikator kinerja NKA pada tahun 2023 sebesar 90,86 dan capaian 105,65% dari target 86,00; realisasi dan capaian tahun 2022 sebesar 91,14 dan capaian 104,76% dari target 87,00; realisasi dan capaian tahun 2021 sebesar 91,41 dan capaian 106,29% dari target 86; dan realisasi dan capaian tahun 2020 sebesar 94,42 dan capaian 108,53% dari target 87,00.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator ini sebesar Rp 2.697.579.000,- dan sampai dengan tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp 2.682.876.000,- atau setara dengan 99,45%, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 14.703.000,-. Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 101,70% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,45%.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Satker Sekeretariat Ditjen PDSPKP dan Tugas Pembantuan secara berkala terkait pelaporan Capaian Output, sasaran kegiatan dan sasaran program secara berkala.



Gambar 76. Kegiatan Koordinasi Pelaporan Capaian Output

- b. Keikursertaan dalam rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja serta pemantauan kinerja anggaran dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

20. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Ditjen PDSPKP

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PDSPKP merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kinerja pengawasan intern KKP dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 28. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2024 (7)	Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN (8)
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Ditjen PDSPKP (%)	2024	80,00	85.19	106.49%	80,00	85,19	106,49
	2023	77,50	79,69	102,83			
	2022	75,00	82,24	109,65			
	2021	72,50	78,71	108,57			
	2020						

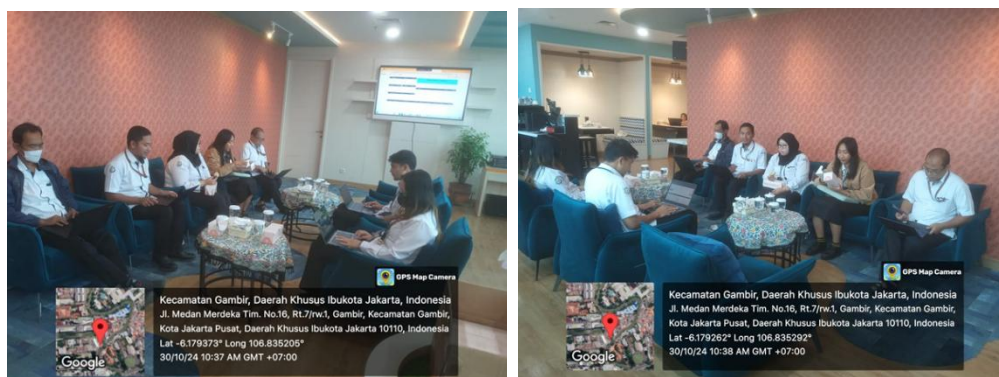
Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Ditjen PDSPKP pada tahun 2024 sebesar 85,19. Capaian tersebut setara dengan 106,49% dari target tahun 2024 dan target RPJMN sebesar 80,00. Jika dibandingkan realisasi dan capaian pada tahun 2023 sebesar 79,69 dan capaian 102,83% dari target 77,50, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 6,90%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar 3,56%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2022 sebesar 82,24 dan capaian 109,65% dari target 75,00, maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 3,59%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan -2,89%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2021 sebesar 78,71 dan capaian 108,57% dari target 72,50, maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 8,23% sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan -1,91%.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator pembiayaan usaha kelautan dan perikanan sebesar Rp 495.382.000,- dan sampai dengan tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp 494.195.000,- atau setara dengan 99,76%, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 1.187.000,-. Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 106,49% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,76%.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain :

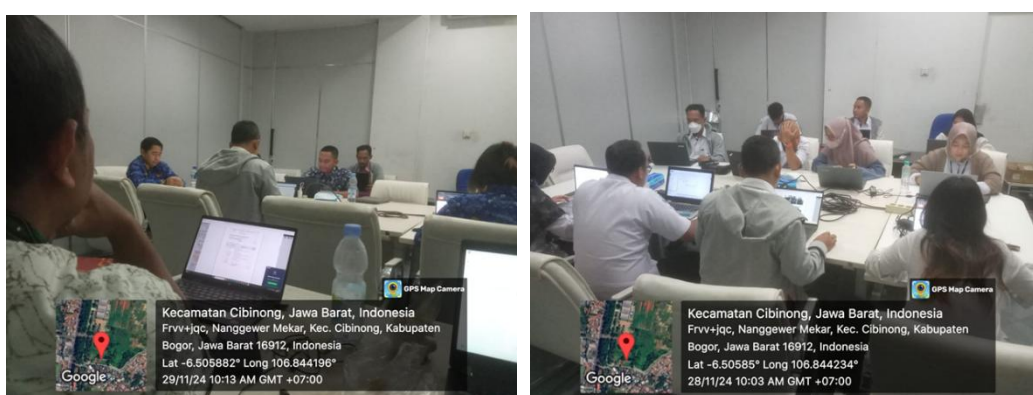
- a. Melaksanakan rapat *Update* RUP dan Pencatatan Realisasi Paket PBJ Tahun Anggaran 2024 lingkup Ditjen PDSPKP secara berkala yaitu pada tanggal 30 Oktober 2024. Kegiatan bertujuan untuk melakukan *update* Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP)

setelah revisi POK terakhir dan pencatatan realisasi Paket PBJ non Tender dan swakelola Tahun Anggaran 2024 pada Aplikasi LPSE (AMEL);



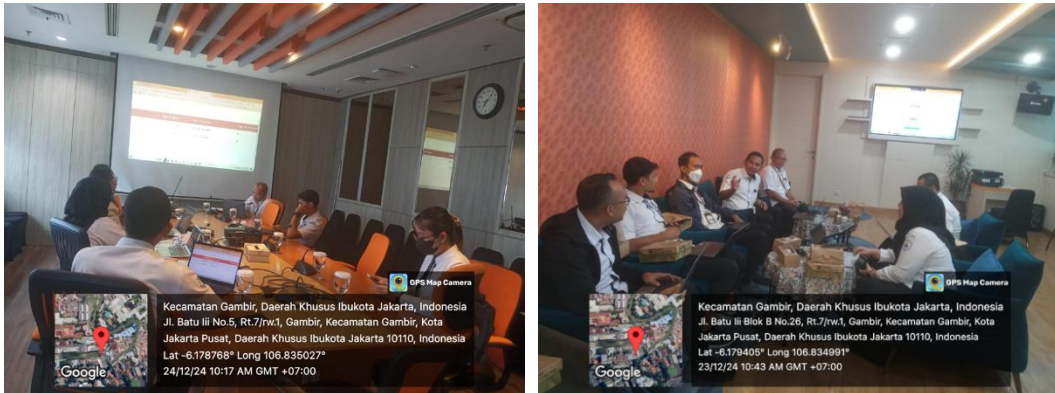
Gambar 77. Update RUP dan Pencatatan Realisasi Paket PBJ Tahun Anggaran 2024 lingkup Ditjen PDSPKP

- b. Melaksanakan Rapat Pembahasan temuan sementara pemantauan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) Triwulan III Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 28 sampai dengan 29 November 2024 di Raiser Ikan Hias Cibinong, Jawa Barat. Kegiatan dilakukan untuk melakukan pembahasan temuan sementara pemantauan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) Triwulan III Tahun Anggaran 2024 di lingkup Ditjen PDSPKP;



Gambar 78. Temuan sementara program P3DN TW III TA 2024 lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

- c. Melaksanakan Rapat Penginputan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 23 sampai dengan 24 Desember 2024. Tujuan Rapat adalah Untuk Melaksanakan Penginputan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) TA 2025 lingkup Ditjen PDSPKP pada Aplikasi SiRUP.



Gambar 79. Penginputan RUP Tahun Anggaran 2025 lingkup Ditjen PDSPKP

21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Ditjen PDSPKP

Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Ditjen PDSPKP. Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai.

Kegiatan yang dikategorikan prioritas/strategis antara lain memenuhi kriteria berikut :

- a. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat;
- b. Memiliki anggaran besar;
- c. Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP;

- d. Mendukung pencapaian prioritas nasional;
- e. Merupakan arahan direktif presiden;
- f. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Tabel 29. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2024 (7)	Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN (8)
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Ditjen PDSPKP (%)	2024	80,00	92,44	115,55	80,00	92,44	115,55
	2023	77,50	95,32	122,99			
	2022	75,00	93,25	124,33			
	2021	72,50	87,43	120,59			
	2020	70,00	84,36	120,51			

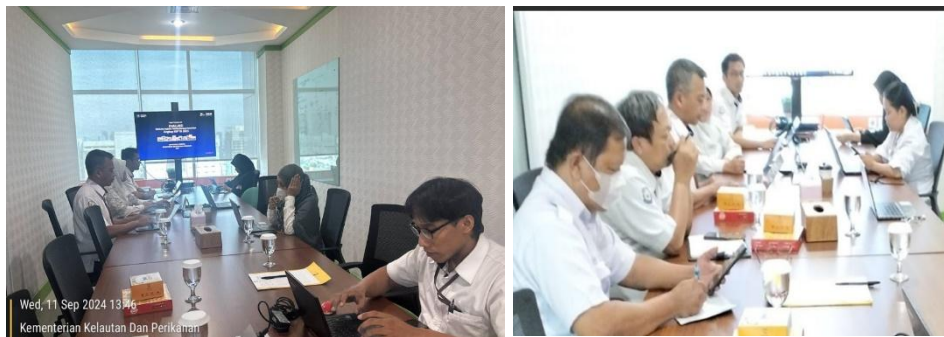
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Ditjen PDSPKP tahun 2024 sebesar 92,44. Capaian tersebut setara dengan 115,55% dari target tahun 2024 dan target RPJMN sebesar 80. Jika dibandingkan realisasi dan capaian pada tahun 2023 sebesar 95,32 dan capaian 122,99% dari target 77,5, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar -3,02%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar -6,05%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2022 sebesar 93,25 dan capaian 124,33% dari target 75,00, maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar -0,87%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar -7,06. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2021 sebesar 87,43 dan capaian 120,59% dari target 72,50 maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,73% sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan -4,18%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun

2020 sebesar 84,36 dan capaian 120.51 % dari target 70,00 maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 9,58% sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan -4,12%

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator ini sebesar Rp 1.028.665.000,- dan sampai dengan tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp 993.491.000,- atau setara dengan 96,58%, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 35.174.000,-. Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 106,49% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 96,58%.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

- a. Melaksanakan rapat Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Ditjen PDSPKP tahun 2020 – 2024 pada tanggal 9 Agustus 2024;
- b. Melaksanakan rapat Pemetaan dan Updating Pemanfaatan Bantuan Pemerintah di lokasi Sampling Penilaian Efektifitas Bantuan Pemerintah/Kegiatan Prioritas pada tanggal 10 dan 11 September 2024;
- c. Melaksanakan monitoring evaluasi bantuan pemerintah di lokasi samping penilaian indikator kinerja Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2024 yaitu Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Purworejo pada tanggal 19 s.d 21 September 2024;



Gambar 80. Pemetaan dan Updating Pemanfaatan Bantuan Pemerintah dilokasi Sampling Penilaian Efektifitas Bantuan Pemerintah/Kegiatan Prioritas

- d. Melaksanakan rapat pemutakhiran pemanfaatan data bantuan pemerintah pada tanggal 6 November 2024;
- e. Melaksanakan rapat tindaklanjut hasil sementara evaluasi tingkat efektivitas kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tanggal 14 November 2024.



Gambar 81. Rapat Tindaklanjut Hasil Sementara Evaluasi Tingkat Efektivitas Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah

22. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Ditjen PDSPKP

Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen PDSPKP merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas kinerja pengawasan intern Ditjen PDSPKP dalam mengawal

dan memastikan pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen PDSPKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen PDSPKP diukur melalui pemenuhan beberapa indikator berikut:

- a. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025;
- b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan Triwulan I tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
- c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan I Tahun 2024;
- d. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
- e. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Tabel 30. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2024 (7)	Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN (8)
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Ditjen PDSPKP (%)	2024	80,00	87,50	109,38%	80,00	87,50	109,38
	2023	77,50	97,50	125,81%			
	2022	75,00	91,50	122,00%			
	2021	72,50	90,00	124,14%			
	2020	-	-	-			

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Ditjen PDSPKP pada tahun 2024 adalah sebesar 87,50. Capaian tersebut setara dengan 109,38% dari target tahun 2024 dan target RPJMN sebesar 80,00. Jika dibandingkan realisasi dan capaian pada tahun 2023 sebesar 97,50 dan capaian 125,81% dari target 77,50, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar -10,26%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar -13,06%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2022 sebesar 91,50 dan capaian 122% dari target 75,00, maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar -4,37%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan -10,37%. Jika dibandingkan realisasi dan capaian tahun 2021 sebesar 90 dan capaian 124,14% dari target 72,50, maka realisasi 2024 mengalami pertumbuhan sebesar -2,78% sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan -11,89%. Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Ditjen PDSPKP merupakan indikator yang muncul mulai tahun 2021, sehingga pada tahun 2020 belum terdapat target ataupun realisasi terkait indikator kinerja ini.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Ditjen PDSPKP sebesar Rp 634.927.000,- dan sampai dengan tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp 633.535.000,- atau setara dengan 99,78%, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 1.392.000,-. Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 109,38% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,78%.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Pada tanggal 15 Oktober 2024, Tim Kerja Pengelolaan BMN dan PBJ – Sekretariat Ditjen PDSPKP melakukan kunjungan ke Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara – Kementerian Keuangan RI dalam rangka konsultasi perihal hibah Pasar Ikan Higienies Pejompongan (PIH Pejompongan), dan diterima oleh Bapak Susanto dan Bapak Ikhsan Pauzi dari Direktorat PKN – DJKN – Kementerian Keuangan RI. Tujuan dari pertemuan adalah untuk memastikan progress dari proses verifikasi permohonan hibah PIH Pejompongan dalam hal ini, Gedung dan Bangunan PIH Pejompongan kepada Direktorat PKN – DJKN;
- b. Pada tanggal 16 dan 17 Oktober 2024, diselenggarakan rapat dalam rangka Updating master aset saat migrasi ke SIMAN V1, Tindak lanjut migrasi aset tetap menjadi persediaan (Ekstrakomptabel), tindak Lanjut penghapusan BMN berupa alat laboratorium yang masih ada di Dinas Provinsi KP pada Satker Direktorat Pemasaran dan Rencana Hibah Peralatan Gurita pada Satker Direktorat Pengolahan di Raiser Ikan Hias Cibinong, Jawa Barat. Rapat dipimpin oleh Penanggung Jawab Barang Milik Negara dan dihadiri oleh seluruh perwakilan Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP. Tujuan kegiatan adalah untuk *Updating* master aset saat migrasi ke SIMAN V1, Tindak lanjut migrasi aset tetap menjadi persediaan (Ekstrakomptabel), Tindak Lanjut penghapusan BMN berupa alat laboratorium yang masih ada di Dinas Provinsi KP pada Satker Direktorat Pemasaran dan Rencana Hibah Peralatan Gurita pada Satker Direktorat Pengolahan;
- c. Pada tanggal 7 November 2024, Kementerian Keuangan RI telah mengajukan Surat Nomor S-1032/MK.06/2024 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Negara pada

- Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa 1 (satu) unit Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp16.680.116.000,00 kepada Presiden Republik Indonesia;
- d. Pada tanggal 11 November 2024, dilaksanakan rapat penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pengembalian Barang Milik Negara berupa Pasar Ikan Modern (PIM) Muara Baru dan pembahasan mekanisme perbaikan BMN PIM Muara Baru antara Ditjen PDSPKP dengan PT perikanan Indonesia;
 - e. Pada tanggal 28 November 2024, diselenggarakan rapat pembahasan penyelesaian piutang PT Perikanan Indonesia (PT Perindo) melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) – Kementerian Keuangan RI. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pengelolaan BMN dan PBJ dan dihadiri oleh perwakilan Biro Keuangan KKP – Setjen KKP, Direktorat Pemasaran, dan Tim Kerja Keuangan dan Pengendalian Internal – Setditjen PDSPKP di Ruang Rapat Karagenan, Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat. Tujuan pertemuan adalah untuk melakukan pembahasan langkah-langkah penyelesaian piutang PT Perindo melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) – Kementerian Keuangan RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Pada tanggal 29 November 2024, diselenggarakan rapat pembahasan skema sewa Pasar Ikan Modern Muara Baru (PIM Muara Baru) bersama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II (KPKNL Jakarta II) – Kementerian Keuangan RI. Rapat dipimpin oleh Bapak Tourista Dian Cahyana selaku Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara – KPKNL Jakarta II dan dihadiri oleh Bapak Angki Fauziyah – KPKNL Jakarta II, Biro Keuangan KKP – Setjen KKP, Tim Kerja Pengelolaan BMN dan PBJ

- Setditjen PDSPKP, dan perwakilan Direktorat Pemasaran di Ruang Rapat Lantai 3, KPKNL Jakarta II, Jakarta Pusat. Tujuan pertemuan adalah untuk berkonsultasi dengan KPKNL Jakarta II mengenai skema sewa dan prosedur pengajuan penetapan tarif sewa PIM Muara Baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pada tanggal 18 Desember 2024, telah dilaksanakan lelang 1 paket BMN berupa Inventaris Kantor Kondisi Rusak Berat/Scrap (Alat Pengolah Data) satker Sekretariat Ditjen PDSPKP di KPKNL Jakarta II. Pemenang mengajukan nilai penawaran sebesar Rp20.743.948
- h. Pada tanggal 19 Desember 2024, Tim Pengelolaan BMN dan PBJ – Sekretariat Ditjen PDSPKP mengadakan rapat dalam rangka penilaian efektivitas pengawasan pengelolaan BMN pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 oleh Inspektorat Jenderal KKP di Raiser Ikan Hias Cibinong, Jawa Barat. Tujuan dari kegiatan adalah untuk pengukuran tingkat efektivitas pengawasan pengelolaan BMN pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 oleh Inspektorat Jenderal KKP



Gambar 82. a) Rapat Penandatanganan BAST Pengembalian PIM dan Pembahasan Rencana Perbaikan PIM dengan PT Perindo, b) Rapat pembahasan Skema Sewa PIM dengan KPKNL Jakarta II

23. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen PDSPKP

Ketersediaan data yang valid, mutakhir dan dapat dipercaya menjadi kebutuhan setiap organisasi. Kondisi lingkungan yang sangat dinamis menuntut Ditjen PDSPKP untuk mampu menyediakan data secara tepat, akurat dan terkini. Ketersediaan data tersebut akan banyak membantu dalam proses perencanaan, formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan. Data PDSPKP yang akurat akan menghasilkan proses perencanaan yang benar dan pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan para pengolah maupun pemasar hasil perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal PDSPKP diberikan amanat untuk menjadi Unit Data Eselon I yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola data lingkup Ditjen PDSPKP. Beberapa kegiatan pengelolaan data lingkup Ditjen PDSPKP antara lain pengumpulan data pelaku usaha dan produksi, verifikasi dan validasi data serta analisis data bidang PDSPKP.

Tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan data KUSUKA dan Produksi, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP sampai dengan Validasi Nasional serta kepatuhan terhadap implementasi rencana aksi data geospasial kelautan dan perikanan. Dalam rangka menentukan parameter termasuk kedalam kategori tidak patuh, cukup patuh, patuh dan sangat patuh terdapat 3 Variabel Perhitungan, yaitu:

- 1) Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA (X1), Bobot Nilai (30%)
- 2) Persentase Data Produksi KP yg Tervalidasi (X2), Bobot Nilai 40%.
- 3) Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (X3), Bobot Nilai 30%

Tabel 31. Ikhtisar Pencapaian Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2024 (7)	Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN (8)
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen PDSPKP (%)	2024	91,00	100,00	109,89	91	100,00	109,89
	2023	90,00	100,00	111,11			
	2022	-	-	-			
	2021	-	-	-			
	2020	-	-	-			

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Ditjen PDSPKP pada tahun 2024 sebesar 100,00. Capaian tersebut setara dengan 109,89% dari target tahun 2024 dan target RPJMN sebesar 91,00. Jika dibandingkan realisasi dan capaian pada tahun 2023 sebesar 100,00 dan capaian 111,11% dari target 90,00, maka realisasi tahun 2024 tidak mengalami pertumbuhan, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar -1.10%. Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP merupakan indikator yang baru muncul pada tahun 2023 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dalam rangka pencapaian kepatuhan pengelolaan data lingkup Ditjen PDSPKP, beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal PDSPKP selama tahun 2024 antara lain :

- a. Melakukan kegiatan penguatan pendataan dan percepatan validasi data bidang PDSPKP di beberapa kabupaten/kota atau provinsi antara lain DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Bali, Jawa Barat, Sumatera Utara, Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Banten
- b. Melakukan kegiatan pertemuan pembahasan satu data bidang PDSPKP, yaitu:
 - 1) Pembahasan Volume Produk Olahan Hasil Perikanan, 9 Januari 2024;
 - 2) Finalisasi Volume Produk Olahan (VPO) 2023 dan Penetapan Penghitungan VPO 2024, 23-25 Januari 2024;
 - 3) Pembahasan Satudata KP Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2024, 5 Februari 2024;
 - 4) Pemutakhiran Populasi Gudang Beku, 12 Februari 2024;
 - 5) Persiapan Valnas Satu Data Sem II Tahun 2023, 13 Februari 2024;
 - 6) Persiapan Pendataan dan Sinkronisasi Data, 19 Februari 2024;
 - 7) Pendataan CS, 20 Februari 2024;
 - 8) Penyusunan Juknis TP Tahun 2024, 22 Februari 2024;
 - 9) Persiapan Pelaksanaan Validasi Nasional Satudata Bidang PDPSKP Semester II Tahun 2023, 26 Februari 2024;
 - 10) Prosedur Pendataan Satudata Tahun 2024, 14 Februari 2024;
 - 11) Pembahasan VPO UPI Tahun 2023, 19 Maret 2024;

- 12) Validasi Satudata KP Bidang PDSPKP Tahun 2023, 20 Maret 2024.
- 13) Rapat Penyusunan Pedoman Pengumpulan dan Penghitungan Data Utilitas dan VPO UPI Skala Menengah Besar, tanggal 2 April 2024;
- 14) Reviu Pelaksanaan Validasi Satudata Bidang PDSPKP Tahun 2023, tanggal 4 April 2024;
- 15) Rapat lanjutan Pendataan UPI Menengah Besar, tanggal 24 April 2024;
- 16) Rapat pembahasan Penghitungan VPO UPI Tahun 2023, tanggal 25 April 2024;
- 17) Rapat pembahasan Penghitungan VPO UPI Tahun 2023, tanggal 25 April 2024;
- 18) Rapat Persiapan *Workshop* Satudata Bidang PDSPKP, tanggal 28 Mei 2024;
- 19) *Workshop* Satu Data Bidang PDSPKP Tahun 2024, tanggal 10-14 Juni 2024; dan
- 20) Persiapan Monev Implementasi Satudata, 10 Juli 2024;
- 21) Rapat Monitoring Pendataan UPI Menengah Besar, 29 Juli 2024;
- 22) Pembahasan Progres Pengembangan Modul KUSUKA Lingkup DJPKRL dan DJPDSPKP, 19 Agustus 2024;
- 23) Rapat Pra Validasi Nasional Satudata Kelautan dan Perikanan Semester I Tahun 2024, 28 Agustus 2024;
- 24) Rapat persiapan validasi satu data bidang PDSPKP Semester I Tahun 2024, 9 September 2024; dan
- 25) Validasi Satu Data Bidang PDSPKP Semester I Tahun 2024, 10-14 September 2024.

- 26) Rapat Persiapan dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pendataan UPI Menengah Besar, pada tanggal 21-22 Oktober 2024 dan 5 November 2024;
- 27) Monitoring dan Evaluasi Pendataan Satu Data Bidang PDSPKP tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024



Gambar 83. Monitoring dan Evaluasi Pendataan Satu Data Bidang PDSPKP tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3.492.925.000,- Realisasi anggaran sampai periode Triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp 3.490.638.806,- atau setara dengan 99,94% terhadap total alokasi anggaran. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 2.286.194,00. Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 109,89% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,93%.

C. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Alokasi anggaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2024 adalah sebesar Rp 386.899.151.000.- yang seluruhnya merupakan APBN rupiah murni dan PNPB. Dari pagu anggaran tersebut, terdapat blokir sebesar Rp 59.296.601.000,- sehingga pagu anggaran efektif menjadi sebesar Rp 327.602.550.000,-. Penyerapan anggaran Ditjen PDSPKP sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar Rp 325.247.621.493,- atau setara dengan 84,07% terhadap total pagu anggaran awal atau 99,28% terhadap pagu anggaran pasca blokir (pagu efektif)

Tabel 32. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Kewenangan Tahun 2024

No	Kewenangan	Pagu Anggaran (Rp)	AA/Blokir	Pagu Efektif	Realisasi Anggaran	% Terhadap Pagu Awal	% Terhadap Pagu Efektif
1	Pusat	331.413.886.000	50.074.732.000	281.339.154.000	279.650.350.709	84,38%	99,40%
2	UPT	38.871.254.000	3.834.124.000	35.037.130.000	34.969.355.149	89,96%	99,81%
3	Tugas Pembantuan	16.614.011.000	5.387.745.000	11.226.266.000	10.621.494.635	63,93%	94,61%
Total		386.899.151.000	59.296.601.000	327.602.550.000	325.247.621.493	84,07%	99,28%

Sumber: Aplikasi Omspan Kemenkeu 1 Februari 2025

Tabel 33. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2024

No.	Nama Kegiatan	Pagu	Jumlah Diblok/AA	Pagu Anggaran Efektif	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Efektif
1	Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	57.574.000.000	11.806.837.000	45.767.163.000	44.728.333.262	77,69	97,73
2	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	76.602.207.000	14.096.955.000	62.505.252.000	62.445.193.169	81,52	99,90
3	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	71.858.100.000	10.228.030.000	61.630.070.000	61.441.327.628	85,50	99,69
4	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	22.723.500.000	5.294.362.000	17.429.138.000	17.286.739.740	76,07	99,18
5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	149.541.344.000	15.170.138.000	134.371.206.000	133.447.838.984	89,24	99,31
6	Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	8.600.000.000	2.700.279.000	5.899.721.000	5.898.188.710	68,58	99,97
	Total	386.899.151.000	59.296.601.000	327.602.550.000	325.247.621.493	84,07	99,28

Sumber: Aplikasi Omspan Kemenkeu 1 Februari 2025

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Ditjen PDSPKP Tahun 2024 menyajikan capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja. Capaian dimaksud selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian periode sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja Ditjen PDSPKP berbagai upaya telah dilakukan seperti koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana aksi dalam rangka mencapai indikator kinerja. Secara umum, indikator kinerja Ditjen PDSPKP yang dapat dihitung pada tahun 2024 telah tercapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NKO) yang terukur pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) mencapai 101,59.

B. Permasalahan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja Ditjen PDSPKP tahun 2024, terdapat 1 indikator kinerja yang tidak mencapai target yakni Nilai Ekspor Hasil Perikanan dan Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program. Adapun permasalahan dan rencana tindak lanjut ke depan antara lain:

Tabel 34. Permasalahan dan Rekomendasi atas Indikator kinerja yang tidak mencapai target pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
Nilai Ekspor Hasil Perikanan	Tren Perlambatan ekonomi di negara tujuan ekspor produk perikanan yang terjadi di beberapa negara tujuan utama ekspor perikanan Indonesia, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang, memberikan dampak negatif terhadap daya beli konsumen. Penurunan permintaan produk perikanan akibat menurunnya pendapatan masyarakat di negara-negara tersebut memengaruhi volume ekspor	- Melakukan koordinasi tindak lanjut atas penyelesaian perundingan dan penyelesaian hambatan ekspor lainnya; - Melakukan koordinasi penyelesaian hambatan ekspor udang ke Amerika Serikat atas tuduhan Anti-dumping.
Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program	- Adanya perubahan kebijakan suku bunga KUR dari 3% menjadi 6% dan akan meningkat 1% setiap pengajuan top up kredit berdasarkan Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023. - Turunnya pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan	Koordinasi dan sinergi kegiatan dengan lembaga keuangan Bank, Non Bank dan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan akses pembiayaan untuk mendukung program prioritas KKP, serta optimalisasi pemanfaatan pelaku usaha sektor

Indikator Kinerja	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
	konsumsi dari di atas 5% menjadi di bawah 5%, berdampak melemahnya daya beli masyarakat sehingga mempengaruhi usaha produksi dan membuat pelaku usaha menahan untuk mengakses kredit untuk usahanya. Adanya penurunan target KUR nasional pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi pada semester 1 tahun 2024, dengan target Rp300 Triliun turun menjadi Rp280 Triliun atau naik sebesar 7,69% dari realisasi KUR tahun 2023 sebesar Rp260,06 Triliun	kelautan dan perikanan untuk dapat difasilitasi kredit program. - Edukasi, sosialisasi dan fasilitasi akses pembiayaan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui kegiatan sosialisasi dan fasilitasi akses pembiayaan. - Identifikasi dan verifikasi calon debitur potensial dalam rangka persiapan kegiatan fasilitasi akses permodalan - Upaya pembentukan klaster pembiayaan di Kawasan Kampung Nelayan Modern, Kampung Budidaya dan sentra pengolahan dan pemasaran kelautan dan perikanan
Angka Konsumsi Ikan	- Terjadi penurunan konsumsi kalori dan protein - Terjadi perubahan pola konsumsi protein hewani yang diindikasikan karena adanya kenaikan harga	- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan konsumsi ikan - Melaksanakan kampanye protein ikan dan gerakan memasyarakatkan makan ikan dalam mendukung program makan bergizi melalui berbagai media

Indikator Kinerja	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Finalisasi data AKI nasional tahun 2024
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	- Terdapat anggaran blokir yang diperhitungkan dalam penghitungan aspek penyerapan anggaran - Adanya deviasi dalam halaman III DIPA	- Melaksanakan koordinasi terkait pengisian target/capaian output /pelaksanaan kegiatan/anggaran - Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rencana pelaksanaan anggaran

C. Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024

Tindak lanjut yang telah dilakukan pada tahun 2024 atas rekomendasi pada Laporan Kinerja triwulan II tahun 2024 antara lain :

Tabel 35. Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024

No	Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan III Tahun 2024	Tindak Lanjut pada Tahun 2024
1	Melakukan koordinasi tindak lanjut atas penyelesaian perundingan dan penyelesaian hambatan ekspor lainnya; Melakukan koordinasi penyelesaian hambatan ekspor udang ke Amerika	Indonesia dan Canada telah menyelesaikan perundingan secara substantif Indonesia - Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-CA CEPA) pada 8 November 2024. KKP telah menyampaikan Initial Request produk perikanan pada 19 April 2024 dengan prioritasasi. KKP

No	Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan III Tahun 2024	Tindak Lanjut pada Tahun 2024
	Serikat atas tuduhan CVD dan Anti-dumping.	mengusulkan Prioritas Utama (P1) agar menghapus tarif bea masuk pada saat perjanjian diimplementasikan (Entry into Force - EIF) untuk seluruh pos tarif produk perikanan yang masih dikenakan tarif oleh Kanada; Prioritas Kedua (P2) penghapusan tarif untuk beberapa pos tarif produk perikanan utama yang telah ditawarkan menjadi 0% pada saat penyampaian initial offer, diantaranya meliputi produk tuna, udang, lobster, dan tilapia. Sedangkan untuk tarif MFN yang telah 0%, KKP juga meminta agar dipastikan bahwa di masa mendatang tidak ada kenaikan tarif (standstill). Indonesia dan Jepang telah menyelesaikan perundingan Protokol Perubahan IJEPA melalui penandatanganan naskah perjanjian oleh Menteri Perdagangan RI dengan Menteri Luar Negeri Jepang pada tanggal 8 Agustus 2024 secara virtual. Hasil perundingan IJEPA tersebut telah mengakomodasi kepentingan Indonesia khususnya pembebasan 4 pos tarif produk olahan tuna dan cakalang asal Indonesia. Adapun produk olahan tuna dan cakalang yang mendapatkan pembebasan tarif 0% yaitu: 1) Skipjack and other bonito, in airtight containers (HS 1604.14.010); 2) Tunas, in airtight containers (HS 1604.14.092); 3) Skipjack and other

No	Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan III Tahun 2024	Tindak Lanjut pada Tahun 2024
		bonito, boiled and dried (HS 1604.14.091); dan 4) Other (HS 1604.14.099). Untuk 2 (dua) produk olahan terakhir (HS 1604.14.091 dan HS 1604.14.099) dengan persyaratan tambahan ukuran panjang bahan baku cakalang tidak kurang dari 30 cm. Selain 4 (empat) pos tarif olahan tuna di atas, Indonesia juga mendapatkan pembebasan tarif 0% sebanyak 67 pos tarif produk perikanan antara lain yellowfin tuna beku, fillet tilapia segar, fillet swordfish beku, kekerangan, olahan lobster, rajungan beku. Telah dibentuk Tim Kerja Penanganan Tuduhan Anti-Dumping dan Countervailing Duties Produk Udang Indonesia di Amerika Serikat melalui Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2024 yang terdiri atas unit teknis Eselon I KKP dan K/L terkait lainnya. Tim melakukan penyiapan data dan informasi yang diminta oleh Otoritas Amerika Serikat, sampai dengan diterbitkannya final determination dari proses investigasi untuk kasus anti-dumping dan countervailing duties oleh Otoritas Amerika Serikat. Tim bersama dengan Lawyer juga menyusun draft

No	Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan III Tahun 2024	Tindak Lanjut pada Tahun 2024
		jawaban atas kuesioner melalui serangkaian rapat dan koordinasi. Direktorat Pemasaran turut mengawal pelaksanaan hearing US International Trade Commision (USITC) pada tanggal 22 Oktober 2024 bersama dengan Lawyer Lizbeth R. Levinson yang mewakili AP5I dalam pembelaan pada proses hearing tersebut. Direktorat Pemasaran melaksanakan serangkaian rapat koordinasi dengan Tim Satgas Penanganan AD dari AP5I dalam rangka tindak lanjut hasil final determination kasus antidumping udang beku asal indonesia, selain itu juga melakukan analisis diversifikasi pasar udang beku Indonesia ke beberapa pasar potensial

Data dukung tindak lanjut atas rekomendasi pada laporan kinerja periode triwulan IV terdapat tautan <https://bit.ly/DataDukungTLLKj2024>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Budi Sulistiyo**

Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Budi Sulistiyo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	1.	Volume Produk Olahan KP Berdaya Saing (Juta Ton)	7,5
2	Ekonomi Subsektor Pengolahan dan Pemasaran Produk KP Meningkat	2.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	7,2
		3.	Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	59
3	Terwujudnya pengelolaan Kelautan dan Perikanan yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan	4.	Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	9
		5.	Kinerja Logistik Hasil Perikanan (Indeks)	71,9
		6.	Pembiayaan usaha KP melalui kredit program (Rp. Triliun)	10,26
		7.	Nilai PNPB Ditjen PDSPKP (Rp. Miliar)	7,62
		8.	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (Orang)	66.000
4	Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan meningkat	9.	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (Indeks)	104,75
5	Terkelolanya Pemerintahan yang Baik Mendukung Penguatan Daya Saing KP	10.	Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di lingkup Ditjen PDSPKP (unit)	2
		11.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP (Nilai)	3,3
		12.	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP	87
		13.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PDSPKP	84
		14.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen PDSPKP (%)	≤0,5
		15.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PDSPKP (%)	80
		16.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PDSPKP (Nilai)	76

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		17.	Unit kerja Ditjen PDSPKP yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94
		18.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PDSPKP (Nilai)	93,76
		19.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen PDSPKP (Nilai)	81
		20.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Ditjen PDSPKP (%)	80
		21.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen PDSPKP(%)	80
		22.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Ditjen PDSPKP (%)	80
		23.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen PDSPKP (%)	91

Data Anggaran :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (RP.000)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	159.199.000
	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	78.740.900
	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	71.858.100
	Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	8.600.000
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	80.297.500
	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	22.723.500
	Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	57.574.000
3	Program Dukungan Manajemen	147.402.651
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	147.402.651
Total Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2024		386.899.151

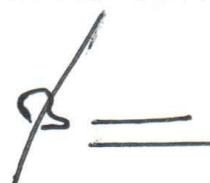
Jakarta, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



 **Sakti Wahyu Trenggono**

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan



Budi Sulistiyo